BIDANG SOSIAL POLITIK BEM FH UI 2025

3 DEPARTEMEN **1 BIDANG**



DEPARTEMEN
KAJIAN DAN AKSI STRATEGIS

DEPARTEMEN
PENGABDIAN MASYARAKAT

DEPARTEMEN
LINGKUNGAN HIDUP

Wajah di Balik Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025



Koordinator Bidang Sosial Politik

Badan Pengurus Harian Departemen Pengabdian Masyarakat



Koordinator Kajian dan Aksi Strategis



Koordinator Lingkungan Hidup



BIDANG SOSIAL POLITIK
BEM FH UI 2025

Staf

Bintang



Kayla



Shaina



Ribka



Puspa



Riliya



Nadya



Geovara



Fadhlan



Daryn



Anggita



Jasmine



Andi



Keira



Titi



Oca



Nabila



Fahrana



Nayla



Sasha



Maureen



Alfi



Rana



Nylea



Shan



Rifdah



Farrel



Lio

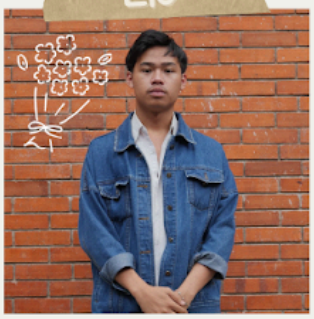

Kelvin



Kanaya



Fauzan



Tazki



Hanna



Shakila



Abel



Zhav



Faiqah



Acindhi



Dasha



Abie



Dave



Nasywa



KATA PENGANTAR
KETUA BEM FH UI 2025

Salam sejahtera untuk kita semua.

Kerja Sosial Politik selalu berangkat dari satu posisi yang jelas: berpihak. Ia tidak netral, tidak berdiri di tengah, dan tidak hidup dari kompromi yang menenangkan hati sendiri. Tahun 2025 menunjukkan betapa mahalnya keberpihakan itu. Ketika hukum digunakan untuk merapikan kekuasaan, ketika kebijakan dibuat tanpa mendengar, dan ketika kritik diperlakukan sebagai gangguan, memilih diam bukanlah sikap yang netral, melainkan ikut melanggengkan.

Di tengah situasi itu, Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025 tidak memilih jalan aman. Kawan-kawan memilih hadir, bersuara, dan bekerja dengan sadar bahwa setiap sikap memiliki konsekuensi.

Kilas Pergerakan dan Pengabdian 2025 ini menjadi catatan tentang sikap tersebut. Tentang bagaimana pergerakan tidak pernah terpisah dari pengabdian, dan bagaimana pengabdian kehilangan maknanya jika dilepaskan dari keberanian untuk melawan. Apa yang dilakukan mungkin tidak selalu mengubah keadaan secara langsung, tetapi ia menolak untuk ikut membenarkan keadaan yang salah.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh fungsionaris Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025. Terima kasih atas keberanian untuk terlibat, atas kerja keras yang sering kali tidak terlihat, dan atas kesediaan untuk memikul beban politik yang tidak ringan. Terima kasih karena memilih untuk tidak netral di tengah ketimpangan.

Satu tahun kepengurusan memang telah selesai, tetapi pergerakan dan pengabdian tidak berhenti pada pergantian kepengurusan. Selama masih ada kebijakan yang menyingkirkan, selama masih ada suara yang dibungkam, kerja-kerja Sosial Politik akan selalu menemukan urgensinya.

“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan!”

Terima kasih atas satu tahun keberanian dan keberpihakan.
Lawan, lawan, dan teruslah melawan.

Muhammad Fawwaz Farhan Farabi
Ketua BEM FH UI 2025

KATA PENGANTAR
KOORDINATOR BIDANG SOSIAL POLITIK BEM FH UI 2025

"Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali"
-Tan Malaka

Jika kita menarik waktu hingga kembali ke awal tahun 2025, mungkin kita akan teringat pada gerakan #IndonesiaGelap. Di tengah segala kekacauan saat itu, saya sejatinya menyimpan dua kekhawatiran. Pertama, karena indonesia sepertinya akan bubar lebih cepat sebagaimana ucapan Bapak Prabowo Subianto beberapa tahun silam. Dan kedua, karena saya bertanya-tanya: di tengah kegelapan ini, apakah masih ada orang-orang yang bersedia untuk menjadi cahaya bagi sesama? Ketika terbuka banyak opsi untuk mementingkan diri sendiri, atau ketika timbul pikiran bahwa mengusahakan perbaikan hanyalah angan-angan yang terlalu idealis dan mulia.

Namun, setelah menjalani satu tahun kepengurusan bersama seluruh fungsionaris Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025, kekhawatiran itu resmi hilang. Penyebabnya adalah karena saya akhirnya bertemu dengan 9 Badan Pengurus Harian dan 42 Staf Bidang Sosial Politik BEM FH UI yang senantiasa siap bergerak dan mengabdi bersama-sama. Pada akhirnya, saya sadar bahwa di tengah kegelapan, ternyata masih ada segelintir orang yang bersedia menjadi cahaya dan membuktikan bahwa harapan akan selalu ada. Setiap kali saya melihat mereka, saya selalu melihat harapan. Oleh karena itu, tidak ada kalimat yang lebih pantas untuk diucapkan selain terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh fungsionaris Bidang Sosial Politik BEM FH UI beserta seluruh elemen yang berkenan untuk membersamai perjalanan ini.

Bergerak dan mengabdi bukanlah sekadar pilihan, melainkan juga sebuah panggilan. Maka dari itu, Kilas Pergerakan dan Pengabdian 2025 ini hadir sebagai arsip yang menjadi bukti bahwa kami telah menjawab panggilan tersebut, bahwa Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025 memilih untuk lantang bersuara dalam rangka

mewujudkan cita-cita berupa “Indonesia yang lebih baik”. Sebab, kehidupan, termasuk kehidupan berorganisasi, tidak hanya soal apa yang kita dapatkan, tetapi juga tentang apa yang mampu kita berikan kepada sesama.

Satu tahun kepengurusan mungkin sudah berakhir, tetapi pergerakan dan pengabdian tidak pernah mengenal kata “akhir”.

Sekecil apa pun perlawanan, tetaplah perlawanan.
Panjang Umur Perjuangan!

Muhammad Bagir Shadr
Koordinator Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025

MENGENAL BIDANG SOSIAL POLITIK BEM FH UI 2025

Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) merupakan salah satu pilar utama dalam struktur organisasi BEM FH UI 2025. Sebagai salah satu pilar BEM FH UI 2025, Bidang Sosial Politik hadir dengan misi untuk menyikapi, mengawal, dan mengadvokasikan isu-isu sosial politik dalam rangka melaksanakan pergerakan dan pengabdian kepada masyarakat secara strategis, inklusif, dan partisipatif. Oleh karena itu, dua nilai yang selalu membersamai Bidang Sosial Politik BEM FH UI adalah "bergerak" dan "mengabdi". Landasan dari pergerakan dan pengabdian yang dilaksanakan oleh Bidang Sosial Politik adalah hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan *due process of law*. Selain itu, keberadaan Bidang Sosial Politik juga merupakan manifestasi dari salah satu tridharma perguruan tinggi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (UU Dikti), yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Selaras dengan upaya pemenuhan visi dan misi BEM FH UI, Bidang Sosial Politik membawahi tiga departemen, yaitu Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat), Departemen Lingkungan Hidup (DLH), dan Departemen Pengabdian Masyarakat (Pengmas). Masing-masing departemen ini memiliki arahan strategis dan kompetensi yang berbeda untuk menunjang kerja-kerja pergerakan dan pengabdian Bidang Sosial Politik. Meskipun demikian, ketiga departemen tersebut hadir dengan satu semangat yang sama: menunjukkan arah keberpihakan yang jelas kepada mereka yang tertindas.

REKAM JEJAK GERAK
BIDANG SOSIAL POLITIK BEM FH UI 2025

Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025 secara aktif merespons dinamika sosial dan politik. Secara keseluruhan, Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025 telah melaksanakan 18 aksi sebagai bentuk nyata pengawalan dan pengadvokasian terhadap beberapa isu dengan rincian:

- Aksi Hari Perempuan Internasional
- Aksi Tolak Intervensi Rektor Universitas Indonesia
- Aksi Satu Dekade Akseyna
- Aksi Tolak RUU TNI
- Aksi Hari Pendidikan Nasional
- Aksi Tolak Gelar Pahlawan Soeharto
- Aksi Simbolik Mengutuk Pernyataan Fadli Zon yang Mengaburkan Fakta Sejarah Peristiwa Pemerkosaan Massal 1998
- Aksi Tolak Draf Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Aksi Aparat Keparat
- Aksi #RakyatTagihJanji
- Aksi Rapat Dengar Pendapat Warga
- Aksi #CUKUPSATUTAHUN
- Aksi Tolak Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025)
- Aksi Solidaritas Masyarakat Adat: Bapak Sorbatua Siallagan
- Mengawal Keadilan untuk Sorbatua Siallagan
- Aksi Doa Bersama Merawat Lingkungan Hidup
- Pawai Koalisi Indonesia Bebas Emisi

Selain itu, Bidang Sosial Politik juga melakukan beberapa penyikapan dalam bentuk publikasi kajian, di antaranya adalah:

- Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Polri
- Kajian "Energi Hijau, Hutan Hilang: Transisi Energi Palsu Di Balik *Co-Firing*"
- Kajian "Meneguhkan Perlindungan Hukum bagi Pejuang Lingkungan: Tinjauan *Eco*-SLAPP dan Urgensi Penegakan Hukum Anti *Eco*-SLAPP di Indonesia"
- *Policy Brief* "Proyek Serampangan Nasional: Lingkungan Dirusak, Masyarakat Terdesak"
- *Amicus Curiae* BEM FH UI dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025

- *Amicus Curiae* BEM FH UI dalam Perkara Nomor 4398 K/PID.SUS-LH/2025
- Amicus Curiae BEM FH UI dan Environmental Law Society Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ELS FH UI) dalam Perkara Nomor 212/Pdt.G/2025/PN Cbi
- *Blueprint* Dharma Makara

Selama satu tahun kepengurusan BEM FH UI 2025, Bidang Sosial Politik berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian. Di antaranya adalah terselenggaranya Grand Launching Dharma Makara, Dengar Cerita Korban dan Rapat Dengar Pendapat Rakyat, Akademisi dan Praktisi Menggugat RKUHAP 2025, Audiensi DIM RUU Polri, Peluncuran Eksaminasi Putusan #DESAKMANDIRI, Audiensi *Policy Brief* "Proyek Serampangan Nasional: Lingkungan Dirusak, Masyarakat Terdesak", dan pengiriman tiga buah *amicus curiae*.

SKIP FH UI 2025



Kelvin Oktariano
Vice Project Officer I
SKIP FH UI 2025



Raihana Sakha
Project Officer
SKIP FH UI 2025



Jasmine Erlangga
Vice Project Officer II
SKIP FH UI 2025



Nayla Putri Kinasih
Sekretaris
SKIP FH UI 2025



Acindhi Saskeisha
PJ Materi dan Acara
SKIP FH UI 2025



Kayla Manda
Bendahara
SKIP FH UI 2025

Sekolah Kepemimpinan dan Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Indonesia (SKIP FH UI) 2025 merupakan program kerja di bawah Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025 yang berbentuk penanaman nilai yang diamini oleh Bidang Sosial Politik BEM FH UI, yakni bergerak dan mengabdi. Selain itu, SKIP FH UI 2025 memiliki harapan kepada para pesertanya agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis bahwa pendidikan tidak sekadar ilmu, tetapi juga sebagai alat pembebasan dari segala bentuk penindasan. Hal ini selaras dengan tema yang telah dirancang, yakni “Pendidikan sebagai Alat Pembebasan untuk Menumbuhkan Kesadaran Kepada Yang Tertindas melalui Pergerakan dan Pengabdian berlandaskan HAM demi Mengatasi Ketidakadilan Struktural”.

TEMU PRA-SKIP FH UI

Temu Pra-SKIP merupakan kegiatan pembuka dalam rangkaian acara SKIP FH UI 2025. Kegiatan ini menjelaskan gambaran umum tentang Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025 dan seluruh departemennya, serta nilai-nilai yang menjadi landasan pergerakan Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025. Kemudian, Temu Pra-SKIP

juga memuat penjelasan singkat mengenai SKIP FH UI 2025 secara keseluruhan, mulai dari jadwal rangkaian kegiatan, ketentuan tugas, pembagian kelompok, dan pembagian *Person in Charge* (PIC). Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memperoleh pemahaman secara menyeluruh mengenai SKIP FH UI 2025, sehingga mereka lebih mudah menjalani rangkaian acara SKIP FH UI 2025 dari awal hingga selesai, serta peserta dapat memahami mengenai peran dan nilai yang dibawakan oleh Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025.

RANGKAIAN KELAS SKIP FH UI

Rangkaian Kelas SKIP FH UI menjadi ruang pembelajaran dialogis yang membahas dasar-dasar pemahaman Bidang Sosial Politik BEM FH UI beserta isu-isu yang dibawakan. Kelas dilaksanakan dengan metode pemantik, pemaparan materi, dan sesi tanya jawab serta diakhiri dengan kuis yang digunakan sebagai sarana evaluasi pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Berikut adalah penjelasan mendetail Kelas I–IV SKIP FH UI:

KELAS I SKIP FH UI: "HAM sebagai Landasan Pergerakan dan Pengabdian"

Kelas I SKIP FH UI 2025 adalah kelas pengantar dari Kelas SKIP FH UI 2025, yang menjadi wadah bagi para peserta untuk memahami HAM, pergerakan dan pengabdian, serta kekerasan seksual. Ketiganya merupakan materi yang akan menjadi landasan untuk memahami materi-materi di kelas selanjutnya. Pada awal kelas, para peserta mendapat penjelasan dasar mengenai HAM. Kemudian, para peserta mendapat penjelasan mengenai pergerakan dan pengabdian yang merupakan bentuk peran mahasiswa dalam memperjuangkan HAM. Selain itu, peserta juga mendapat penjelasan dasar mengenai kekerasan seksual dan alur pelaporan kekerasan seksual di kampus. Dengan diadakannya Kelas I ini, peserta diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dasar mengenai HAM, pergerakan dan pengabdian, serta kekerasan seksual. Rangkaian kegiatan ini dilakukan pada tanggal 30 September 2025. Tahun ini, Kelas I dilaksanakan di Balai Sidang Djokosoetono.

KELAS II SKIP FH UI: "Penggusuran Paksa dan Penyusutan Ruang Sipil: Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia"

Kelas II SKIP FH UI 2025 memberikan pemahaman mengenai penggusuran

paksa dan penyusutan ruang sipil kepada para peserta. Kelas diawali dengan pemutaran video pemantik. Lalu, peserta diberikan materi mengenai penggusuran paksa dan hak atas tempat tinggal yang layak. Kemudian, pada materi selanjutnya, peserta diberi pemahaman dasar mengenai kebebasan sipil dan penyusutan ruang sipil. Dengan diadakannya Kelas II ini, peserta diharapkan dapat memahami pentingnya hak atas tempat tinggal yang layak dan kebebasan sipil. Rangkaian kegiatan ini dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2025. Tahun ini, Kelas II dilaksanakan di Balai Sidang Djokosoetono.

KELAS III SKIP FH UI: : "Kenyataan Pahit Pemenuhan Hak Hidup yang Layak dan Kesejahteraan Rakyat di Indonesia"

Kelas III SKIP FH UI 2025 memberikan pemahaman dasar mengenai kesejahteraan sosial, kemiskinan struktural, intervensi komunitas, dan bantuan hukum kepada para peserta. Kelas akan dimulai dengan penayangan video pemantik. Kemudian, para peserta diberi pemahaman dasar mengenai kesejahteraan sosial dan kemiskinan struktural. Lalu, peserta diberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk intervensi komunitas. Pada materi selanjutnya, peserta diberi pemahaman dasar mengenai bantuan hukum konvensional dan struktural. Dengan diadakannya Kelas III ini, peserta diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dasar mengenai kesejahteraan sosial, intervensi komunitas, dan bantuan hukum. Rangkaian kegiatan ini dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2025. Tahun ini, Kelas III dilaksanakan di Balai Sidang Djokosoetono.

KELAS IV SKIP FH UI: "Memperjuangkan Hak Lingkungan Hidup melalui Advokasi Lingkungan"

Kelas IV SKIP FH UI 2025 bertujuan untuk menjadi wadah bagi para peserta untuk mempelajari prinsip keadilan lingkungan, hak substantif dan hak prosedural dalam hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan hukum bagi pejuang hak lingkungan. Kelas diawali dengan pemutaran video pemantik. Kemudian, para peserta diberi penjelasan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang meliputi hak substantif dan hak prosedural. Selain itu, para peserta juga dikenalkan dengan prinsip keadilan lingkungan yang meliputi keadilan antargenerasi dan intragenerasi. Lalu, pada materi selanjutnya, peserta diperlihatkan kasus kerusakan lingkungan dan cara

memperjuangkan hak lingkungan. Peserta juga diberi pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan. Rangkaian kegiatan ini dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2025. Tahun ini, Kelas IV dilaksanakan di Auditorium Djokosoetono.

FORUM DISKUSI

Forum Diskusi dilaksanakan setelah kegiatan Kelas 2 dan Kelas 4 SKIP FH UI berakhir. Agenda ini berfungsi sebagai ruang terbuka bagi peserta untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan argumentasi terhadap isu-isu yang dibahas selama Kelas SKIP FH UI 2025.

***FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)**

Setelah mendapatkan pemahaman dalam rangkaian kelas, Peserta SKIP FH UI 2025 disuguhi oleh kegiatan FGD. Kegiatan ini bertujuan untuk mendalami dan merefleksikan materi melalui diskusi kelompok dengan membahas kasus posisi yang disertai pertanyaan pemantik sehingga peserta mampu mengaitkan kasus tersebut dengan aspek legalitas, keadilan, dan realitas sosial, serta memperkuat kemampuan berpikir kritis dan keberpihakan kepada kelompok tertindas. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2025 yang berlokasi di Ruang D407-D408 FH UI.

TURUN LAPANGAN

Setelah melalui proses refleksi kritis melalui rangkaian kelas dan FGD, Peserta SKIP FH UI 2025 diarahkan untuk melakukan aksi nyata melalui kegiatan Turun Lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan peserta SKIP FH UI 2025 dengan realitas sosial secara langsung, serta mengajak Peserta SKIP FH UI 2025 untuk berkontribusi melalui tindakan nyata. Pertama, pada tanggal 9 Oktober 2025, Peserta SKIP FH UI 2025 diajak untuk pergi ke Aksi Kamisan. Di sana, mereka diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita dan memberikan pertanyaan secara langsung kepada Ibu Sumarsih. Selanjutnya, mereka juga diberikan kesempatan untuk memberikan refleksi serta mengikuti rangkaian acara Aksi Kamisan dengan hikmat. Kedua, pada tanggal 10 Oktober 2025, Peserta SKIP FH UI mendatangi Komunitas Ciliwung Depok untuk mendapatkan pemahaman terkait kondisi alam di Sungai Ciliwung. Di sana, mereka juga diajarkan untuk membuat *ecobrick* secara berkelompok. Ketiga, pada tanggal 11 Oktober 2025, Peserta SKIP FH UI 2025 diajak untuk berkunjung ke Panti Sosial Bina Netra Rungu Wicara

Cahaya Batin. Di sana, mereka mendapatkan kesempatan untuk merasakan pengalaman secara langsung menjadi teman-teman tuna rungu dan tuna wicara dalam melakukan interaksi dan berbagai kegiatan lainnya.

LIVE-IN

Live-in merupakan salah satu rangkaian kegiatan SKIP FH UI 2025. Kegiatan ini diikuti oleh Peserta SKIP FH UI 2025 yang telah lolos tahap wawancara. Dalam rangkaian acara ini, peserta tinggal bersama warga setempat melalui sistem orang tua asuh dan dibagi ke dalam beberapa kelompok. *Live-In* bertujuan untuk meningkatkan kepekaan serta kesadaran peserta terhadap realitas sosial di masyarakat melalui pengalaman hidup langsung bersama warga. Kegiatan Live In SKIP FH UI 2025 dilaksanakan pada 25–26 Oktober 2025 yang berlokasi di Kebun Sayur, Ciracas. Rangkaian kegiatan *live-in* diisi dengan *Project* Barikara *Batch* 13, Mendengar Untuk Mengabdi (Mentum), dan ditutup dengan Akar Juang, yaitu prosesi pengukuhan peserta SKIP FH UI 2025 yang berhasil lolos dalam tahap wawancara menjadi Barikara *Batch* 13.

PASCA-SKIP

Setelah dikukuhkan menjadi Barikara *Batch 13*, mereka melangkah ke tahap selanjutnya, yakni Pasca-SKIP. Selama 30 hari, Barikara *Batch* 13 diberi kesempatan untuk magang di Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025 secara bergantian di ketiga departemen, yaitu Departemen Kastrat, Departemen Pengmas, dan DLH. Mereka sebagai staf magang ikut menyikapi isu-isu sosial politik dengan berbagai cara, seperti membuat infografis dan *reels*. Tidak hanya itu, mereka juga berkontribusi dalam program kerja ketiga departemen tersebut, seperti Dharma Makara, Seminar Nasional Reformasi Polri BEM FH UI 2025, Hari Pohon 2025, dan Smile Pro 2025. Lebih lanjut, Barikara *Batch* 13 juga diberikan tugas untuk melaksanakan Malam Keakraban Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025. Berkat kerja keras mereka, Malam Keakraban Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025 berhasil terlaksana dengan lancar di Villa du Soleil, pada tanggal 22–23 Desember 2025.

MIMBAR MERDEKA



Ribka Purba
Person in Charge
Mimbar Merdeka



Aphrodite Shaina
Person in Charge
Mimbar Merdeka



Nadya Almunawar
Person in Charge
Mimbar Merdeka



Fariq Alfi
Person in Charge
Mimbar Merdeka



Nabila Shahira
Person in Charge
Mimbar Merdeka



Tazkiyatun Nafsi
Person in Charge
Mimbar Merdeka



Faiqah Nurizzah
Person in Charge
Mimbar Merdeka

Mimbar Merdeka merupakan *podcast* yang diselenggarakan oleh BEM FH UI sebagai ruang diskusi kritis dalam merespon isu sosial politik yang terjadi di Indonesia. Selain itu, Mimbar Merdeka bertujuan untuk membantu penyikapan, pengawalan, dan pengadvokasian isu-isu sosial politik serta meningkatkan kesadaran IKM FH UI, UI dan Indonesia terhadap isu-isu tersebut.

PILOT EPISODE - 10 JULI 2025

Dalam Mimbar Merdeka "Pilot Episode", BEM FH UI memperkenalkan *podcast* ini sebagai wadah dialog terbuka yang bertujuan untuk mendorong kesadaran kritis mahasiswa dan masyarakat terhadap berbagai isu sosial politik yang ada dan terjadi di Indonesia. Episode ini menekankan pentingnya ruang diskursus yang bebas dan inklusif sebagai bagian dari demokrasi, serta sekaligus pengantar bagi pembahasan isu isu strategis ke depannya.



26 TAHUN PEMISAHAN ABRI: REFORMASI BELUM SAMPAI KE KANTOR POLISI- 30 JULI 2025

Selanjutnya, pada episode “26 Tahun Pemisahan ABRI: Reformasi Belum Sampai Kantor Polisi” podcast Mimbar Merdeka secara khusus membahas dinamika perjalanan reformasi kepolisian pasca pemisahan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Diskusi ini berfokus pada evaluasi terhadap capaian reformasi polri selama 26 tahun terakhir khususnya dalam aspek profesionalisme, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di tubuh Polri yang masih menghadapi berbagai hambatan. Episode ini menjelaskan bahwa meskipun pemisahan institusional telah dilakukan, tetapi reformasi kultural dan struktural masih menghadapi hambatan. Kekerasan aparat, lemahnya mekanisme pertanggungjawaban menjadi sebagian indikator yang menunjukkan reformasi kepolisian belum berjalan secara optimal dan substansial.

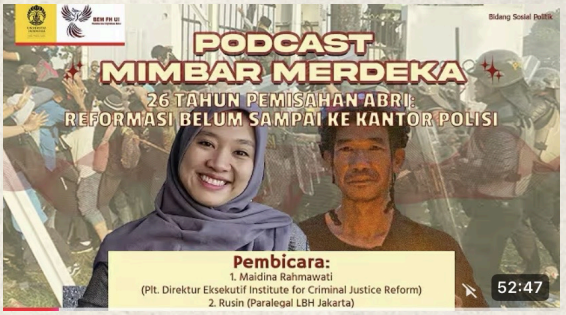

SESAK DI BALIK JERUJI: APAKAH BENTUK KEGAGALAN HUKUM? - 24 AGUSTUS 2025

Pada episode berikutnya, Mimbar Merdeka II yang diadakan oleh Pengmas menyorot permasalahan kelebihan kapasitas (*overcapacity*) yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Berkaca pada keresahan dan kekhawatiran akan pelanggaran HAM serta ketidaklayakan yang dialami para narapidana akibat kepadatan penghuni lapas dan rutan, isu ini menjadi krusial untuk dapat didiskusikan lebih lanjut bersama dengan para ahli. Melalui episode ini, terdapat perspektif baru akan penyebab dari penuhnya lapas dan rutan di Indonesia serta pembahasan lebih lanjut akan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalah ini, salah satunya seperti melakukan reformasi sistem peradilan dan pengembangan kompetensi para aparat penegak hukum.



PULAU-PULAU KECIL, SARANG PENJAHAT LINGKUNGAN - 13 SEPTEMBER 2025

Mimbar Merdeka III merupakan podcast yang diadakan oleh Departemen Lingkungan Hidup untuk mengangkat isu mengenai pertambangan yang semakin marak di pulau-pulau kecil. Isu tersebut dipilih karena kerusakan yang ditimbulkan atas pertambangan di pulau-pulau kecil memiliki dampak yang besar bagi masyarakat sekitarnya. Pemulihan atas dampak tersebut juga lebih sulit dibandingkan dengan pemulihan lingkungan di daratan yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk menimbulkan kesadaran masyarakat luas untuk melindungi ekosistem pulau-pulau kecil dari eksploitasi pertambangan.



KENDARAAN LISTRIK: ILUSI NOL EMISI - 30 OKTOBER 2025

Selanjutnya, DLH juga melaksanakan episode Mimbar Merdeka IV. Podcast Mimbar Merdeka IV adalah program kerja berupa podcast yang membahas isu “Kendaraan Listrik, Ilusi Nol Emisi”. Dalam podcast ini, kami berdiskusi dengan pembicara ahli mengenai paradigma kendaraan listrik yang sering dianggap sebagai solusi ramah lingkungan, padahal masih bergantung pada energi batu bara dan baterai berbahan nikel yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Karena itu, perlu ada pemahaman kritis mengenai dampak sebenarnya dari kendaraan listrik.



INKLUSIVITAS UNTUK PENYANDANG DISABILITAS: MENDORONG PEMENUHAN HAK DARI PERSPEKTIF HUKUM - 12 DESEMBER 2025

Podcast Mimbar Merdeka VI membahas mengenai permasalahan minimnya inklusivitas terhadap penyandang disabilitas, dampaknya, serta mencari solusi alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Isu ini dipilih lantaran adanya kekhawatiran tentang minimnya inklusivitas terhadap

penyandang disabilitas. Hal ini tergambarkan dari rendahnya partisipasi yang bermakna dalam pembangunan oleh penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas berat. Selain itu, terlihat juga dari minimnya proses pemberdayaan penyandang disabilitas di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penyandang disabilitas tidak memperoleh manfaat pembangunan yang sama dengan non disabilitas, hal ini dapat dibuktikan dengan terbatasnya akses terhadap sarana dan prasarana fisik sesuai dengan kriteria ramah disabilitas. Oleh karena itu, perlu upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas.



KILAS PERGERAKAN DAN PENGABDIAN



Tiara Kusuma Wardani
Person in Charge
Kilas Pergerakan dan Pengabdian



Andi Audry Tri Hutama
Person in Charge
Kilas Pergerakan dan Pengabdian



Ribka Purba
Person in Charge Kilas Pergerakan dan Pengabdian



Geovara Siregar
Person in Charge
Kilas Pergerakan dan Pengabdian



Muhammad Zhav Althaf
Person in Charge
Kilas Pergerakan dan Pengabdian

Kilas Pergerakan dan Pengabdian merupakan program kerja Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025 yang disusun sebagai penutup seluruh rangkaian program kerja, penyikapan, dan pengawalan isu yang dijalankan sepanjang satu tahun kepengurusan oleh bidang sosial politik. Melalui Kilas Pergerakan dan Pengabdian, terangkum dan terdokumentasi seluruh program kerja, penyikapan, pengawalan serta pengadvokasian isu-isu sosial politik yang telah dilakukan oleh Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025.

Sepanjang tahun 2025, Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025 mengangkat dan mengawal berbagai isu krusial. Seluruh penyikapan, pengawalan, serta advokasi atas isu isu tersebut dirangkum dalam bagian isu- isu yang terdapat dalam Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025. Secara garis besar, isu-isu yang diangkat dan dibawakan Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025 meliputi:

- **Departemen Kajian dan Aksi Strategis**
    - Reformasi Hukum
    - Gender dan Seksualitas
    - Penyusutan Ruang Sipil dan Pelanggaran HAM Berat

    - Penggusuran Paksa dan Pendidikan Tinggi
- **Departemen Lingkungan Hidup**
    - Energi dan Iklim
    - Perlindungan Hukum dan Urban
    - Sumber Daya Alam dan Agraria
- **Departemen Pengabdian Masyarakat**
    - Kemiskinan Struktural
    - Kesejahteraan Sosial
    - Pendidikan dan Anak
    - Bantuan Hukum Struktural
    - Intervensi Komunitas

Departemen Kajian & Aksi Strategis







GOOD TIMES 72411







MENGENAL LEBIH DEKAT
DEPARTEMEN KAJIAN DAN AKSI STRATEGIS BEM FH UI 2025

Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 merupakan salah satu departemen di bawah Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025 yang berperan sebagai ruang pergerakan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat melalui penyikapan, pengawalan serta advokasi isu-isu sosial politik secara strategis. Dalam pelaksanaannya, peran tersebut diwujudkan melalui berbagai program kerja dan isu isu strategis yang dibawakan oleh Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 sepanjang masa kepengurusan. Dalam struktur kepengurusan, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 terdiri atas tiga orang Badan Pengurus Harian serta enam belas orang staf. Departemen ini dikepalai oleh Anandaku Dimas Rumi Chattaristo selaku Kepala Departemen, dan didampingi oleh Mahatma Axel Wirasakti sebagai Wakil Kepala Departemen Subdepartemen Kajian serta Richard Hong sebagai Wakil Kepala Departemen Subdepartemen Aksi dan Propaganda.

Dalam menunjang pelaksanaan program kerja dan advokasi isu, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 terbagi ke dalam dua subdepartemen, yakni subdepartemen kajian serta subdepartemen aksi dan propaganda yang masing-masing beranggotakan 8 orang staf. Subdepartemen kajian berfokus pada telaah materi guna penyusunan kajian serta publikasi tertulis terkait isu sosial politik secara strategis yang menjadi landasan gerakan. Sementara itu, subdepartemen aksi dan propaganda berfokus pada merancang dan menyebarluaskan propaganda yang bersifat agitatif guna membumikan isu-isu sosial politik secara luas. Selain Pembagian subdepartemen, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 juga memiliki empat kelompok isu yang masing-masing terdiri atas dua orang staf subdepartemen kajian dan dua orang staf subdepartemen aksi dan propaganda. Kelompok isu tersebut meliputi :

- Reformasi Hukum
- Penyusutan Ruang Sipil dan Pelanggaran HAM Berat
- Gender dan Seksualitas
- Penggusuran Paksa dan Pendidikan Tinggi

Sebagai upaya dalam memperkuat dan menunjang penyikapan, pengawalan, dan advokasi terhadap isu-iu tersebut, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 menyelenggarakan sejumlah program kerja. Sepanjang masa kepengurusan, program kerja yang telah dilaksanakan meliputi:

- Diskusi Publik RKUHAP;
- Diskusi Publik RUU Masyarakat Adat;
- Diskusi Publik Mei Berkabung;
- Kompas Isu 2025;
- Diskusi Publik BEM FH UI x Perludem;
- Dengar Cerita Korban dan Rapat Dengar Pendapat Rakyat, Akademisi dan Praktisi Menggugat RKUHAP 2025;
- UI Gerak Bersama 2025;
- Sekolah Kepemimpinan dan Pengabdian (SKIP) FH UI 2025;
- Seminar Nasional BEM FH UI 2025;
- Mimbar Merdeka;
- 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKtP) BEM FH UI 2025; dan
- Kilas Pergerakan dan Pengabdian 2025.

Akhir kata, besar harapan agar seluruh proses penyikapan dan advokasi yang telah dilakukan oleh Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 dapat memberikan manfaat bagi FH UI, UI, serta masyarakat Indonesia secara luas.

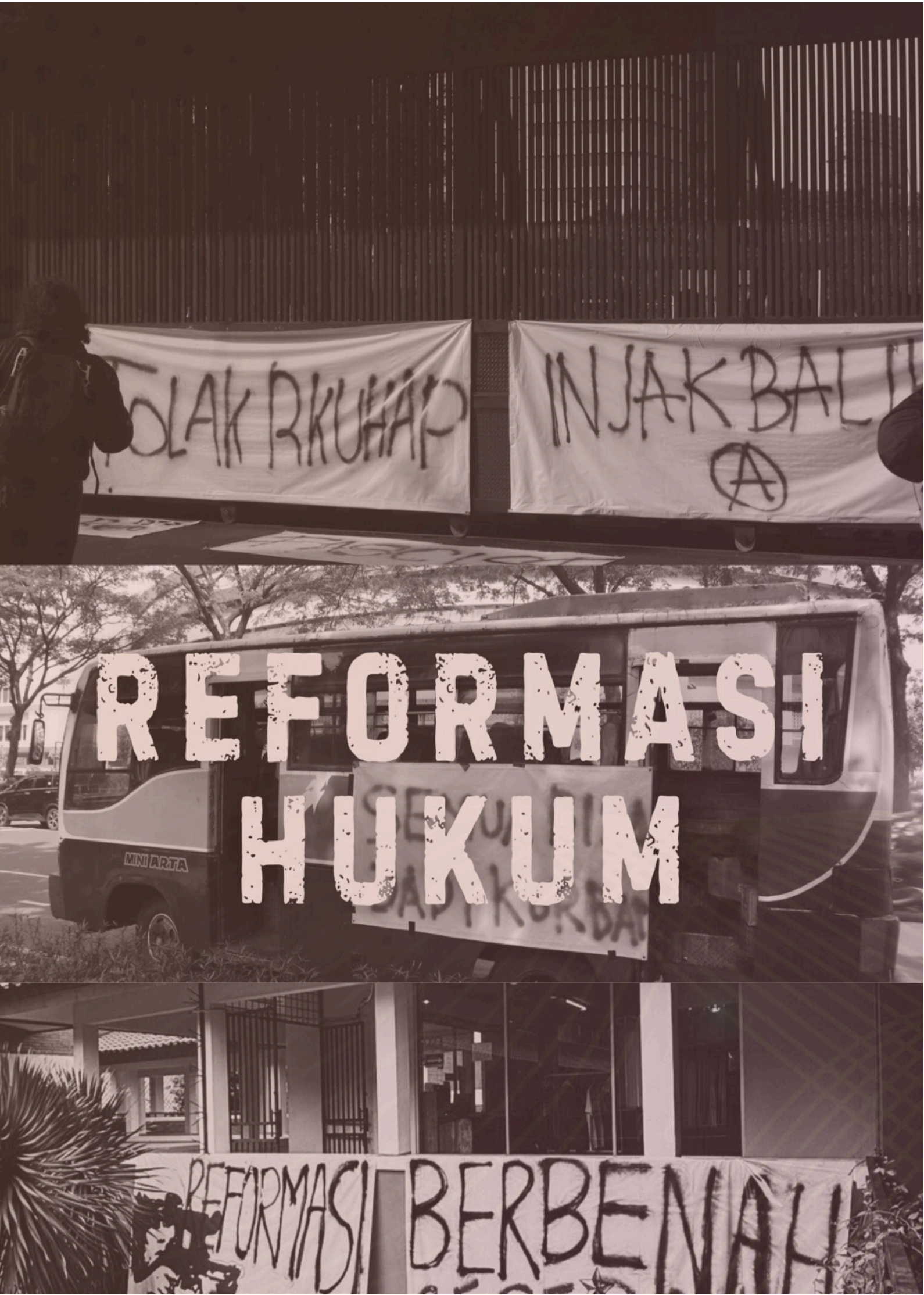
TOLAK RKUHAP
INJAK BALI
REFORMASI
HUKUM
MINI ARTA
REFORMASI BERBENAH

4 POROS GERAK KASTRAT

REFORMASI HUKUM

Reformasi hukum merupakan salah satu kelompok isu Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 yang berfokus untuk mengawal, menyikapi, dan mengadvokasikan beberapa isu utama mencakup reformasi *legal substance, legal structure,* dan *legal culture*. Cakupan isu tersebut meliputi Reformasi Polri, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA), Reformasi Partai Politik, dan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Sementara itu, ada beberapa isu lainnya yang terdiri dari beberapa isu insidental seperti Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI), pemilihan umum (pemilu), serta uji formil atas Revisi UU TNI dan Revisi Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (Revisi UU BUMN).

INSTITUSI PENUH KEBOBROKAN ITU BERNAMA POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas dasar sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Melalui amanat tersebut, konstitusi telah mengamanatkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Nahasnya, buruknya pengelolaan sumber daya manusia, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi, mulai dari proses pendidikan, pengisian jabatan, hingga perilaku Polri yang represif alih-alih humanis masih menghiasi tubuh Polri.

Menyikapi hal tersebut, sepanjang 2025, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 merilis publikasi sebagai bentuk penyikapan untuk menuntut dilangsungkannya reformasi Polri. Publikasi dimulai dengan **Selamat Memperingati: Reformasi Polri** sebagai satir pada tanggal 1 Juli 2025 dalam rangka hari Bhayangkara ke-79. Selain itu, Kastrat BEM FH UI 2025 juga melaksanakan Seminar Nasional dengan tajuk utama “Reformasi -Polri Segera!” yang dinuansakan dengan beragam propaganda mulai dari “**Reformasi Polri, Sekarang Juga!**” pada 3 November 2025 serta *story* Instagram

dengan tajuk “Korban Polri”, “Rombak Polri hingga Akar”, dan *reels* pasca

Seminar Nasional yang bertajuk “**Apa Tuntutan Mereka Terhadap Polri?**” pada 19 November 2025 dengan berkolaborasi bersama Barikara *batch* 13. Sebagai variasi metode penuansaan, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 juga melaksanakan beragam propaganda darat di FH UI dan lingkungan sekitarnya, serta memajang spanduk dan manekin di FH UI.

MENAKAR KEBEBASAN KITA: REVISI KUHAP HARUS BERPIHAK PADA HAK ASASI MANUSIA

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan sebuah produk hukum yang digunakan sebagai legitimasi untuk negara melalui aparat penegak hukum (APH) untuk membatasi hak-hak individu warga negara dalam suatu sistem peradilan pidana. Tentu saja, hal ini berarti KUHAP menjadi benteng terakhir dan garis batas antara tindakan yang boleh dilakukan APH untuk menegakkan keadilan serta batasan untuk tetap menjunjung tinggi HAM. Hingga 1 Januari 2026, KUHAP yang berlaku di Indonesia adalah KUHAP yang lahir di bawah bayang-bayang rezim orde baru (Orba) 44 tahun yang lalu, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981). Masalahnya, perkembangan zaman dan dinamika masyarakat menuntut adanya pembaharuan KUHAP. Belum lagi, KUHAP 1981 pun belum mampu melindungi HAM seluruh individu secara maksimal. Hal ini tercermin dari timpangnya posisi antara APH dan tersangka/terdakwa, luasnya kemungkinan diskresi oleh APH, tidak adanya jaminan pemulihan bagi korban, dan berbagai masalah lain.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah pun akhirnya menyepakati Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025). Sekilas, pembaharuan KUHAP ini tampak menjadi angin segar bagi reformasi sistem hukum acara pidana di Indonesia, tetapi ternyata kenyataannya tidak demikian. KUHAP 2025 semakin memperluas kewenangan APH. Sayangnya, perluasan ini tidak dibarengi oleh pengawasan yang ketat di pengadilan. Selain itu, masih terdapat banyak frasa yang bersifat multitafsir sehingga dapat merugikan tersangka/terdakwa, saksi, atau bahkan korban ketika peradilan pidana berjalan.

Pengesahan ini menjadi pertanda kemunduran penegakkan hukum di Indonesia serta perlindungan terhadap HAM warga

negaranya. Menanggapi hal tersebut, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 merilis infografis berjudul "**Langkah Mundur Pembaharuan KUHP : Benarkah Fair Trial Dalam Sistem Peradilan Mampu Tercipta ?**" pada 24 Mei 2025. Selain itu, terdapat pula infografis berjudul **"Berikut Adalah Hal-Hal Yang Harus Kamu Ketahui Tentang KUHAP**" pada 21 Juli 2025, kemudian disusul dengan publikasi "**Seruan Aksi Tolak Revisi KUHAP**" pada 21 juli 2025 sebagai upaya perlawanan terhadap Revisi KUHAP yang beresiko melegitimasi tindakan represi negara dan mengkriminalisasi warga negara secara sistematik dan berpotensi mengubah hukum acara pidana sebagai alat penundukan, bukan perlindungan.



Namun, penyikapan terkait revisi KUHAP tidak berhenti sampai di situ. Kastrat BEM FH UI 2025 bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHAP juga mempublikasikan **Rilis Draft Tandingan KUHAP** pada 9 Juli 2025 sebagai narasi tandingan dari KUHAP yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah. Meskipun demikian, seakan bebal dan keras kepala, Pemerintah dan DPR tetap melanjutkan wacana menggolkan revisi Undang-Undang yang sangat berpotensi merebut kebebasan masyarakat ini. Pada akhirnya, Kastrat BEM FH UI 2025 mengikuti **Aksi Tolak RKUHAP** sesaat sebelum KUHAP diundangkan pada tanggal 17 November 2025 dalam rangka menyatakan sikap penolakan Kastrat terhadap Revisi KUHAP yang jauh dari kondisi yang diidealkan.



21 TAHUN TANPA KEPASTIAN: RUU PPRT HANYA MENJADI PAJANGAN DPR

Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan sebutan bagi seseorang yang dipekerjakan dalam pekerjaan

rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja. Berdasarkan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2023, terdapat lebih dari 5 juta individu di Indonesia yang diperkirakan bekerja sebagai PRT. Dalam menjalani pekerjaannya, PRT acap kali mengalami penindasan-penindasan di dalam rumah yang isinya tidak selalu ramah dan dibatasi oleh tembok privasi tanpa pengawasan mumpuni. Penindasan-penindasan tersebut tercermin dari pelanggaran-pelanggaran hak PRT, seperti hak atas upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, serta maraknya fenomena kekerasan, diskriminasi, hingga pelecehan seksual. Penindasan ini diperparah dengan kondisi mayoritas PRT yang terjerat dalam rantai kemiskinan struktural dan rendahnya tingkat pendidikan PRT. Dengan demikian, PRT rentan menjadi korban kesewenang-wenangan oleh pihak pemberi kerja akibat relasi kuasa di antara mereka. Menyikapi hal ini, Kastrat BEM FH UI 2025 merilis infografis berjudul "**Bertahun-Tahun di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan: Negara Tak Acuh Terhadap Nasib PRT**" pada tanggal 10 November 2025. Infografis ini membahas lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang dialami PRT, pentingnya payung hukum yang menjamin hak-hak PRT, dan kaitannya dengan urgensi pengesahan RUU PPRT.

PENUH DALAM KETIDAKPASTIAN: UU MASYARAKAT ADAT HARUS SEGERA DIHADIRKAN

Masyarakat adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah Indonesia dihuni oleh masyarakat adat yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini tentu menjadi kekayaan bangsa dengan beragam etnis, suku, dan budaya. Untuk menghargai dan melindungi masyarakat adat, Indonesia secara resmi mengakui eksistensi masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya....". Dengan demikian, negara wajib memenuhi dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat.

Meskipun telah resmi diakui oleh negara, kehidupan masyarakat adat masih belum lepas dari bayang-bayang penindasan. Mereka kerap menjadi korban penggusuran paksa hingga kriminalisasi. Nahasnya, penindasan-penindasan ini pun seolah

divalidasi oleh negara dengan diberikannya izin bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk berbuat demikian. Salah satu kasus pelanggaran hak masyarakat adat yang pernah terjadi di Indonesia belakangan ini adalah kasus proyek Rempang Eco City. Penolakan terhadap proyek strategis nasional Rempang Eco City oleh masyarakat setempat justru dibalas dengan penyerangan oleh aparat yang mengakibatkan sebanyak delapan korban kekerasan fisik dan kerusakan pada kendaraan warga. Tak berhenti di sana, korban kekerasan tersebut pun ditangkap dan dijadikan tersangka kerusuhan di Pulau Rempang. Contoh penindasan-penindasan masyarakat adat lainnya terjadi pada kasus pembangunan ibukota negara (IKN), penambangan di Pulau Sangihe, dan kriminalisasi Sorbatua Siallagan dari masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan.

Maraknya penindasan terhadap masyarakat adat disebabkan oleh ketidakhadiran regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai status, hak, dan perlindungan bagi masyarakat adat. Sebagai bentuk komitmen negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia, DPR telah menginisiasi pembentukan rancangan undang-undang masyarakat adat (RUU MA). Namun, RUU ini tak kunjung disahkan hingga kini meskipun urgensinya sangat mendesak. Untuk membumikan pentingnya pengesahan RUU MA, Kastrat BEM FH UI 2025 menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema "Mendukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Bentuk Pengakuan, Keadilan, dan Penghormatan Hak bagi Masyarakat Adat". Sebagai bentuk penuansaan acara tersebut, Kastrat BEM FH UI 2025 pun menulis infografis berjudul "**15 Tahun Menunggu, Belum Juga Disahkan: RUU Masyarakat Adat Sudah Masuk Prolegnas Sejak 2009, tetapi Hingga Kini Belum Kunjung Disahkan**" pada 10 April 2025 dan memproduksi *reels* berjudul "**Masyarakat Adat Bersuara: Menanti Disahkannya RUU Masyarakat Adat**" pada 21 April 2025.

PARTISIPASI MASYARAKAT TIDAK BOLEH TERDEGRADASI: PEMILU HARUS TETAP MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG SUBSTANTIF

Pemilu merupakan sarana demokrasi utama yang dimiliki bangsa kita. Melalui pemilu, rakyat dapat berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan visi, misi, dan ideologi pilihannya. Namun, terdapat rencana perubahan beleid kepemiluan. Wacana perubahan

tersebut sejatinya tidak boleh mendegradasi partisipasi publik yang bermakna sehingga tidak ada kepentingan rakyat yang menjadi korban. Kastrat BEM FH UI 2025 melakukan penyikapan terkait Kodifikasi RUU Kepemiluan melalui Seminar "Menjamin Hak Politik Kelompok Minoritas: Kelompok Pemuda, Perempuan, Masyarakat Adat, dan Buruh Migran" yang berkolaborasi dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Selain itu, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 juga melakukan penyikapan melalui publikasi "**Pernyataan Sikap Aliansi Reformasi Hukum BEM Se-UI: DPR Jangan Gegabah! Segera Patuhi Putusan MK Tentang Perubahan Model Pemilu Serentak**" pada 4 Juli 2025 yang berisikan:

1. Mendesak DPR dan Pemerintah untuk memahami dimensi permasalahan kontekstual dari keserentakan Pemilu di Indonesia;
2. Mendesak DPR dan pemerintah untuk segera melakukan perubahan substansi seluruh undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, pilkada, dan parpol; serta
3. Menuntut komitmen DPR dan Pemerintah untuk aktif membenahi problematika pemilu demi terlaksananya demokrasi penuh di Indonesia dengan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, serta adil.

SEKALI PROBLEMATIS, SELAMANYA PROBLEMATIK: UU CIPTA KERJA YANG MENGKHIANATI RAKYAT

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lahir di tengah riuh penolakan rakyat yang suaranya justru dibungkam di balik tembok tebal gedung parlemen. Alih-alih mengedepankan transparansi dan partisipasi publik yang bermakna, proses pembentukannya yang cacat prosedur memaksa Mahkamah Konstitusi untuk mengetok palu inkonstitusional bersyarat. Namun, alih-alih melakukan perbaikan yang menyeluruh, pemerintah justru melakukan manuver hukum melalui penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian dipaksakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023, sebuah langkah yang jelas mencederai prinsip negara demokrasi.

Harapan rakyat untuk menarik napas lega pupus seketika karena UU Nomor 6 Tahun 2023 nyatanya tetap menjadi instrumen yang mencekik kesejahteraan kaum pekerja dan tidak menyelesaikan permasalahan sebelumnya. Kepastian kerja kian menguap dan posisi tawar buruh sengaja dilemahkan melalui aturan

kontrak yang eksploitatif serta sistem yang mengabaikan hak-hak dasar manusia demi kepentingan modal. Tidak berhenti di situ, regulasi ini juga membentangkan karpet merah bagi perusakan lingkungan hidup, meruntuhkan pilar-pilar perlindungan alam yang seharusnya menjadi warisan bagi generasi mendatang. Dalam rangka menanggapi dua tahun disahkannya UU Cipta Kerja, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 merilis sebuah infografis berjudul "***Mayday* : Nasib Pekerja Indonesia di Ujung Tanduk**" pada tanggal 2 Mei 2025.

KETIKA TIDAK ADA LAGI YANG BISA DIPERCAYA: KE MANA KITA BISA BERHARAP

Pada September 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus 7 perkara pengujian undang-undang (PUU) yang terdiri dari 5 permohonan uji formil Undang-Undang 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) serta 2 permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Akan tetapi, tak ada satu pun dari ketujuh putusan MK yang mengabulkan permohonan tersebut. Terdapat permasalahan mendasar yang timbul dari ketujuh putusan tersebut, yakin MK seolah-olah menjadi alat stempel dari tindakan culas penguasa, alih-alih memberikan keadilan bagi masyarakat. Apalagi, mengingat peran utama MK selain pengawal konstitusi juga MK harus menjadi penjaga prinsip demokrasi yang darinya MK harus memastikan bahwa demokrasi substansial benar-benar terlaksana. Maka dari itu, dalam menanggapi putusan tersebut, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 merilis publikasi berjudul "**Revisi UU TNI dan Revisi UU BUMN Dinyatakan Tetap Konstitusional Meski Problematik, Masih Adakah Institusi Yang bisa Kita Percaya di Negeri Ini?**" pada 26 September 2025.

PEMERINTAH DAN DPR SAMA-SAMA BERMASALAH

Pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia jauh dari kata sempurna. Pada 100 hari kerja pemerintahannya, pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengantongi sejumlah permasalahan, diantaranya kebijakan pembatasan penjualan eceran untuk *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg yang memicu kelangkaan, keracunan makan bergizi gratis, hingga pengelolaan tambang untuk perguruan tinggi melalui Revisi Undang-Undang Mineral dan

Batubara.



Permasalahan ini memicu sebuah aksi demonstrasi bertajuk #INDONESIAGELAP yang menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan Prabowo-Gibran. Tidak berhenti sampai disitu, bulan Agustus menjadi puncak dari muaknya masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang turut dibarengi dengan beragam permasalahan negara ini. Menyikapi hal tersebut, Kastrat BEM FH UI 2025 turut merilis publikasi "**DPR, Pemerintah, atau Asing? Sebenarnya Siapa yang Harusnya Kita Tumbangkan dalam Situasi Krisis Ini?**" pada 6 September 2025. Melalui infografis tersebut, Kastrat mencoba untuk merangkum permasalahan yang terjadi sebagai sebuah permasalahan sistemik yang memerlukan sebuah penyelesaian

struktural dengan merombak sistem yang menjadi akar permasalahan Indonesia. Selain itu, kemarahan masyarakat pada Bulan Agustus yang salah satunya dipicu dengan tingkah laku anggota DPR tidak berakhir sebagaimana yang diharapkan. Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), masyarakat berharap agar anggota DPR yang menjadi pemicu dari kemarahan masyarakat dapat menerima ganjaran atas perilakunya. Akan tetapi, MKD yang menjadi tonggak harapan justru berakhir menjadi pengkhianatan. Menanggapi putusan MKD tersebut, Kastrat BEM FH UI 2025 melakukan penyikapan dalam bentuk artikel yang berjudul "**Liburan Berkedok Hukuman, Mengulik Pemberian Sanksi kepada Ahmad Sahroni, Adies Kadir, dan Nafa Urbach oleh Mahkamah Kehormatan Dewan**" 18 September 2025. Pada akhirnya, BEM FH UI juga turut diundang untuk berkontribusi dalam perilisan film dokumenter politik yang berjudul "**Dirty Vote II: o3**" yang pada pokoknya coba mengurai permasalahan struktural dan sistemik yang terjadi di Indonesia.

Menjadi Bagian dari Kastrat

PUBLIKASI



Kenalan Yuk, Bersama Masyarakat Adat!



15 Tahun Menunggu Belum Juga Disahkan!



Diskusi Publik Mendukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat "Bentuk Pengakuan, Keadilan, dan Penghormatan Hak bagi Masyarakat Adat





Petisi Reformasi KUHAP



Mau Tau Jawabannya? Simak Ulasan Berikut KUHAP dan KUHP, Apa Bedanya?



Berikut Adalah Hal-Hal Yang Harus Kamu Ketahui Tentang KUHAP



Seruan Aksi Tolak Revisi KUHAP



Pernyataan Sikap Aliansi Reformasi Hukum Bem Se-UI: Dpr Jangan Gegabah! Segera Patuhi Putusan MK Tentang Perubahan Model Pemilu Serentak



RUU KUHAP Gagal Memperbaiki Masalah Besar Polisi dan Peradilan Pidana: Hentikan Tuduhan Hoaks Kepada Masyarakat, Tunda Pemberlakuan KUHAP Baru



Ketika Sistem Peradilan Pidana Dirancang Untuk Melindungi Si Penguasa



Revisi UU TNI Dan Revisi UU BUMN Dinyatakan Tetap Konstitusional Meski Problematik Masih Adakah Institusi Yang Bisa Kita Percaya Di Negeri Ini?



DPR, Pemerintah, Atau Asing? Sebenarnya Siapa Yang Harus Kita Tumbangkan Dalam Situasi Kritis Ini?



Cukup Satu Tahun



Telah Rilis Dirty Vote 03: Otot, Otak, Ongkos

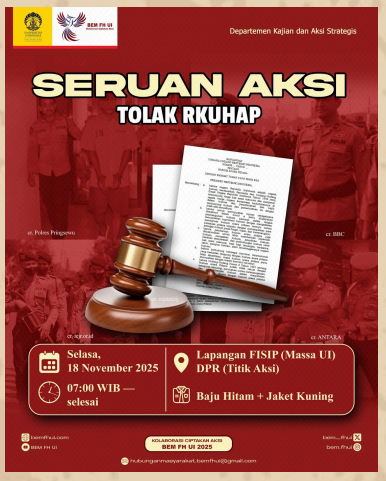

Seruan Aksi RKUHAP



Selamat Memperingati Reformasi Polri



RKUHAP: Cerita Korban Dari Masa Depan

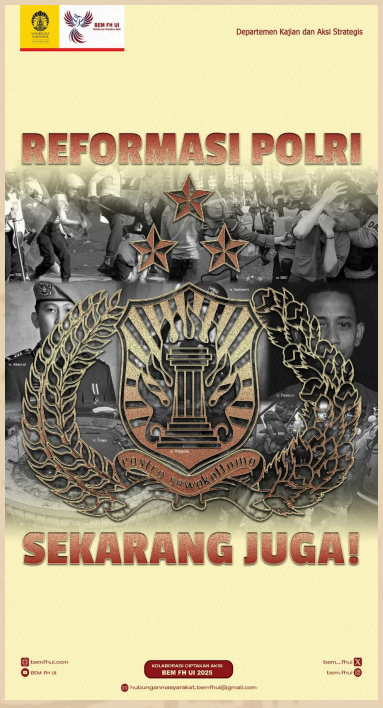

Reformasi Polri Sekarang Juga


SEMUA
BISA
JADI
KORBAN
#TOLAKRKUHAP


STOP IMPUNITAS
REFORMASI POLRI
KAMI INGIN AMAN, BUKAN KETAKUTAN .
STOP BUDAYA KEKERASAN!!!


REFORMASI
POLRI


SAAT
PRABOWO
BERKATA INDONESIA
AKAN BUBAR PADA
TAHUN 2030,
ITU KARENA DIA TAHU
KE(TIDAK)BIJAKANNYA
SELAMA 2024–2029
HANYA AKAN MEMBAWA
NEGARA INI PADA
KEHANCURAN.
????????
#INDONESIAGELAP


TOLAK
REVISI
KUHAP


#TOLAKRKUHAP
#SEMUABISAJADIKORBAN


YOURE THE TERRORIST
BBC
Food Estate: Keterlibatan militer di lahan proyek lumbung pangan Merauke bikin warga terkucil
Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate seluas dua juta hektare di Merauke, Papua Selatan, mendatangkan ketakutan bertapis...
28 Okt 2024
Kompas.com
Dalam Sebulan, Hampir 1.000 Siswa di Jogja Keracunan MBG, BGN Perbaiki Tata Kelola Dapur
Hal ini dikatakan Dadan menghadapi kasus keracunan MBG yang kembali terjadi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baca berita tanpa iklan.
3 days ago
Kompas.com
https://nasional.kompas.com › News › Nasional
Affan Kurniawan: Rakyat Kecil Mati Dilindas Aparat Negara
2 hari yang lalu — Namun malam itu, tubuh Affan remuk ditindas kendaraan taktis Brimob lengkap di jalanan Pejompongan, di tengah keramaian dan hiruk-pikuk.
BBC
Prabowo klaim angka pengangguran turun – 'Tidak menggambarkan kenyataan,' kata pengamat
Presiden Prabowo Subianto mengeklaim persentase pengangguran Indonesia berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998.
2 weeks ago


Departemen Kajian dan Aksi Strategis
HADIRI DAN KRITISI!
KENAPA KITA TERUS BERISIK SOAL REFORMASI KUHAP?
X Space untuk menjelaskan kenapa kami #TolakRKUHAP yang tak berkeadilan.
Minggu, 13 Juli 2025 20.00-21.30 WIB
(Twitter) space dengan host: @YLBHI
Pembicara:
YLBHI | KontraS | ICJR | LBH Jakarta | IJRS
Bareng Warga | PAKU ITE | BEM FH UI | ICEL
#TOLAKRKUHAP
KOLABORASI CIPTAKAN AKSI!
BEM FH UI 2025


YOU PASS THE LAW, WE START THE WAR.
#TOLAKRUUTNI


JARI TENGAH
YANG
TERTINDAS
DIBALAS
PELURU
PANAS
PENYUSUTAN RUANG
SIPIL DAN PELANGGARAN
HAM BERAT
POLISI
PEMBUNUH
SAY HIS
NAME
RAKYAT TIDAK
TAKUT PADA
KEPARAT

PENYUSUTAN RUANG SIPIL

Demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan pemilu atau lembaga perwakilan rakyat semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat diberikan ruang untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan bernegara. Partisipasi publik yang bermakna hanya dapat tumbuh apabila tersedia "ruang sipil" yang terbuka, aman, serta bebas dari tekanan. Ruang sipil pada dasarnya adalah ruang aman bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna seperti menjalankan hak berserikat, berekspresi, dan berkumpul secara damai. Jaminan atas kebebasan tersebut sejatinya telah ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun, jaminan tersebut kerap runtuh ketika berhadapan langsung dengan praktik kekuasaan. Dalam realitas politik Indonesia, ruang sipil justru mengalami penyempitan sistematis. Bentuk penyusutan ruang sipil tecermin melalui pembatasan partisipasi publik, pembungkaman kritik, intimidasi terhadap pers, kriminalisasi ekspresi, hingga pengabaian suara kelompok masyarakat yang berseberangan dengan kepentingan kekuasaan. Negara hadir bukan sebagai pelindung kebebasan sipil, melainkan sebagai aktor yang aktif mengatur, membatasi, bahkan menekan ruang gerak warga negaranya. Pembatasan-pembatasan ini secara langsung merusak pelaksanaan hak-hak kebebasan sipil yang dijamin konstitusi dan menjadikan demokrasi sekadar prosedur tanpa substansi.

Memasuki tahun 2025, ancaman terhadap ruang sipil semakin mengeras seiring dengan pengkhianatan terhadap agenda Reformasi. Dua puluh tujuh tahun pasca tumbangnya orde baru, pola-pola otoritarianisme justru hadir kembali dalam wajah baru yang lebih halus dan terlegitimasi. Represi aparat dalam aksi #TolakRUUTNI, kriminalisasi massa aksi *May Day* 2025, penangkapan dan penculikan aktivis, hingga intimidasi terhadap pers menegaskan bahwa negara lebih memilih kekerasan koersif ketimbang dialog demokratis. Ruang sipil yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi justru semakin dipersempit, sementara aparat negara bertransformasi dari pelindung hak warga negara menjadi alat pembungkam suara rakyat. Berangkat dari realitas tersebut, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 secara konsisten mengambil posisi untuk terus menyikapi, mengawal, dan mengadvokasikan berbagai persoalan yang mencederai kebebasan ruang sipil mulai dari isu kegagalan reformasi 1998, pembungkaman pers, hingga penangkapan aktivis pada aksi sepanjang tahun 2025.

27 TAHUN REFORMASI: DEMOKRASI YANG TERUS DIKHIANATI

Dua puluh tujuh tahun setelah tumbangnya Rezim Soeharto pada 12 Mei 1998, era reformasi dimulai sebagai babak baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Reformasi seharusnya menjadi tonggak konsolidasi demokrasi dan peneguhan cita-cita perubahan. Momentum tersebut lahir dari tuntutan rakyat atas transformasi mendasar dalam kehidupan bernegara, mulai dari penegakahan hukum yang berkeadilan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, hingga pembongkaran struktur kekuasaan lama melalui pengadilan terhadap Soeharto beserta jajarannya.

Namun, setelah hampir tiga dekade berlalu, perjalanan reformasi justru menunjukan kontradiksi yang semakin nyata. Agenda-agenda perubahan tersebut tidak terwujud secara substansial, malah demokrasi justru kerap tereduksi dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan. Pola-pola lama yang identik dengan otoritarianisme orde baru perlahan hadir kembali mengemuka dalam wajah baru yang lebih halus dan terlegitimasi menandakan bahwa semangat reformasi terus mengalami pengikisan. Berangkat dari kondisi tersebut, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 merilis infografis yang berjudul "**Reformasi Masih Menjadi Angan-Angan Here's Why**" pada 22 Mei 2025 sebagai bentuk penyikapan terhadap arah reformasi yang kian menjauh dari cita-cita awalnya.



Selain itu, Kastrat BEM FH UI 2025 juga mengadakan Diskusi Publik dengan tajuk "**27 Tahun Reformasi, Apakah Orde Baru Terlahir Kembali?**"pada 19 Mei 2025 guna menjawab apakah reformasi yang dicita-citakan selama ini hanyalah involusi belaka.

MENGAWAL KONSTITUSI DIBALAS REPRESI: CATATAN REPRESIFITAS APARAT DALAM AKSI MASSA 2025.

Sepanjang tahun 2025, gelombang aksi massa kembali mewarnai ruang publik sebagai bentuk pengawalan terhadap konstitusi, demokrasi, dan kebijakan negara yang semakin menyimpang dari kepentingan rakyat. Aksi-aksi tersebut lahir dari kegelisahan masyarakat sipil atas berbagai keputusan politik dan hukum yang berpotensi mereduksi prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Namun, alih-alih direspons melalui dialog terbuka dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara, negara justru kembali menunjukan wajah represifnya.

Dalam berbagai aksi massa di sejumlah daerah, aparat berulang kali menggunakan pendekatan kekerasan dalam mengendalikan massa. Tindakan intimidasi terhadap jurnalis, pemukulan dan penganiayaan terhadap demonstran, penangkapan sewenang-wenang, hingga pembatasan akses bantuan hukum terus menerus menjadi pola yang berulang. Praktik-praktik tersebutlah yang mencerminkan kegagalan aparat dalam menjunjung hak asasi manusia dan menegaskan bahwa kebebasan berekspresi masih diperlakukan sebagai ancaman, bukan sebagai hak yang warga negara yang harus dilindungi. Kenyataan ini menunjukan bahwa represi bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sebuah pola sistematik dalam merespons kritik publik. Ruang sipil yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi justru terus ditekan melalui kekuatan koersif negara. Aparat tidak hanya gagal menjadi pelindung hak warga negara, tetapi justru bertransformasi menjadi alat pembungkam suara rakyat.

Berangkat dari realitas tersebut, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 merilis **"Press Release BEM Se-UI: Tindakan Represif Aparat Dalam Aksi #TOLAKRUUTNI"** pada 23 Maret 2025. sebagai bentuk penyikapan terhadap maraknya kekerasan negara dalam aksi #TolakRUUTNI. Represi tidak hanya terjadi melalui pemukulan dan penangkapan terhadap demonstran. Tidak berhenti pada aksi RUU TNI, represi hingga kriminalisasi juga terjadi pada massa aksi *May Day* 2025. Maka dari itu, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 bersama Aliansi BEM se-UI juga merilis "**Pernyataan Sikap Aliansi BEM Se-UI: Menuntut Pencabutan Status Tersangka 14 Massa Aksi May Day 2025**" pada 5 Juni 2025 yang berisikan:

1. Menuntut pencabutan status tersangka serta penghentian proses penyidikan 14 massa aksi yang menjadi korban kriminalisasi aksi Hari Buruh 1 Mei 2025 serta mendesak

kepolisian untuk memberikan pembebasan tanpa syarat;

2. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan represifitas terhadap peserta aksi dan seluruh gerakan masyarakat; mengusut dan menindak tegas aparat kepolisian yang melakukan kekerasan, intimidasi, dan pelanggaran selama pengamanan aksi Hari Buruh serta memberikan jaminan perlindungan konstitusional bagi warga negara dalam menyampaikan pendapat; dan
3. Menuntut Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk mengevaluasi total prosedur dan pelaksanaan pengamanan demonstrasi.



Nahasnya, represifitas aparat kian tecermin tatkala masyarakat Indonesia sedang menuntut keras hak-haknya. Pada saat itu, seorang pengendara ojek daring dilindas oleh anggota Kepolisian yang mengendarai kendaraan taktis (rantis) dan harus berakhir dengan kematian. Menyikapi hal tersebut, Kastrat BEM FH UI 2025 mengikuti aksi massa dengan tajuk "**Aparat Keparat**" pada 29 Agustus 2025.



Namun, pasca rentetan aksi pada akhir Agustus hingga awal Bulan September, kebebasan ruang sipil Indonesia semakin terdegradasi dengan rentetan penangkapan aktivis. Pada akhirnya, Kastrat BEM FH UI melakukan pernyataan sikap bersama Aliansi Forum Komunikasi BEM FH dengan tajuk "**Pernyataan Sikap Forum Komunikasi BEM FH: Mengencam Penculikan dan Menuntut Pembebasan Para Aktivis Dan Demonstran Yang Ditahan**" pada 1 Oktober 2025 yang berisikan:

1. Mengecam keras tindakan aparat Polri yang melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap para aktivis dan demonstran; mendesak Polri untuk segera membebaskan seluruh aktivis dan demonstran;
2. Menuntut seluruh pejabat negara untuk menghentikan praktik pembungkaman suara rakyat melalui kriminalisasi dan represifitas aparat Polri; serta
3. Mendesak seluruh pejabat negara untuk mengindahkan prinsip demokrasi dan negara hukum melalui perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM warga negara.

Tidak berhenti sampai disitu, ketika masyarakat mengira adanya secercah harapan bagi para aktivis yang ditahan, putusan praperadilan keempat tahanan politik malah menjauh dari penegakan demokrasi yang sebenarnya. Melalui publikasi "**Hakim Tunduk pada Kekuasaan: Tergerusnya Keadilan para Tahanan Politik**" pada 28 Oktober 2025, Kastrat BEM FH UI 2025 menyatakan sikap kekecewaan terkait putusan hakim yang hanya menunjukan sikap positivis dan tidak menggali keadilan substantif bagi para tahanan politik. Lebih lanjut, Kastrat BEM FH UI 2025 bersama Aliansi BEM se-UI melakukan Pernyataan Sikap terkait hal serupa dengan tajuk "**Mengecam Putusan Praperadilan Tahanan Politik yang Mencederai Prinsip Negara Hukum yang Demokratis**" pada 31 Oktober 2025 yang berisikan

1. Mengecam putusan keempat hakim tunggal dalam permohonan praperadilan Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Khariq Anhar, dan Muzaffar Salim yang melanggengkan penindasan dan mencederai prinsip negara hukum yang demokratis;
2. Mendesak hakim yang bertugas dalam mengadili pokok perkara para tahanan politik untuk aktif mencari nilai-nilai keadilan dan ketuhanan yang hidup di masyarakat dan tidak hanya

terpaku pada hukum positif dan tafsir sempit semata dalam mengadili perkara;

3. Menuntut komitmen seluruh hakim di Indonesia untuk senantiasa berpegang teguh pada prinsip negara hukum
4. yang demokratis sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945; dan
5. Mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk bersama-sama melawan kriminalisasi dan segala bentuk penindasan yang terus menerus dilanggengkan oleh sistem di negeri ini.



Namun, seakan tiada akhir, duka akan represifitas aparat sepanjang Bulan Agustus hingga September 2025 masih meninggalkan luka mendalam. Dua korban yang hilang dalam rentetan aksi demonstrasi sepanjang Bulan Agustus hingga September 2025 ditemukan tidak bernyawa. Dalam kondisi yang mengenaskan tersebut, kejelasan mengenai penyebab kematian masih sangat diragukan. Tak ayal, penyebabnya tak lain juga karena pihak Kepolisian yang kurang maksimal dalam mencari penyebabnya. Menanggapi hal tersebut, Kastrat BEM FH UI 2025 juga merilis sebuah artikel dengan judul "**Simpang Siur Fakta Penemuan Kerangka Farhan dan Reno Ditemukan Tak Bernyawa di Gedung ACC, Benarkah Keduanya Meninggal karena Kecelakaan?**" pada 13 November 2025.

BENARKAH PERS MERUPAKAN PILAR DEMOKRASI KEEMPAT ATAU HANYA SEKADAR FIGURAN DEMOKRASI BELAKA?

Pers acap kali disebut sebagai pilar demokrasi keempat suatu bangsa. Namun, kebebasan pers di Indonesia masih menjadi suatu permasalahan tersendiri. Dalam praktiknya, pers di Indonesia seringkali dihadapkan dengan berbagai ancaman hingga intimidasi yang membuat mereka jauh dari kata nyaman dan aman dalam melaporkan sebuah berita. Beberapa diantaranya adalah ketika jurnalis Tempo yang dikirimi kepala babi

hingga wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diintimidasi. Selain itu, munculnya narasi pengekangan media internasional di Indonesia juga menjadi salah satu hambatan bagi kebebasan pers di Indonesia. Menyikapi permasalahan tersebut, Kastrat BEM FH UI 2025 merilis sebuah propaganda bertajuk "**Rezim Anti Kritik: Kebebasan Berpendapat Terus Terusik**" pada 25 Mei 2025 sebagai pernyataan sikap akan minimnya kebebasan pers di Indonesia serta sifat anti-kritik pemerintah Indonesia.

PELANGGARAN HAM BERAT

Indonesia secara formal telah membangun kerangka hukum perlindungan hak asasi manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) , penguatan jaminan konstitusional (Bab XA UUD NRI Tahun 1945), hingga pembentukan mekanisme peradilan khusus untuk pelanggaran HAM berat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Selain itu, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia juga telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengikat negara untuk menjunjung, melindungi, dan memenuhi HAM. Namun, lagi-lagi dalam praktiknya, perangkat hukum tersebut lebih sering berfungsi sebagai etalase demokrasi ketimbang instrumen pencari keadilan. Pengadilan HAM tak kunjung menjadi ruang pemulihan bagi korban, melainkan terjebak dalam stagnasi politik dan kompromi kekuasaan. Alih-alih menjadikan regulasi HAM sebagai jalan penyelesaian, negara justru membiarkan kejahatan terhadap kemanusiaan itu mengendap sebagai arsip sejarah. Tragedi Tanjung Priok, Pembunuhan Marsinah, Tragedi Trisakti, Peristiwa Mei 1998, Tragedi Simpang KKA, hingga Operasi Terpadu Aceh menjadi luka kolektif yang tidak pernah dipulihkan dan diselesaikan.

Dalam rangka menyikapi kegagalan negara tersebut, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 secara konsisten mengambil peran dalam mengawal dan mengadvokasikan isu pelanggaran HAM berat. Pada periode 2025, Kastrat BEM FH UI melakukan penuansaan Mei Berkabung, yang disusul dengan Diskusi Publik dengan tema “27 Tahun Reformasi Apakah Orde Baru Terlahir Kembali?” serta penuansaan September Hitam sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya penghapusan ingatan sejarah serta penyangkalan negara atas kejahatan manusia yang terjadi. Penuansaan tersebut menjadi medium politik untuk menegaskan bahwa pelanggaran HAM berat bukanlah persoalan masa lalu yang selesai, melainkan tanggung jawab negara yang hingga kini belum ditunaikan.

SERATUS HARI KEKUASAAN, SERATUS CARA MENGHAPUS KEJAHATAN

Memasuki 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun 2025, arah penegakan hukum dan HAM justru memperlihatkan kemunduran yang terang terangan.

Bukan hanya karena kekuasaan kini dipegang oleh Prabowo, sosok dengan beban sejarah pelanggaran HAM berat yang tak pernah diselesaikan, tetapi juga karena negara mulai memproduksi narasi pembenar untuk mengaburkan kejahatan masa lalu. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut Tragedi Mei 1998 bukan sebagai pelanggaran HAM berat, menjadi alarm keras atas arah politik hukum rezim ini.

Pernyataan tersebut bukan sekadar kekeliruan tafsir hukum, melainkan bentuk pengingkaran negara terhadap penderitaan korban. Ketika pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas isu hukum dan HAM justru mengecilkan tragedi kemanusiaan, negara sedang secara aktif menghapus kejahatan dari ingatan publik.



Dalam 100 hari pertama pemerintahan, alih-alih membuka ruang keadilan, kekuasaan justru memilih memutihkan sejarah. Ini menegaskan bahwa impunitas bukan lagi akibat kelalaian, melainkan kebijakan yang dipelihara. Situasi ini kian menegaskan paradoks kekuasaan 2025: pelaku dan aktor yang dibayangi pelanggaran HAM berat memperoleh legitimasi politik penuh, sementara negara melalui para pejabatnya sibuk merelatifkan kejahatan tersebut. Korban dan keluarga korban kembali dipaksa menunggu, bukan karena hukum belum tersedia, tetapi karena negara menolak menggunakannya. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat keadilan, melainkan sebagai tameng kekuasaan.

Seratus hari pemerintahan Prabowo-Gibran dengan narasi pembelaan ala Yusril menunjukkan satu hal yang tak terbantahkan yakni negara sedang membangun masa depan dengan mengorbankan kebenaran masa lalu. Ketika pelanggaran HAM berat dinegasikan, dan kekuasaan justru dirayakan, pesan yang disampaikan negara menjadi gamblang bahwa keadilan bisa ditawar, sejarah bisa dipelintir, dan impunitas tetap menjadi fondasi sah dalam politik nasional. Menanggapi seratus hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang diwarnai oleh penyangkalan sejarah, pembiaran impunitas dan pelemahan komitmen

negara terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 merilis Propaganda Lepas berjudul "**Daftar ~~Prestasi~~ Problem 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran**" pada 4 Februari 2025. Tidak berhenti sampai disitu, 100 hari Prabowo-Gibran ditutup dengan wawancaranya yang seolah menyalahkan asing atas kekacauan pemerintahannya selama ini. Menanggapi hal tersebut, Kastrat BEM FH UI 2025 merilis propaganda yang berjudul "**Prabowo Yapping**" pada 9 April 2025 serta publikasi yang berjudul "**Rakyat Bertanya: Presiden Tidak Menjawab**" pada 10 April 2025 dan "**Banyak Bunyi, Banyak Blunder: This Is Prabowo Subianto!**" pada 11 April 2025.

FADLI ZONK ASAL NGOMONG!

Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang meragukan bahkan menafikan terjadinya pemerkosaan dalam Tragedi Mei 1998 bukan sekadar kekeliruan narasi, melainkan bentuk kekerasan simbolik baru terhadap para penyintas. Fakta-fakta yang telah dicatat oleh Tim Gabungan Pencari Fakta, diakui oleh Komnas Perempuan, dan diperjuangkan oleh korban selama puluhan tahun, kini diperlakukan seolah rumor yang layak dihapus dari ingatan kolektif bangsa. Berangkat dari kondisi tersebut, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 merilis infografis berjudul "**Jangan Bodohi Kami! Pemerkosaan Mei 1998 Bukan Rumor!**" pada 24 Juni 2025 dan propaganda lepas berjudul "Pemerkosaan Massal 98 Bukan **Rumor! Fadli Zonk Aktivis Pengkhianat Sejarah**" pada 25 Juni 2025.

MENOLAK PENGKHIANATAN TERBESAR: GELAR PAHLAWAN SOEHARTO

Soeharto merupakan Presiden Kedua Republik Indonesia.



Di tangannya, jutaan rakyat Indonesia menjadi korban kelam pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari Peristiwa Penembakan Misterius, Peristiwa Tanjung Priok, hingga beragam

peristiwa lainnya menjadi bukti nyata kekejian Rezim Soeharto. 27 tahun semenjak Rezim Soeharto digulingkan melalui Peristiwa Reformasi, narasi pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto kembali muncul ke permukaan. Melalui ironi tersebut, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 merilis beberapa publikasi yang berjudul "**Tolak Gelar Pahlawan Soeharto**" pada 13 Mei 2025 serta mengikuti Aksi Tolak Gelar Pahlawan Soeharto dan merilis publikasi "**Soeharto Bukan Pahlawan**" pada 11 November 2025.

LUKA LAMA YANG TAK KUNJUNG MEREDA: MENAGIH KEADILAN PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU

Berbagai rentetan sejarah kelam menghiasi perjalanan panjang bangsa Indonesia. Tak ayal, ribuan bahkan jutaan darah masyarakat telah bersimbah dalam tambuk kekuasaan pemerintahnya selama ini. Bahkan, karena banyaknya peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia, terdapat dua bulan yang dijuluki "Mei Berkabung" serta "September Hitam" yang menjadi tanda karena saking banyaknya peristiwa yang terjadi. Menyikapi permasalahan tersebut, Kastrat BEM FH UI 2025 merilis beberapa penyikapan dimulai dari propaganda "**Mei Berkabung Menolak Lupa Kebengisan Negara**" pada 1 Mei 2025. Selanjutnya, sepanjang Bulan Mei 2025, Kastrat BEM FH UI juga merilis "**Seruan Aksi Kamisan Ke-859**" dan "**#MeiBerkabung Masih Membayang Bercak Luka Yang Tak Kunjung Sembuh**" pada 5 Mei 2025, seruan "**HITAMKANFHUI!**" pada 11 Mei 2025, "**32 Tahun Penuh Kebuan Marsinah Tak Kunjung Mendapat Keadilan**" pada 10 Mei 2025, serta "**Pusara Demokrasi: Mengenang Keberanian di Balik Tragedi Trisakti**" pada 12 Mei 2025 hingga mengenang reformasi melalui publikasi " **Reformasi 1998 Puncak Amarah Rakyat Terhadap Kebengisan Negara**" pada 12 Mei 2025.



Selain itu, Kastrat BEM FH UI 2025 juga merilis publikasi sepanjang Bulan September 2025 yang dimulai

dari "**September Hitam: Merawat Memori Memulihkan Asa Menggugat Keadilan**" pada 1 September 2025 serta mengenang seorang Munir melalui publikasi "**21 Tahun Kematian Munir : Negara Tak Pernah Berubah**" pada 7 September 2025. Selain itu, Kastrat BEM FH UI 2025 juga turut menyuarakan gerakan kolektif berupa "**Hitamkan FH UI!**" yang diadakan bersama dengan "**Simulasi Aksi September Hitam: Menolak Lupa Kejahatan Negara" BPMB FH UI 2025 In Collaboration With BEM FH UI 2025**" pada 22 September 2025 yang dilengkapi juga dengan menggandeng mahasiswa baru melalui "**Wawancara Pasca Simulasi Aksi BPMB FH UI x BEM FH UI 2025**" yang dipublikasikan pada 25 September 2025.

Menutup rangkaian September Hitam, Kastrat BEM FH UI 2025 juga merilis publikasi bertajuk "**Menolak Lupa: 26 Tahun Tragedi Semanggi 2**" pada 25 September 2025 dan "**Nestapa Perempuan di Negara Patriarkis: Menilik Pemberangusan Gerakan Perempuan Pasca Gestok**" pada 3 Oktober 2025. Tidak berhenti pada Bulan September, penyikapan terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat juga masih terus dilakukan oleh Kastrat BEM FH UI 2025, salah satunya pada Bulan November melalui publikasi yang berjudul "**27 Tahun Mereka Belum Mendapat Keadilan**" pada 14 November 2025 sebagai salah satu cara merawat memori kolektif dan menuntut adanya keadilan bagi para korban Peristiwa Semanggi I 1998.

PUBLIKASI



Press Release BEM Se-UI: Tindakan Represif Aparat Dalam Aksi #TOLAKRUUTNI



#MEIBERKABUNG Masih Membayang, Bercak Luka yang Tak Kunjung Sembuh



Seruan Aksi Kamisan Ke-859



HITAMKANFHUI!



Diskusi Publik Mei Berkabung 2025 "27 Tahun Reformasi, Apakah Orde Baru Terlahir Kembali?"



Seruan Aksi : Tolak Gelar Pahlawan Soeharto



Tolak Gelar Pahlawan Soeharto



Reformasi Masih Menjadi Angan-Angan Here's Why



Pernyataan Sikap Aliansi BEM Se-UI: Menuntut Pencabutan Status Tersangka 14 Massa Aksi May Day 2025



Jangan Bodohi Kami! Pemerkosaan Mei 1998 Bukan Rumor!



Seruan Aksi Aparat Keparat



September Hitam : Merawat Memori Memulihkan Asa Menggugat Keadilan



HITAMKANFHUI!



Simulasi Aksi "September Hitam: Menolak Lupa Kejahatan Negara" BPMB FH UI 2025 In Collaboration With BEM FH UI 2025

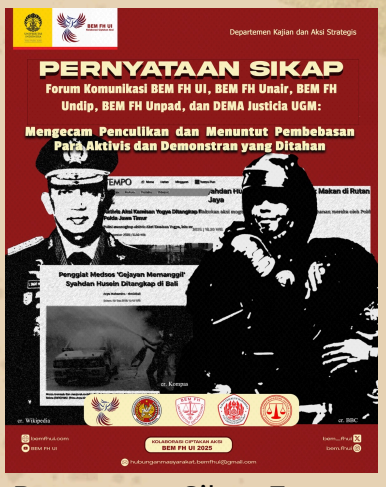

Pernyataan Sikap Forum Komunikasi BEM FH: Mengencam Penculikan Dan Menuntut Pembebasan Para Aktivis Dan Demonstran Yang Ditahan



Nestapa Perempuan di Negara Patriarkis: Menilik Pemberangusan Gerakan Perempuan Pasca Gestok



"Mengecam Putusan Praperadilan Tahanan Politik yang Mencederai Prinsip Negara Hukum yang Demokratis



Simpang Siur Fakta Penemuan Kerangka Farhan dan Reno Ditemukan Tak Bernyawa di Gedung ACC, Benarkah Keduanya Meninggal Karena Kecelakaan?



[32 Tahun Penuh Keabuan Marsinah Tak Kunjung Mendapat Keadilan]



[Pusara Demokrasi: Mengenang Keberanian di Balik Tragedi Trisakti]

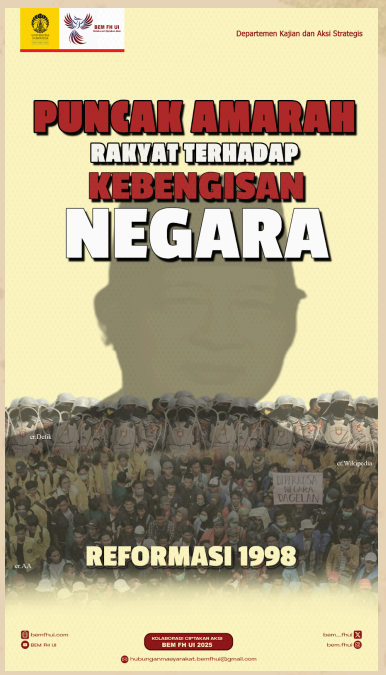

[Reformasi 1998: Puncak Amarah Rakyat terhadap Kebengisan Negara]



[21 Tahun Kematian Munir: Negara Tak Pernah Berubah]



[Wawancara Pasca Simulasi Aksi BPMB FH UI x BEM FH UI 2025]



[Soeharto Bukan Pahlawan]


MAU NGOMONG APA SIH PAK PRESIDEN???
@#$%#$%@!@ %#!$%!@%@!#$ @!%##@!#$#$


MEI BERKABUNG:
MENOLAK LUPA
KEBENGISAN NEGARA

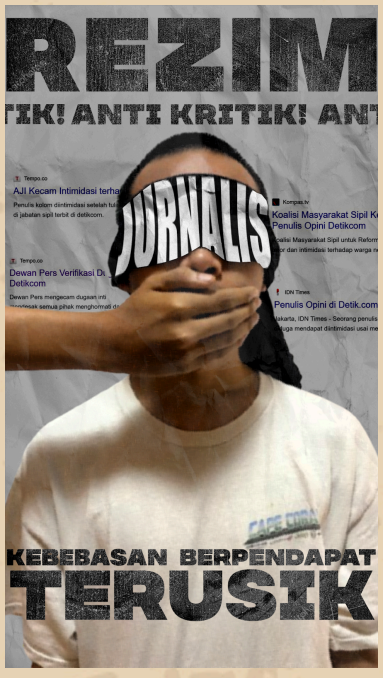
REZIM
TIK! ANTI KRITIK! ANT
JURNALIS
KEBEBASAN BERPENDAPAT
TERUSIK


PEMERKOSAAN MASSAL 98 BUKAN RUMOR!
FADLI ZONK, AKTIVIS
PENGKHIANAT
SEJARAH


TUHAN, TOLONG KAMI.


JANGAN MATIL!
DEADLINE
17+8
HARI INI


#HITAMKANFHUI
#MUNIRADALAHKITA
#HITAMKANFHUI
H-3
UNUHAN MUNIR PEMBUNUHAN MUNIR PEMBUNUHAN M


#HITAMKANFHUI
#HITAMKANFHUI
#HITAMKANFHUI
H-2
RIOK 1984 TRAGEDI TANJUNG PRIOK 1984 TRAGEDI TA

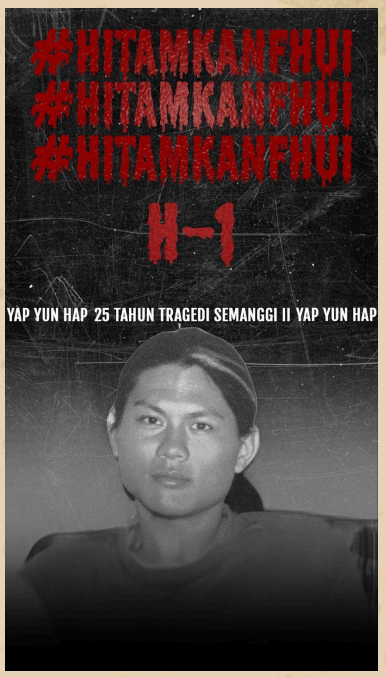
#HITAMKANFHUI
#HITAMKANFHUI
#HITAMKANFHUI
H-1
YAP YUN HAP 25 TAHUN TRAGEDI SEMANGGI II YAP YUN HAP


Could This Man Be Our
NEXT HERO?
Smiling General
Man of the Year

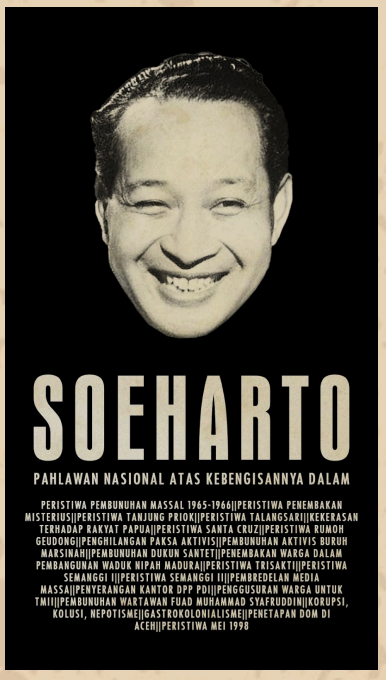
SOEHARTO
PAHLAWAN NASIONAL ATAS KEBENGISANNYA DALAM
PERISTIWA PEMBUNUHAN MASSAL 1965-1966||PERISTIWA PENEMBAKAN MISTERIUS||PERISTIWA TANJUNG PRIOK||PERISTIWA TALANGSARI||KEKERASAN TERHADAP RAKYAT PAPUA||PERISTIWA SANTA CRUZ||PERISTIWA RUMOH GEUDONG||PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS||PEMBUNUHAN AKTIVIS BURUH MARSINAH||PEMBUNUHAN DUKUN SANTET||PENEMBAKAN WARGA DALAM PEMBANGUNAN WADUK NIPAH MADURA||PERISTIWA TRISAKTI||PERISTIWA SEMANGGI I||PERISTIWA SEMANGGI II||PEMBREDELAN MEDIA MASSA||PENYERANGAN KANTOR DPP PDI||PENGGUSURAN WARGA UNTUK TMII||PEMBUNUHAN WARTAWAN FUAD MUHAMMAD SYAFRUDDIN||KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME||GASTROKOLONIALISME||PENETAPAN DOM DI ACEH||PERISTIWA MEI 1998

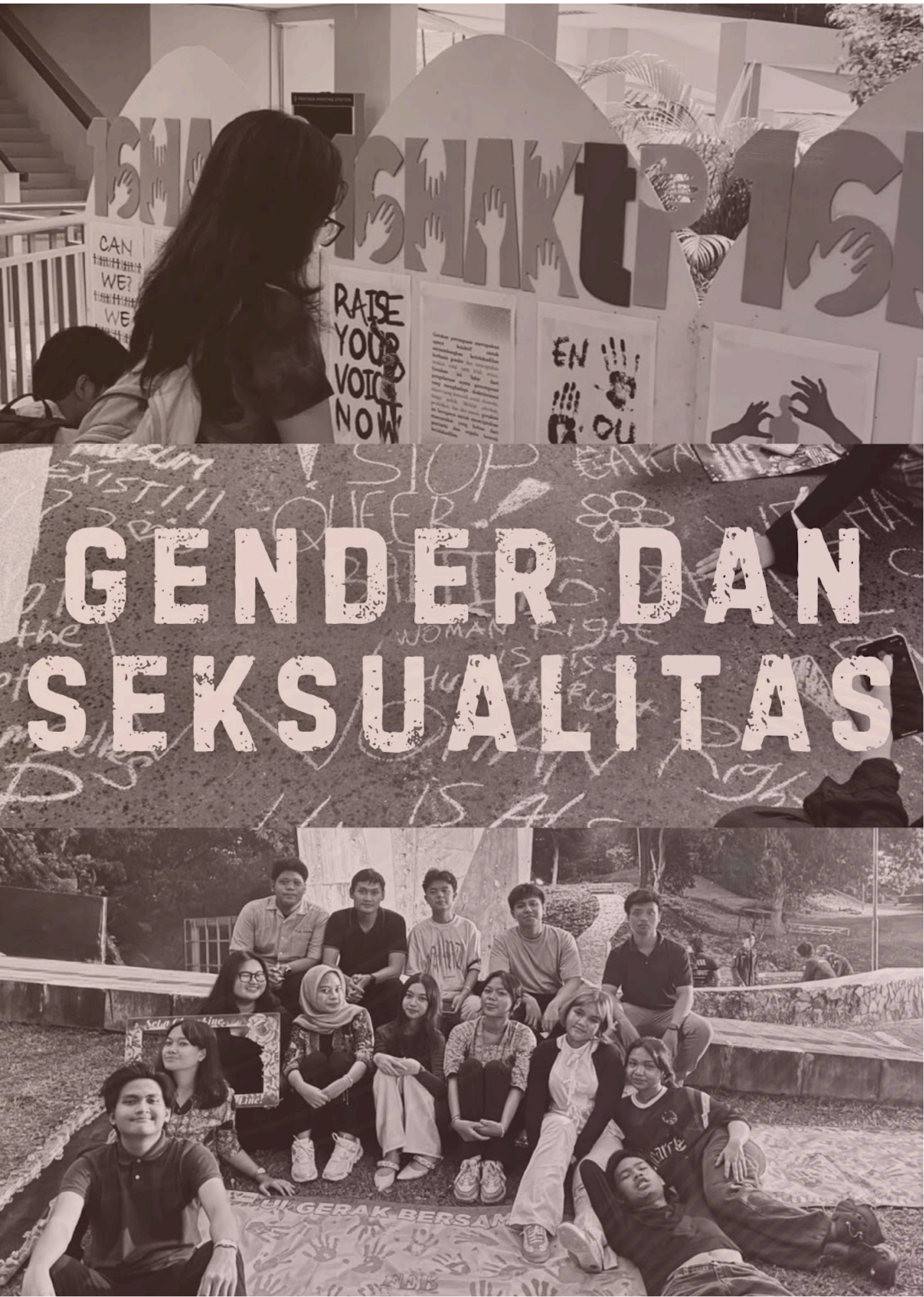

GENDER DAN SEKSUALITAS

GENDER DAN SEKSUALITAS

Kelompok Isu Gender dan Seksualitas merupakan salah satu kelompok isu dalam Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 yang berfokus pada penyikapan, pengawalan, dan pengadvokasian upaya pemajuan dan perlindungan kelompok minoritas gender dan orientasi seksual, termasuk perempuan dan kelompok LGBTQ+. Isu yang dikawal pun tak sebatas pada isu-isu struktural semata, tetapi juga menyasar pada isu-isu kultural seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual, perbedaan seks dan gender, dan ragam gender. Pada tahun 2025, Kelompok Isu Gender dan Seksualitas berfokus pada isu implementasi peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta diskriminasi terhadap minoritas gender dan orientasi seksual dengan melakukan penyikapan-penyikapan terhadap diskriminasi minoritas gender dan orientasi seksual serta pelanggengan budaya patriarki di Indonesia.

MENGUAK BUDAYA PATRIARKIS YANG MASIH MELANGGENG DI INDONESIA

Budaya patriarkis masih menjadi permasalahan yang mengakar di Indonesia. Perempuan sering kali dianggap sebagai objek dari pada subjek dalam tatanan sosial kehidupan bermasyarakat Indonesia. Dalam melawan kultur yang terus melanggeng di Indonesia tersebut, Kastrat BEM FH UI 2025 berpartisipasi dalam **Aksi Massa Hari Perempuan Internasional** pada tanggal 8 Maret 2025 yang menjadi simbol perlawanan terhadap budaya patriarkis yang masih dilanggengkan tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia.



Namun, tidak sampai disitu, kultur patriarkis yang telah mengakar di Indonesia masih terus dilanggengkan, salah satu contohnya ketika Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang kerap dipanggil sebagai “KDM” datang ke salah satu

seminar di UI. Melalui kehadirannya, KDM mengutarakan sebuah pernyataan bahwa “perempuan dapat diukur harganya dari jam berapa ia keluar malam”. Menanggapi pernyataan tersebut, Kastrat BEM FH UI 2025 melakukan penyikapan melalui propaganda lepas dengan tajuk “**KDM Misoginis**” 2 Juni 2025.



MENUNTUT HAK YANG SAMA: MENOLAK DISKRIMINASI BAGI MANUSIA

Sejak Prinsip Yogyakarta dirilis pada tahun 2007, negara di dunia telah memiliki panduan global bagi upaya penghapusan stigma dan diskriminasi bagi kelompok minoritas gender dan orientasi seksual. Namun sayangnya, ibarat keras kepala, Indonesia masih menjadi negara yang amat keras dalam memahami hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Salah satu contohnya terlihat dalam pernyataan sikap yang dilontarkan Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Rakyat Bangkit pada aksi nasional 28 Juli 2025 yang di dalamnya menyerang kelompok minoritas gender dan orientasi seksual yang selama ini termarginalkan. Menanggapi pernyataan tersebut, Kastrat BEM FH UI 2025 bersama dengan Aliansi UI Anti-KS melakukan penyikapan yang berjudul “**Mengencam Keras Tuntutan BEM SI Rakyat Bangkit Yang Mendiskriminasi Kelompok Minoritas Gender dan Orientasi Seksual**” pada 2 Agustus 2025 yang berisikan tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak BEM SI Rakyat Bangkit untuk mencabut poin tuntutan nomor sembilan yang menyatakan “Menolak dengan tegas segala bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku minoritas gender dan orientasi seksual di seluruh sektor kehidupan sosial. Mendesak pemerintah untuk segera merumuskan regulasi dan sanksi hukum yang tegas terhadap tindakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama;
2. Menuntut BEM SI Rakyat Bangkit untuk membangun

ruang dialog yang setara serta tidak melakukan penindasan terhadap kelompok minoritas gender dan orientasi seksual;

3. Mengecam segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas gender dan orietnasi seksual.

Selain dari itu, Kastrat BEM FH UI 2025 juga menyerukan penghentian diskriminasi terhadap minoritas gender dan orientasi seksual, salah satunya melalui publikasi **Stop Diskriminasi Terhadap Minoritas Gender dan Orientasi Gender dan Orientasi Seksual** pada 3 Juli 2025.

PUBLIKASI



Stop Diskriminasi terhadap Minoritas Gender dan Orientasi Seksual



Mengecam Keras Tuntutan BEM SI Rakyat Bangkit yang Mendiskriminasi Kelompok Minoritas Gender dan Orientasi Seksual"



Aksi Massa Hari Perempuan Internasional


PEREMPUAN BUKANLAH BARANG YANG NILAINYA DAPAT DIUKUR LAYAKNYA KOMODITAS.
Meskipun demikian, ketika Dedi Mulyadi berkunjung ke Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), ia menyebut perempuan sebagai "murahan" berdasarkan pakaian yang dikenakan dan waktu kepulangan mereka.
Tata Kelola Pemerintahan
Kang Dedi Mulyadi
MISO GINIS
Hal ini mencerminkan pandangan misoginis dan patriarkis. Ujaran semacam ini merendahkan martabat perempuan dan melanggengkan budaya penghakiman atas tubuh serta identitas perempuan.



PENGGUSURAN PAKSA DAN PENDIDIKAN TINGGI





PENGGUSURAN PAKSA

Kelompok isu Penggusuran Paksa dan Pendidikan Tinggi merupakan kelompok isu yang berfokus dalam menyikapi, mengawal, dan mengadvokasikan isu-isu penggusuran paksa dan isu pendidikan tinggi yang terjadi. Penggusuran paksa sendiri merupakan tindakan pemindahan atau pengusiran individu, keluarga, atau komunitas dari rumah, tanah, atau ruang hidup yang ditempati secara paksa, tanpa persetujuan dan tanpa adanya perlindungan hukum. Praktik penggusuran paksa mencerminkan pengingkaran negara terhadap nilai dasar demokrasi dan supremasi hukum yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Penggusuran paksa kerap dijalankan dengan cara-cara koersif yang tidak menjamin kebebasan, kesetaraan dan kepastian hukum warga negara sehingga penggusuran paksa biasanya dilakukan tanpa melalui mekanisme partisipasi publik, maupun dialog yang bermakna.

KETIKA MASYARAKAT DIUSIR DARI TANAHNYA

Penggusuran paksa merupakan tindakan pemindahan atau pengusiran individu, keluarga, atau komunitas dari rumah, tanah, atau ruang hidup yang ditempati secara paksa, tanpa persetujuan dan tanpa adanya perlindungan hukum. Dalam praktiknya, penggusuran paksa sering kali tidak mengindahkan hak-hak asasi yang dimiliki manusia dan bahkan cenderung dilekatkan dengan tindakan-tindakan represif oleh aparat. Sepanjang tahun 2025, Indonesia tidaklah lepas dari kasus-kasus penggusuran paksa. Salah satunya yang terjadi di Sukahaji, di mana warganya diintimidasi oleh organisasi masyarakat hingga permukimannya dibakar habis. Dalam kondisi tersebut, negara cenderung diam, bahkan dialog yang diadakan KDM dengan Junus Jen Suherman malah cenderung memiliki motif culas nan terselubung untuk merelokasi warga. Menanggapi hal tersebut, Kastrat BEM FH UI 2025 melakukan penyikapan berupa publikasi yang berjudul "**Warga Menjerit dan Terluka: Sengketa Tanah Berujung Kekerasan di Suka Haji**" pada 3 Mei 2025.

JALAN MUDAH KEKUASAAN: PROYEK SERAMPANGAN NASIONAL

Perampasan hak atas tanah masih menjadi permasalahan yang mendasar dan terdistribusi di seluruh wilayah Indonesia. Penyebabnya

adalah tidak lain dan tidak bukan berakar dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat dan hanya menguntungkan oligark semata, salah satunya melalui proyek strategis nasional (PSN). Melalui PSN, pemerintah seolah-olah memberikan lampu hijau bagi penggusuran paksa, selama hal tersebut menguntungkan bagi kekuasaan. Dalam melawan ketidakadilan tersebut, Kastrat BEM FH UI 2025 merangkum berbagai permasalahan terkait PSN bersama dengan DLH BEM FH UI 2025 melalui publikasi bertajuk "**Proyek Serampangan Nasional: Tanah Rakyat Dirampas Negara, Kening Mereka Dipopor Senjata**" pada 4 Agustus 2025. Selain itu, Kastrat BEM FH UI 2025 bersama dengan DLH BEM FH UI 2025 juga melaksanakan audiensi "***Policy Brief* PSN**" kepada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

PENDIDIKAN TINGGI

Sementara itu, pendidikan tinggi mencakup beragam isu yang dihadapi mahasiswa di lingkup perguruan tinggi. Pendidikan tinggi sendiri berakar dari hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan yang setidaknya dapat terlaksana secara progresif. Namun, realitas yang masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan melatarbelakangi sejumlah permasalahan terkait isu pendidikan tinggi. Sepanjang tahun 2025, kelompok isu ini telah menyikapi, mengawal, dan mengadvokasikan isu-isu di antaranya adalah penggusuran paksa di Sukahaji, kematian Akseyna, hingga polemik biaya pendidikan di UI.

11 TAHUN TANPA KEPASTIAN: UI MELANGGENGKAN PEMBUNUHAN

Pada tahun 2015, terjadi pembunuhan terhadap salah satu mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UI bernama Akseyna Ahad Dori. Ia ditemukan tak bernyawa di Danau Kenanga UI oleh salah seorang mahasiswa yang sedang berjalan di pinggir danau. Awalnya, Akseyna diduga melakukan aksi bunuh diri, namun, seiring berjalannya investigasi, polisi akhirnya menetapkan kasus ini sebagai kasus pembunuhan. Akan tetapi, menginjak 10 tahun sejak dibunuhnya Akseyna, hingga kini masih belum terdapat titik terang mengenai oleh siapa dan bagaimana Akseyna dibunuh. Nahasnya, baik pihak Polresta Metro Depok maupun pihak UI tampak tidak memiliki komitmen serius dalam mengusut kasus ini. Sebagai rangka mengenang dan menuntut kejelasan penyelesaian kasus tersebut, Kastrat BEM FH UI berpartisipasi dalam "**Aksi Simbolis: Satu Dekade Akseyna**" pada 25 Maret 2025 yang dilaksanakan di Taman Lingkar Perpustakaan UI.



PENDIDIKAN TINGGI BUKAN HANYA ANGAN, NAMUN HARUS DIWUJUDKAN

Pendidikan merupakan hak yang seharusnya dijamin dan disediakan oleh pemerintah, meskipun melalui *progressive realization*. Melalui prinsip tersebut, seharusnya pendidikan disediakan ke arah yang lebih baik, yakni lebih demokratis, gratis, dan juga ilmiah. Namun, realitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari angan-angan.



Bayang-bayang kenaikan biaya pendidikan selalu menghantui mahasiswa Indonesia setiap tahunnya. Oleh karena itu, Kastrat BEM FH UI 2025 turut serta menyuarakan penolakan terhadap kenaikan biaya pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Indonesia melalui "**Aksi Massa: #INDONESIASEMAKINGELAP**" pada 2 Mei 2025.

Tidak berhenti sampai disitu saja, perubahan besaran biaya pendidikan di UI masih terjadi bagi mahasiswa baru 2025. Dengan diberlakukannya iuran pengembangan institusi (IPI), kondisi tersebut semakin mengecam hak masyarakat Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam pendidikan di UI. Maka dari itu, Kastrat BEM FH UI 2025 merilis publikasi yang berjudul "**Waspada! Kampus Mahal: Pastikan Anda Punya Uang Untuk Membayar IPI**" pada 30 Mei 2025.



Selain itu, Kastrat BEM FH UI 2025 juga mengecam keras sikap abai dari Rektor Universitas Indonesia yang terkesan tidak peduli dan menganggap sepele permasalahan biaya pendidikan tersebut melalui publikasi bertajuk "**Sudah Mahal, Apatis Pula. Selamat Datang di Universitas Indonesia!**" pada 7 Juli 2025 serta melalui "**Pernyataan Sikap Aliansi BEM Se-UI: Tolak IPI Sang Pembunuh Mimpi**" pada 11 Juni 2025 yang menolak SK Rektor UI 683/2025 dan SK Rektor UI 688/2025 yang menetapkan pembebanan IPI bagi mahasiswa baru UI; menuntut UI agar memberikan transparansi mengenai besaran biaya kuliah tunggal; serta mendesak pemerintah dan UI untuk melakukan klarifikasi mengenai sektor-sektor yang terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, Kastrat BEM FH UI 2025 juga mengajukan keberatan administratif kepada Kementerian Pendidikan, Sains, Riset, dan Teknologi pada 30 Juni 2025. Namun sayangnya, keberlakuan IPI tetap terjadi dan masih mengekang mahasiswa baru angkatan 2025.

PENGHINAAN MARTABAT AKADEMIK: GELAR YANG TIDAK SEHARUSNYA DIDAPATKAN BAHLIL

Gelar akademik seharusnya menjadi lambang keilmuan yang didapatkan melalui kerja keras dan dispilin yang tinggi bukannya melalui rangkaian kecurangan dan pelanggaran etik. Namun, hal ini tidaklah sulit bagi seorang Bahlil Lahadalia yang dapat menyelesaikan studinya meskipun telah mendapatkan rekomendasi pembatalan gelar dari Dewan Guru Besar UI. Menanggapi hal tersebut, Kastrat BEM FH UI 2025 merilis propaganda bertajuk "**Rektor Sayang Anak**" pada 9 Maret 2025 yang mana mengkritisi sikap tidak tegas oleh Rektor UI atas pelanggaran akademik yang dilakukan oleh Bahlil.

PUBLIKASI



Aksi Simbolis: Satu Dekade Akseyna



Aksi Massa: #INDONESIASEMAKINGELAP



Warga Menjerit dan Terluka: Sengketa Tanah Berujung Kekerasan di Suka Haji”



Waspada! Kampus Mahal: Pastikan Anda Punya Uang Untuk Membayar IPI



Pernyataan Sikap Aliansi BEM Se-UI: Tolak IPI Sang Pembunuh Mimpi



Sudah Mahal, Apatis Pula. Selamat Datang di Universitas Indonesia!

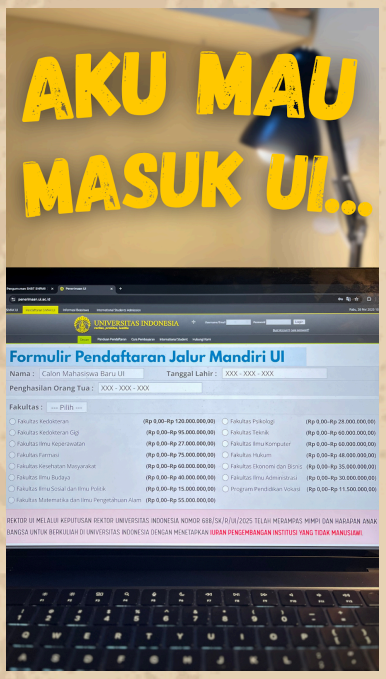
AKU MAU
MASUK UI...
UNIVERSITAS INDONESIA
Formulir Pendaftaran Jalur Mandiri UI
Nama : Calon Mahasiswa Baru UI
Tanggal Lahir : XXX - XXX - XXX
Penghasilan Orang Tua : XXX - XXX - XXX
Fakultas : — Pilih —
Fakultas Kedokteran (Rp 0,00–Rp 120.000.000,00)
Fakultas Kedokteran Gigi (Rp 0,00–Rp 95.000.000,00)
Fakultas Ilmu Keperawatan (Rp 0,00–Rp 27.000.000,00)
Fakultas Farmasi (Rp 0,00–Rp 75.000.000,00)
Fakultas Kesehatan Masyarakat (Rp 0,00–Rp 60.000.000,00)
Fakultas Ilmu Budaya (Rp 0,00–Rp 40.000.000,00)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Rp 0,00–Rp 15.000.000,00)
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Rp 0,00–Rp 55.000.000,00)
Fakultas Psikologi (Rp 0,00–Rp 28.000.000,00)
Fakultas Teknik (Rp 0,00–Rp 60.000.000,00)
Fakultas Ilmu Komputer (Rp 0,00–Rp 60.000.000,00)
Fakultas Hukum (Rp 0,00–Rp 48.000.000,00)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Rp 0,00–Rp 35.000.000,00)
Fakultas Ilmu Administrasi (Rp 0,00–Rp 30.000.000,00)
Program Pendidikan Vokasi (Rp 0,00–Rp 11.500.000,00)
REKTOR UI MELALUI KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 688/SK/R/UI/2025 TELAH MERAMPAS MIMPI DAN HARAPAN ANAK BANGSA UNTUK BERKULIAH DI UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN MENETAPKAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI YANG TIDAK MANUSIAWI.

DISKUSI PUBLIK RKUHAP

Diskusi Publik RKUHAP merupakan program kerja pertama Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 yang menjadi wadah diskusi bagi masyarakat luas untuk membahas mengenai urgensi pembaruan KUHAP di Indonesia. Adanya urgensi pembaruan KUHAP dilatarbelakangi oleh usangnya KUHAP yang berlaku sejak tahun 1981. Masalahnya, sejak 44 tahun disahkan, KUHAP sama sekali tidak mengalami perubahan apapun.



Hal ini pun mengakibatkan KUHAP sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat saat ini. Belum lagi, substansi KUHAP pun sarat akan masalah, mulai dari ketimpangan posisi antara APH dan tersangka/terdakwa, lemahnya pengawasan APH, hingga mudahnya seseorang udah dipersangkakan atau bahkan dipidanakan.



Program kerja ini terdiri dari 2 agenda utama. Pertama, acara ini diawali dengan sesi pemaparan oleh para pembicara yang sekaligus menjadi pemantik diskusi. Kedua, acara kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan maupun tanggapan dari para peserta acara lainnya mengenai KUHAP. Tujuan dari program kerja ini adalah meningkatkan pemahaman sekaligus menuansakan isu mengenai urgensi pembaruan KUHAP di kalangan IKM FH UI, UI, maupun masyarakat luas.

PUBLIKASI



Diskusi Publik Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

DISKUSI PUBLIK RUU MASYARAKAT ADAT

Mengacu pada Pasal 1 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Masyarakat adat memiliki hak atas kenikmatan penuh, sebagai kolektif atau sebagai individu, dari semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagaimana diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan hukum hak asasi manusia internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut serta menandatangani UNDRIP. Oleh karena itu, sudah sepatutnya negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat. Akan tetapi, hingga kini negara kerap kali melanggar kewajiban tersebut. Tak jarang dijumpai perilaku-perilaku aparat negara yang merugikan masyarakat adat., seperti praktik penggusuran paksa, kriminalisasi, hingga perampasan tanah adat. Masyarakat adat pun juga kesulitan dalam memenuhi keperluan administrasi untuk kebutuhan sehari-hari mereka.



Perilaku tersebut salah satunya berakar dari fakta bahwa masyarakat adat nusantara sebagai subjek hukum yang utuh. RUU MA Adat yang dapat menjadi payung hukum guna perlindungan masyarakat adat hingga kini tidak menjadi perhatian pembentuk undang-undang. Alhasil, masyarakat adat kini harus bersandar pada peraturan-peraturan lain yang mengatur masyarakat adat. Masalahnya, peraturan-peraturan tersebut masih bersifat sektoral. Syarat-syarat suatu kelompok dapat disebut masyarakat adat pun berbeda satu sama lain. Situasi ini pun akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum yang akhirnya malah kembali merugikan masyarakat adat.



Menanggapi hal tersebut, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 dan DLH BEM FH UI 2025 berkolaborasi dengan Kaoem Telapak dan Aliansi RUU Masyarakat Adat mengadakan program kerja Diskusi Publik RUU Masyarakat Adat. Program kerja ini berisikan pemaparan materi oleh beberapa pembicara dari latar belakang yang berbeda serta dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta lainnya.



Adapun, tujuan dari program kerja ini adalah memberikan pemahaman dan kesadaran serta meningkatkan semangat diskusi kepada masyarakat luas mengenai urgensi dari pengesahan RUU MA.

DISKUSI PUBLIK RKUHAP

Diskusi Publik RKUHAP merupakan program kerja pertama Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 yang menjadi wadah diskusi bagi masyarakat luas untuk membahas mengenai urgensi pembaruan KUHAP di Indonesia. Adanya urgensi pembaruan KUHAP dilatarbelakangi oleh usangnya KUHAP yang berlaku sejak tahun 1981. Masalahnya, sejak 44 tahun disahkan, KUHAP sama sekali tidak mengalami perubahan apapun.



Hal ini pun mengakibatkan KUHAP sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat saat ini. Belum lagi, substansi KUHAP pun sarat akan masalah, mulai dari ketimpangan posisi antara APH dan tersangka/terdakwa, lemahnya pengawasan APH, hingga mudahnya seseorang udah dipersangkakan atau bahkan dipidanakan.



Program kerja ini terdiri dari 2 agenda utama. Pertama, acara ini diawali dengan sesi pemaparan oleh para pembicara yang sekaligus menjadi pemantik diskusi. Kedua, acara kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan maupun tanggapan dari para peserta acara lainnya mengenai KUHAP. Tujuan dari program kerja ini adalah meningkatkan pemahaman sekaligus menuansakan isu mengenai urgensi pembaruan KUHAP di kalangan IKM FH UI, UI, maupun masyarakat luas.

PUBLIKASI



Diskusi Publik Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

DISKUSI PUBLIK RUU MASYARAKAT ADAT

Mengacu pada Pasal 1 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Masyarakat adat memiliki hak atas kenikmatan penuh, sebagai kolektif atau sebagai individu, dari semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagaimana diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan hukum hak asasi manusia internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut serta menandatangani UNDRIP. Oleh karena itu, sudah sepatutnya negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat. Akan tetapi, hingga kini negara kerap kali melanggar kewajiban tersebut. Tak jarang dijumpai perilaku-perilaku aparat negara yang merugikan masyarakat adat., seperti praktik penggusuran paksa, kriminalisasi, hingga perampasan tanah adat. Masyarakat adat pun juga kesulitan dalam memenuhi keperluan administrasi untuk kebutuhan sehari-hari mereka.



Perilaku tersebut salah satunya berakar dari fakta bahwa masyarakat adat nusantara sebagai subjek hukum yang utuh. RUU MA Adat yang dapat menjadi payung hukum guna perlindungan masyarakat adat hingga kini tidak menjadi perhatian pembentuk undang-undang. Alhasil, masyarakat adat kini harus bersandar pada peraturan-peraturan lain yang mengatur masyarakat adat. Masalahnya, peraturan-peraturan tersebut masih bersifat sektoral. Syarat-syarat suatu kelompok dapat disebut masyarakat adat pun berbeda satu sama lain. Situasi ini pun akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum yang akhirnya malah kembali merugikan masyarakat adat.



Menanggapi hal tersebut, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 dan DLH BEM FH UI 2025 berkolaborasi dengan Kaoem Telapak dan Aliansi RUU Masyarakat Adat mengadakan program kerja Diskusi Publik RUU Masyarakat Adat. Program kerja ini berisikan pemaparan materi oleh beberapa pembicara dari latar belakang yang berbeda serta dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta lainnya.



Adapun, tujuan dari program kerja ini adalah memberikan pemahaman dan kesadaran serta meningkatkan semangat diskusi kepada masyarakat luas mengenai urgensi dari pengesahan RUU MA.

PUBLIKASI





Diskusi Publik Mendukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat



KOMPAS ISU



Tiara Kusuma Wardani
Person in Charge
Kompas Isu



Andi Audry
Person in Charge
Kompas Isu

Pada tahun ini, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 menyelenggarakan program kerja bernama Kompas Isu. Kompas Isu 2025 mengusung tema "Membangun Kesadaran Kolektif Sebagai Langkah Awal Menumpas Penindasan". Kompas Isu bertujuan untuk memperkenalkan isu-isu yang dibawa oleh Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 dan menjaring aspirasi IKM FH UI terkait penyikapan, pengawalan, serta advokasi isu yang telah dan/atau akan dilakukan oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UI 2025.

PENGENALAN ISU

Pengenalan isu dilaksanakan melalui publikasi konten isu yang disusun oleh masing-masing kelompok isu sebagai bentuk pemetaan awal permasalahan yang diangkat. Pengenalan isu ini ditujukan untuk mengenalkan ragam isu yang dikawal serta dibawakan oleh Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 yang nantinya akan disurvei melalui Survei Kompas Isu 2025.

Pada pengenalan isu ini, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 melalui kelompok isu Penggusuran Paksa dan Pendidikan Tinggi memperkenalkan isu seputar independensi kampus yang menolak masuknya militer ke dalam kehidupan kampus. Pengenalan isu ini dilakukan melalui publikasi "**Kompas Isu: Menjaga Independensi Akdemik, Menolak Militerisasi**" pada 26 April 2025. Selanjutnya, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 melalui Kompas Isu Gender dan Seksualitas juga mengenalkan bagaimana diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok

minoritas gender dan orientasi seksual masih dilanggengkan di sekitar kita. Pengenalan isu tersebut tersaji dalam publikasi yang bertajuk "**Kompas Isu: Darurat Normalisasi Mysoginistics Jokes and Homophobic Language dalam Keseharian**" pada 27 April 2025. Selain itu, Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 juga merilis masing-masing publikasi mengenai Rezim Prabowo yang *civil phobics* serta permasalahan dalam revisi KUHAP melalui publikasi "**Kompas Isu: Rezim Prabowo Civil Phobia**" dan "**Kompas Isu 2025: Mengawal Keadilan dalam Revisi KUHAP**" yang dipublikasikan pada 28 April 2025 dan 24 April 2025.

SURVEI KOMPAS ISU 2025

Setelah melalui rangkaian pengenalan isu, maka dilakukanlah penyerapan aspirasi IKM FH UI melalui media *Google Form* dengan sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk menangkap pandangan, keresahan, dan harapan mahasiswa terhadap isu-isu yang diangkat oleh Departemen Kastrat BEM FH UI 2025. Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka didapatlah hasil bahwa mayoritas responden telah mengetahui bentuk penyikapan, pengawalan, dan advokasi Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 yang berupa aksi demonstrasi serta kajian dan masih cukup sedikit yang mengenal bentuk propaganda lepas.Selain itu, hampir sebanyak 90% responden merasa kajian, dan aksi demonstrasi yang dilakukan Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 sudah dilangsungkan dengan cukup baik. Sementara itu, hanya 62% responden yang merasa bahwa audiensi Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 dilakukan dengan cukup baik serta berbagai hasil lainnya yang telah dipublikasikan melalui publikasi "**Hasil Kompas Isu Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UI 2025**" pada 20 juni 2025.

PUBLIKASI

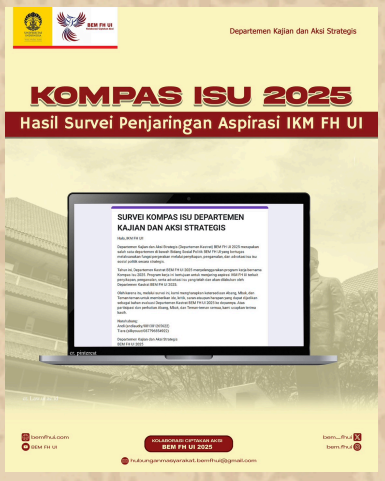

Kompas Isu 2025: Hasil Survei Penjaringan Aspirasi IKM FH UI



Survei Kompas Isu 2025: Membangun Kesadaran Kolektif Sebagai Langkah Awal Menumpas Penindasan



Coming Soon: Kompas Isu 2025



Kompas Isu 2025: Mengawal Keadilan dalam Revisi KUHAP



Kompas Isu 2025: Menjaga Independensi Akademik, Menolak Militerisasi



Kompas Isu 2025: Darurat Normalisasi Mysogynistics Jokes and Homophobic Language Dalam Keseharian

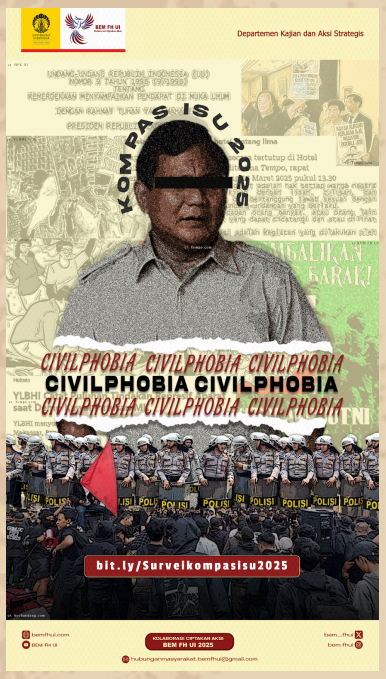

Kompas Isu 2025: Rezim Prabowo Civil Phobia

DISKUSI PUBLIK MEI BERKABUNG



Raihana Sakha
Person in Charge
Diskusi Publik Mei Berkabung



Keira Andita Putri Susianto
Person in Charge
Diskusi Publik Mei Berkabung

Diskusi Publik Mei Berkabung merupakan program kerja Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 yang berbentuk diskusi publik yang menghadirkan beberapa pembicara dari berbagai latar belakang. Diskusi Publik Mei Berkabung membawakan tema “27 Tahun Reformasi: Apakah Orde Baru Terlahir Kembali?”. Tema ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi para peserta diskusi untuk merefleksikan apakah rezim Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Prabowo Subianto merupakan awal mula dari kebangkitan kembali rezim Orde Baru yang kini muncul dengan topeng barunya.



Program kerja ini berisikan beberapa agenda, mulai dari pemaparan sekaligus pemantik dari pembicara hingga sesi tanggapan atau pertanyaan dari para peserta diskusi. Adapun, program kerja ini bertujuan untuk menjadi wadah untuk menampung keresahan akan isu pelanggaran HAM berat serta penyusutan ruang sipil terutama terkait dengan pelaksanaan amanat reformasi dan peran masyarakat yang kian terkikis dalam praktik bernegara kita.



Dengan diselenggarakannya program kerja Diskusi Publik Mei Berkabung 2025, diharapkan mampu menciptakan kesadaran dan menambah pengetahuan mahasiswa UI dan masyarakat secara luas mengenai peristiwa Reformasi 1998, amanatnya, serta realitas saat ini yang jauh dari pelaksanaan amanat tersebut.

PUBLIKASI



Coming Soon: Diskusi Publik Mei Berkabung 2025 "27 Tahun Reformasi, Apakah Orde Baru Terlahir Kembali



Diskusi Publik Mei Berkabung 27 TAHUN Reformasi: Apakah Orde Baru Terlahir Kembali?

SEMINAR BEM FH UI X PERLUDEM



Nylea Putri Qairen
Person in Charge
Diskusi Publik BEM FH UI x Perludem

Seminar BEM FH UI X PERLUDEM merupakan salah satu program kerja yang mengimplementasikan fungsi pergerakan dan pelayanan yang dilakukan oleh BEM FH UI 2025. Progam kerja ini dilatarbelakangi oleh tingginya kekhawatiran mengenai peran demokrasi kelompok minoritas dalam pengambilan kebijakan di Indonesia.



Seminar BEM FH UI X PERLUDEM pada tahun ini mengusung tema “Menjamin Hak Politik Kelompok Minoritas: Kelompok Pemuda, Perempuan, Masyarakat Adat, dan Buruh Migran”.



Program kerja ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran terkait kesertaan kelompok minoritas dalam pemilihan umum (pemilu), menggali perspektif pemenuhan hak politik untuk kelompok minoritas dalam konteks demokrasi Indonesia, serta menjadi evaluasi bagi penyelenggaraan Pemilu 2025 sehingga dapat tercipta pemilu yang lebih inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

PUBLIKASI



Menjamin Hak Politik Kelompok Minoritas: Kelompok Pemuda, Perempuan, Masyarakat Adat, dan Buruh Migran





Telah Berlangsung: Menjamin Hak Politik Kelompok Minoritas: Kelompok Pemuda, Perempuan, Masyarakat Adat, dan Buruh Migran

DENGAR CERITA KORBAN DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT RAKYAT, AKADEMISI DAN PRAKTISI MENGGUGAT RKUHAP 2025





Alexander Farrel Ardan
Person in Charge
Dengar Cerita Korban dan Rapat Dengar Pendapat Rakyat, Akademisi dan Praktisi Menggugat 2025

Maahirah Nabila Khansa
Person in Charge
Dengar Cerita Korban dan Rapat Dengar Pendapat Rakyat, Akademisi dan Praktisi Menggugat 2025

Dengar Cerita Korban dan Rapat Dengar Pendapat Rakyat, Akademisi dan Praktisi Menggugat RKUHAP merupakan salah satu program kerja Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 yang berisi diskusi mengenai persoalan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981 (KUHAP 1981) yang sempati berlaku dan draf RKUHAP yang ketika itu sedang dibahas oleh pembentuk undang-undang. Dengan mengusung tema “Revisi KUHAP untuk Siapa?”, program kerja ini diharapkan dapat mengajak peserta acara untuk merefleksikan, sebenarnya apa tujuan dan latar belakang dari substansi RKUHAP 2025. Program kerja ini pun terdiri dari 2 agenda yang berbeda, yakni Dengar Cerita Korban yang menjadi wadah bagi korban bercerita dan Rapat Dengar Pendapat Rakyat yang menjadi tempat bagi akademisi dan praktisi menanggapi cerita korban.

RAPAT DENGAR CERITA KORBAN

Melalui Rapat Dengar Cerita Korban, Kastrat BEM FH UI 2025 bersama dengan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Revisi KUHAP ingin mengumpulkan seluruh korban dari bobroknya sistem peradilan pidana Indonesia.

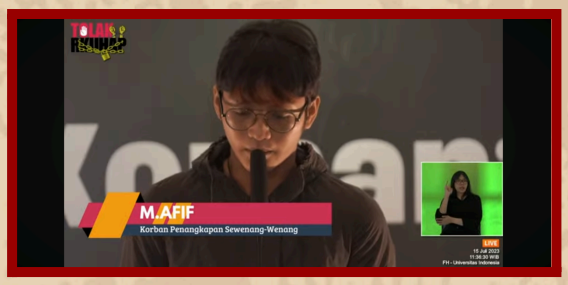

Melalui cerita korban, harapannya Revisi KUHAP yang dicanangkan, dapat benar-benar berpihak kepada HAM dan demokrasi yang substantif, bukan hanya sekadar hukum formil untuk menjalankan hukum KUHP Nasional belaka. Melalui Rapat Dengar Cerita Korban, korban memiliki kesempatan untuk mengutarakan berbagai permasalahan yang mereka hadapi ketika mereka berhadapan dengan sistem peradilan pidana Indonesia.



FORUM AHLI PEMBAHASAN RKUHAP

Forum Ahli Pembahasan RKUHAP merupakan sebuah forum sebagai tindak lanjut dari adanya Rapat Dengar Cerita Korban.



Melalui Forum Ahli ini, permasalahan yang dialami korban ditindaklanjuti melalui diskusi yang komprehensif demi menjawab permasalahan yang dialami korban serta merumuskan langkah kebijakan yang seharusnya diterapkan untuk keberlakuan KUHAP sebagai peta navigasi sistem peradilan pidana Indonesia.



PUBLIKASI



Coming Soon! Rapat Dengar Cerita Korban: Revisi KUHAP Untuk Siapa?



H-1 Dengarkan Cerita Korban: Revisi KUHAP Untuk Siapa

UI GERAK BERSAMA 2025



Keira Andita Putri Susianto
Project Officer
UI Gerak Bersama 2025



Fahrana Az Zahra
Vice Project Officer
UI Gerak Bersama 2025



Alexander Farrel Ardan
Bendahara
UI Gerak Bersama 2025



Fariq Alfi Sambudi
Sekretaris
UI Gerak Bersama 2025



Dani Nuraini Oceana
PJ Materi dan Acara
UI Gerak Bersama 2025



Lionel Marnosan Alamson
PJ HPDD
UI Gerak Bersama 2025



Shan Alif Ramadhan
PJ Akomodasi
UI Gerak Bersama 2025

UI Gerak Bersama 2025 merupakan salah satu program kerja Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 yang berupa sosialisasi *peer-to-peer* mengenai pengetahuan dasar kekerasan seksual serta alur pelaporan kekerasan seksual di lingkup kampus Universitas Indonesia (UI). Program kerja ini dilatarbelakangi oleh

keresahan atas maraknya kekerasan seksual di UI yang sangat disayangkan mengingat sudah jelasnya regulasi yang mengamanatkan penanganan kekerasan seksual di lingkup UI seperti Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Indonesia (PR UI 91/2022) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkup Perguruan Tinggi (Permendikbudriset 55/2024).Pada kepengurusan tahun ini, UI Gerak Bersama 2025 mengangkat tema "*The Fine Line of Consent*" dengan harapan dapat mengurai area abu-abu kekerasan seksual sehingga warga UI dapat memahami batas-batas yang jelas dalam relasi seksual.

UI GERAK BERSAMA *IN COLLABORATION WITH* Pengenalan Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas dan Display Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Rangkaian UI Gerak Bersama 2025 dimulai dengan kolaborasi antara UI Gerak Bersama dengan Pengenalan Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas dan Display Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Melalui kolaborasi ini, UI Gerak Bersama ingin memasifkan sosialisasi seputar kekerasan seksual kepada mahasiswa baru, tentunya melalui platform utama yakni di dalam rangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru. Pelaksanaan agenda ini dilakukan melalui pendirian *stand* bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI) dan *HopeHelps* UI serta melakukan sosialisasi dengan mengitari area Balairung UI.



Selain itu, agenda ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan interaktif dan edukatif melalui metode *games* yakni "*Green Flag or Red Flag*" menggunakan *platform Spin The Wheel*. Selain itu, agenda ini juga dilengkapi dengan pengumpulan donasi bagi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta

yang akan disalurkan melalui *Grand Closing* UI Gerak Bersama 2025.



Roadshow* UI GERAK BERSAMA 2025: *Roadshow "Say No to Ambiguity, Embrace the Clarity"

Setelah melalui rangkaian pembuka UI Gerak Bersama 2025, kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan *roadshow* secara luring dengan mendatangi dan mendirikan *stand* di fakultas-fakultas yang ada di UI. *Roadshow* dilakukan dengan membagi panitia UI Gerak Bersama 2025 ke dalam beberapa kelompok dengan pembagian utama untuk kelompok yang berada di *stand* akan menayangkan video seputar materi kekerasan seksual dan menyediakan *handbook* mengenai hal serupa.



Selain itu, melalui pendirian *stand*, UI Gerak Bersama 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan yang interaktif seperti kegiatan "cap tangan" sebagai simbolisasi mewujudkan ruang aman di UI dan *standing mirror* untuk berswafoto untuk menyemarakkan gerakan mewujudkan ruang aman di lingkungan UI.



***Open Donation in Collaboration* with Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)**

Dalam rangkaian terakhir program kerja UI Gerak Bersama 2025, UI Gerak Bersama menghadirkan *grand closing* dengan berkolaborasi bersama LBH APIK dalam bentuk penyaluran donasi. Donasi yang disalurkan diberikan secara luring secara langsung kepada LBH APIK dengan harapan melalui donasi tersebut dapat membantu pemberian bantuan bagi korban-korban kekerasan seksual, sehingga kedepannya dapat benar-benar mewujudkan ruang aman dari kekerasan seksual bukan hanya di UI, tetapi juga di Indonesia.



SEMINAR NASIONAL BEM FH UI 2025



Alexander Farrel Ardan
Project Officer
Seminar Nasional BEM FH UI 2025



Maahirah Nabila Khansa
Vice Project Officer
Seminar Nasional BEM FH UI 2025



Rifdah Zulhanzahira
PJ Materi dan Acara
Seminar Nasional BEM FH UI 2025



Tiara Kusuma Wardani
PJ HPDD I
Seminar Nasional BEM FH UI 2025



Lionel Marnosan Alamson
PJ HPDD II
Seminar Nasional BEM FH UI 2025



Andi Audry
PJ Akomodasi
Seminar Nasional BEM FH UI 2025

Seminar Nasional BEM FH UI 2025 adalah salah satu program kerja Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 dalam bentuk ruang diskusi multiperspektif dengan menghadirkan berbagai pembicara dari berbagai latar belakang berbeda untuk membahas mengenai arah perbaikan di tubuh Polri sesuai dengan amanat konstitusi. Seminar Nasional BEM FH UI 2025 mengusung tema “Reformasi Polri: Urai Problematika Sekarang, Reformasi Polri Segera”. Melalui tema tersebut, SEMINAR NASIONAL BEM FH UI 2025 diharapkan dapat membentuk kesadaran masyarakat tentang Polri yang dicita-citakan, realitas Polri saat ini, dan cara-cara yang disarankan dalam perbaikan di tubuh Polri.

PENUANSAAN SEMINAR NASIONAL

Penuansaan Seminar Nasional BEM FH UI 2025 dilakukan dalam beragam bentuk, namun pembagian mendasar dilaksanakan berdasarkan propaganda darat dan propaganda

udara. Propaganda darat dimaksudkan sebagai propaganda yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung bentuknya oleh audiens. Propaganda darat sendiri dilaksanakan dalam beberapa bentuk seperti penuansaan di lingkungan Barel, pemasangan spanduk di Kantin FH UI, hingga penaruhan manekin di lingkungan S&T FH UI. Propaganda darat ini dilakukan guna meningkatkan animo IKM FH UI dan warga sekitar UI terkait kebobrokan institusi Polri saat ini. Selain itu, Seminar Nasional BEM FH UI 2025 juga melaksanakan berbagai propaganda udara dengan memaksimalkan platform Instagram.



Penuansaan dilakukan dengan beragam publikasi yang memaksimalkan fitur Instagram mulai dari *feeds, story,* dan juga *Add Yours*. Penuansaan melalui propaganda udara ini ditujukan untuk memasifkan acara Seminar Nasional BEM FH UI 2025 serta memasifkan isu-isu terkait reformasi Polri kepada masyarakat luas.



SEMINAR NASIONAL BEM FH UI 2025

Seminar Nasional BEM FH UI 2025 diadakan karena dewasa ini keberadaan Polri menjadi sorotan dan mulai dipertanyakan profesionalitasnya. Hal ini tidak lain terjadi karena buruknya pengelolaan sumber daya manusia, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi, mulai dari proses pendidikan, pengisian jabatan, hingga perilaku Polri yang represif alih-alih humanis. Dengan adanya keresahan ini, Seminar Nasional BEM FH UI 2025 mengundang pakar-pakar serta *stakeholders* terkait untuk

memberikan pandangan terkait permasalahan institusi Polri.



Selain itu, seminar ini juga menjadi sarana bagi Departemen Kastrat BEM FH UI 2025 untuk menyampaikan hasil kajian terkait permasalahan Polri dalam bentuk “Policy Brief Rekomendasi Reformasi Struktural, Kultural, dan Instrumental Polri” serta “DIM RUU Polri” sebagai media kajian yang telah disikapi dan dikawal oleh Departemen Kastrat BEM FH UI selama ini.



PUBLIKASI



Coming Soon: Seminar Nasional BEM FH UI 2025



H-1 Seminar Nasional BEM FH UI 2025

16 HARI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BEM FH UI 2025



Lidwina Maureen
Project Officer
16 HAKtP BEM FH UI 2025



Lionel Marnosan Alamson
Vice Project Officer
16 HAKtP BEM FH UI 2025



Fahrana Az Zahra
PJ Materi dan Acara
16 HAKtP BEM FH UI 2025



Andi Audry
PJ HPDD
16 HAKtP BEM FH UI 2025



Nayla Putri Kinasih
PJ Akomodasi
16 HAKtP BEM FH UI 2025

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKtP) merupakan bentuk dari kampanye yang digagas oleh United Nation Women (UN Women) sejak 1991. Berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember,. 16 HAKtP hadir untuk membangun kesadaran masyarakat dan mendorong aksi nyata melawan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang didasari oleh sistem patriarki yang terjadi pada ranah domestik, publik, maupun digital. Pada tahun 2025, 16 HAKtP BEM FH UI 2025 kembali hadir dengan mengangkat tema "*Awakening Awareness Through Equality, Releasing the Grasp of Patriarchy*". Tema ini merupakan hasil refleksi mengenai esensi dari sebuah kampanye dalam membangun kesadaran publik melalui kesetaraan. Melalui 16 HAKtP BEM FH UI 2025 masyarakat diharapkan dapat mengerti mengenai dampak-dampak buruk kekerasan berbasis gender yang disebabkan oleh sistem patriarki. 16 HAKtP BEM FH UI 2025 terdiri dari tiga rangkaian, yaitu Pameran Seni, Mimbar Bebas x Kamisan, dan Karaoke Night yang semuanya ditujukan untuk mengampanyekan dan

menuansakan isu-isu budaya patriarkis sert memperjuangkan hak bagi kelompok minoritas gender dan orientasi seksual.

PAMERAN SENI 16 HAKtP

Rangkaian kegiatan 16 HAKtP dimulai dengan pameran seni yang dilaksanakan di Taman S&T FH UI. Kegiatan ini ditujukan sebagai kampanye dan pembumian isu-isu 16 HAKtP terutama terkait gerakan feminisme di dunia serta sebagai gerakan penolakan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas gender dan orientasi seksual.



MIMBAR BEBAS X KAMISAN

Rangkaian acara 16 HAKtP selanjutnya berlangsung dengan acara mimbar bebas yang berkolaborasi dengan Aksi Kamisan. Acara ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi IKM FH UI untuk menyalurkan aspirasi dan keresahannya terkait budaya patriarki serta diskriminasi orientasi gender dan orientasi seksual. Selain itu, kolaborasi bersama Aksi Kamisan diharapkan dapat memberikan dampak serta penuansaan isu yang lebih masif secara nasional, sehingga penyikapan isu patriarki serta diskriminasi minoritas gender dan orientasi seksual dapat menyentuh khalayak yg lebih luas.



KARAOKE NIGHT

Terakhir, *Karaoke Night* merupakan acara puncak 16 HAKtP BEM FH UI 2025 yang dilakukan secara kolaboratif bersama dengan Fakultas Ilmu Budaya Anti-Kekerasan seksual dan beberapa aliansi lainnya.



Tujuan dari acara *Karaoke Night* adalah untuk meningkatkan semangat dari peserta untuk mengambil peran aktif dalam advokasi isu-isu perempuan dan minoritas gender serta orientasi seksual melalui cara yang inovatif dan inklusif.

KASTRAT BERSAMA ALIANSI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP merupakan koalisi yang beranggotakan berbagai organisasi dari berbagai latar belakang, mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media independen, pusat penelitian, hingga organisasi mahasiswa. Koalisi ini berfokus pada penyikapan mengenai revisi KUHAP yang telah dicanangkan sejak 2012.



Koalisi ini aktif mengadakan berbagai kegiatan, seperti konsolidasi, siaran pers, aksi massa maupun simbolik, kajian bersama, audiensi, hingga acara. Pada tahun 2025, koalisi ini telah menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti rapat dengar pendapat bersama DPR RI, aksi tolak RKUHAP pada Juli 2025, aksi tolak RKUHAP pada November? 2025, dan menyelenggarakan acara Dengar Cerita Korban KUHAP, serta Rapat Dengar Pendapat Rakyat mengenai pembahasan KUHAP yang kala itu tengah dilaksanakan DPR dan pemerintah.



Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi

Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi merupakan aliansi yang baru dibentuk pada tahun 2025 dan beranggotakan berbagai organisasi dari berbagai latar belakang, seperti LSM, media independen, organisasi massa, serta organisasi mahasiswa. Fokus dari aliansi ini adalah menyikapi isu-isu kriminalisasi terhadap warga negara serta perjuangan advokasi korban kriminalisasi oleh negara. Aliansi ini aktif menyelenggarakan konferensi pers hingga aksi-aksi solidaritas para korban kriminalisasi, seperti aksi solidaritas rutin di kantor Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, hingga aksi solidaritas ketika persidangan para korban kriminalisasi, seperti Delpedro Marhaen, Khariq Anhar, Syahdan Husein, Muzaffar Salim, dan Laras Faizati.

Aliansi Perempuan Indonesia

Aliansi Perempuan Indonesia merupakan aliansi yang beranggotakan berbagai macam organisasi dari berbagai latar belakang, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media independen, hingga organisasi mahasiswa. Aliansi ini berfokus pada penyikapan isu-isu diskriminasi terhadap minoritas gender & orientasi seksual, seperti isu penghapusan sejarah perempuan di buku sejarah Indonesia, kriminalisasi Laras Faizati, dan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Meski demikian, Aliansi Perempuan Indonesia juga kerap aktif menyuarakan dan menyikapi isu-isu nasional maupun internasional lainnya, seperti *May Day*, KUHAP, Rangkaian Demonstrasi Agustus 2025, hingga Agresi Amerika Serikat terhadap Venezuela.

Forum Komunikasi BEM FH UI, BEM FH Unair, BEM FH Undip, BEM FH Unpad, DEMA Justicia UGM

Forum ini merupakan wadah komunikasi dan koordinasi bagi beberapa BEM Fakultas Hukum mulai dari BEM FH UI, BEM FH Unair, BEM FH Undip, BEM FH Unpad, serta Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Forum ini berfokus pada membuka ruang kolaborasi antar anggota forum serta penyikapan bersama terhadap isu-isu hukum nasional. Pada tahun 2025, forum ini telah melakukan Pernyataan Sikap Mengecam Penangkapan Demonstran di Rangkaian Aksi pada Agustus 2025 serta forum ini turut terlibat aktif dalam Rapat Dengar Cerita Korban dan Forum Ahli Revisi KUHAP.



Aliansi Kesehatan Mental dalam Kampus

Aliansi Kesehatan Mental dalam Kampus ini merupakan aliansi internal yang diikuti oleh BEM Psikologi UI, BEM FH UI, BEM Vokasi UI, BEM FK UI, BEM FF UI, dan BEM FMIPA UI. Aliansi ini berfokus dalam mengawal isu-isu terkait kesehatan mental yang terjadi di lingkungan kampus serta berfokus dalam meningkatkan *awareness* warga UI terkait pentingnya kesehatan mental itu sendiri.

Aliansi UI Anti-Kekerasan Seksual

Aliansi UI Anti Kekerasan Seksual merupakan aliansi internal

yang diikuti oleh BEM FH UI, BEM UI, BEM Psikologi UI, BEM FIB UI, BEM FF UI, Fisip UI, BEM FMIPA UI, BEM Fasilkom UI, dan BEM FIA UI. Aliansi ini berfokus pada mengawal isu implementasi regulasi PPKS di lingkungan kampus UI serta mengawal isu terkait kultur kekerasan seksual di UI dan Indonesia .Selama tahun 2025, aliansi ini turut serta dalam menyikapi dan mengawal berbagai problematika terkait kekerasan seksual terutama dalam bentuk propaganda. Aliansi ini telah melakukan penyikapan dalam mengkritik Pernyataan Sikap yang dilontarkan BEM SI Rakyat Bangkit yang mendegradasi martabat kelompok minoritas gender dan orientasi seksual.

Menjadi Bagian dari Kastrat

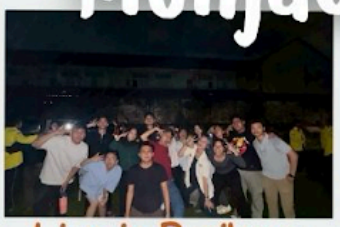

Live in Barikara



Simulasi Aksi!







First Meet!







Kastrat di Kantas!



XOXO









Departemen

LINGKUNGAN HIDUP

















Departemen

LINGKUNGAN HIDUP











MENGENAL LEBIH DEKAT
DEPARTEMEN LINGKUNGAN HIDUP BEM FH UI 2025

Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 merupakan salah satu departemen di bawah bidang sosial politik yang bertugas untuk menyikapi, mengawal, dan mengadvokasikan isu-isu lingkungan hidup secara strategis dan partisipatif. Selain itu, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 juga bertugas untuk melakukan edukasi mengenai isu-isu lingkungan hidup kepada anggota IKM FH UI serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi anggota IKM FH UI terhadap isu lingkungan hidup. Dalam menjalankan fungsinya, Departemen Lingkungan Hidup berpegang pada prinsip keadilan antargenerasi dan intragenerasi, prinsip kehati-hatian, serta asas perlindungan lingkungan yang menjadi acuan utama dalam melakukan advokasi isu lingkungan hidup yang diusung oleh Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025. Dalam menjalankan kepengurusannya, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 dikepalai oleh satu orang Kepala Departemen, yakni Muhammad Nasywan Azizullah dan dua orang Wakil Kepala Departemen, yaitu Marvella Fiorenza Barfiandana serta Julia Jasmine Sekarwangi yang dibagi menjadi dua subdepartemen, yaitu subdepartemen kajian serta subdepartemen aksi dan propaganda. Selain itu, Badan Pengurus Harian Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 juga dibantu oleh 12 orang staf dalam menjalankan fungsi-fungsi pergerakan dan pengabdian di Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025. Dalam menjalankan fungsi pengadvokasian isu-isu lingkungan hidup, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 membagi alokasi staf ke dalam tiga subisu, yaitu

1. Subisu Energi dan Iklim;
2. Subisu Sumber Daya Alam dan Agraria; serta
3. Subisu Perlindungan Hukum dan Urban.

Selain itu, dalam rangka menjalankan fungsi pencerdasan kepada masyarakat, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 menjalankan 14 program kerja dalam satu tahun kepengurusannya, yaitu:

1. Bumi Bercerita;
2. Diskusi Publik Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat;
3. Perayaan Hari Besar Lingkungan (Hari Keanekaragaman Hayati, Hari Udara Bersih, Hari Energi, Hari Pangan, dan Hari Pohon);

4. Podcast Mimbar Merdeka III;
5. FH UI Environmental Project 2025;
6. Center for Sustainability and Waste Management Universitas Indonesia (CSWM UI);
7. Peluncuran Eksaminasi Putusan #DESAKMANDIRI;
8. Diskusi Publik Draw The Line (DTL);
9. SKIP FH UI 2025; dan
10. Kilas Pergerakan dan Pengabdian.

Perlindungan

HUKUM

(Jaminan Hak atas Lingkungan Hidup dan Hak Akses)









DAN

(Permasalahan Perkotaan)

Urban

TIGA PILAR KEHIDUPAN DLH
Perlindungan Hukum dan Urban

Subisu Perlindungan Hukum dan Urban merupakan salah satu kelompok isu Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 yang berfokus untuk mengawal, menyikapi, dan mengadvokasikan beberapa isu utama yang mencakup isu-isu lingkungan hidup dalam lingkup perkotaan serta hak-hak prosedural yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Cakupan isu-isu tersebut meliputi perlindungan hak dalam mengakses udara bersih, persampahan, tata ruang kita, serta penjaminan pemenuhan hak akses terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan.

a. Jaminan Hak atas Lingkungan Hidup dan Hak Akses

Pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya, salah satunya dengan memastikan penjaminan pemenuhan hak akses terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan. Akses informasi memberikan hak bagi masyarakat untuk memperoleh data yang utuh dan akurat, akses partisipasi menjamin keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, sedangkan akses keadilan memungkinkan masyarakat untuk memaksakan hak akses informasi dan partisipasinya.

Untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat yang memperjuangkan hal tersebut, Pasal 66 UU PPLH mengatur ketentuan anti *eco*-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi dan pembungkaman melalui jalur hukum terhadap pejuang lingkungan, beserta peraturan internal pada Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kendati demikian, anti-SLAPP atau anti-*eco*-SLAPP seharusnya dipahami sebagai prosedur perlindungan yang tidak terbatas pada ruang persidangan sehingga praktik-praktik keji ini idealnya harus dapat dicegah sejak tahap paling awalnya.

Terlebih lagi, instrumen hukum ini rupanya belum bisa menjamin implementasinya yang kuat sehingga belum cukup memberikan perlindungan yang efektif bagi pejuang lingkungan hidup. Oleh sebab itu, perjuangan dalam mempertahankan lingkungan hidup justru sering menjadi bumerang.

Fenomena ini dirasakan oleh berbagai kalangan, salah satu yang kerap diperkarakan adalah masyarakat adat sebab hampir nihilnya dasar perlindungan bagi mereka.

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2009, tetapi hingga kini, negara belum juga menghadirkan payung hukum yang memadai dalam konteks pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Lima belas tahun menunggu tanpa adanya kejelasan dari pihak pemerintah mencerminkan lemahnya komitmen politik negara dalam memenuhi hak-hak masyarakat adat dan mandat konstitusi sesuai yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Menyikapi kondisi tersebut, pada April 2025, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 mengunggah dua infografis bertajuk "Kenalan Yuk, Bersama Masyarakat Adat!" pada 9 April 2025 dan "15 Tahun Menunggu Belum Juga Disahkan!" pada 10 April 2025 dalam rangka penuansaan Diskusi Publik Mendukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat "Bentuk Pengakuan, Keadilan, dan Penghormatan Hak bagi Masyarakat Adat" yang diselenggarakan bersama Kaoem Telapak dan Koalisi Kawal RUU MA pada Selasa, 22 April 2025. Diskusi publik ini menjadi ruang dialog kritis antara mahasiswa, masyarakat sipil, dan publik secara umum untuk menagih tanggung jawab negara dalam memastikan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat adat melalui dorongan pengesahan RUU MA.

Ketiadaan payung hukum bagi masyarakat adat ini menyebabkan masyarakat adat, seperti Bapak Sorbatua Siallagan (seorang ketua adat) kerap dikriminalisasi akibat sebatas memperjuangkan tanah mereka. Karena bersikeras menolak masuk dan beroperasinya PT Toba Pulp Lestari di wilayah adatnya, Bapak Sorbatua Siallagan dipidana atas perusakan dan pembakaran dari aktivitas pengelolaan wilayah adat yang secara turun-temurun dilakukan oleh komunitasnya. Setelah dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tinggi Medan, perkara ini justru diajukan oleh PT TPL ke tingkat kasasi. Menyikapi hal tersebut, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyerukan Aksi Solidaritas Masyarakat Adat: Bapak Sorbatua Siallagan pada Rabu, 26 Februari 2025 dan Aksi Keadilan Sorbatua Siallagan pada Jumat, 9 Mei 2025 sebagai bentuk solidaritas dan perlawanan terhadap kriminalisasi yang ditujukan kepada Bapak

Sorbatua Siallagan. Kedua aksi ini merupakan bentuk seruan kolektif untuk menuntut keadilan dan penghentian penggunaan hukum pidana sebagai alat pembungkaman terhadap masyarakat adat.

Terlebih lagi, Bapak Sorbatua Siallagan dalam memperjuangkan tanah dan lingkungan wilayah adatnya diakui sebagai pembela HAM yang justru dihadapkan pada ancaman yang menempatkan mereka sebagai pelaku kejahatan. Menyikapi hal tersebut, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 mengunggah infografis bertajuk "Pembela HAM Memangnya Boleh Dikriminalisasi?" pada 19 Mei 2025 sebagai bentuk advokasi publik serta kritik terhadap praktik kriminalisasi pejuang HAM yang terus berulang di Indonesia. Unggahan infografis ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas untuk mengawal perjuangan para pembela HAM agar tidak terus dibungkam melalui intimidasi dan kriminalisasi.

Melanjutkan perkara Bapak Sorbatua Siallagan pada tingkat kasasi, pada Kamis, 23 Mei 2025, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 telah menyampaikan *amicus curiae brief* berjudul "Untukmu yang Tertindas Di Tanah Nenek Moyang" kepada MA sebagai wujud solidaritas dan advokasi untuk memberikan perspektif akan pentingnya hak asasi manusia, keadilan ekologis, dan perlindungan masyarakat adat dalam memeriksa perkara tersebut. Selain itu, unggahan infografis bertajuk "Suara Lantang Menolak Kriminalisasi terhadap Sorbatua Siallagan" yang dilakukan oleh Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 merupakan upaya membangun kesadaran publik terhadap perjuangan masyarakat adat.

Pada 13 Juni 2025, MA kembali membebaskan Bapak Sorbatua Siallagan dengan menolak permohonan kasasi PT TPL. Meskipun secara hukum Sorbatua Siallagan bebas dari semua tuduhan, aksi PT TPL masih terus berlanjut. Sekitar sepekan setelah putusan bebas, pihak PT TPL kembali masuk ke wilayah adat Dolok Parmonangan dan melakukan penanaman pohon eukaliptus tanpa adanya persetujuan pihak masyarakat adat setempat serta merusak tanaman produktif. Masyarakat adat Dolok Parmonangan mengecam tindakan TPL sebagai bentuk intimidasi dan provokasi karena dapat berpotensi membuka ruang kriminalisasi kembali kepada para masyarakat adat.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi pulp dan pengembangan hutan tanaman industri, PT TPL menguasai wilayah

lahan konsesi hutan yang cukup besar di Sumatera Utara termasuk daerah sekitar Danau Toba. Menyikapi hal tersebut, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 menyerukan Aksi Doa Bersama Merawat Lingkungan Hidup pada Senin, 18 Agustus 2025 sebagai bentuk solidaritas terhadap perlawanan praktik perusakan lingkungan dan penindasan terhadap hak-hak masyarakat adat oleh PT TPL.

Kriminalisasi kembali menjadi masalah yang menunjukkan kurang efektifnya peran negara dalam implementasi anti-*eco*-SLAPP. Tidak hanya itu, dasar anti-*eco*-SLAPP masih ditandingi dengan ketentuan yang membuka celah untuk kriminalisasi penolak aktivitas tambang, seperti Pasal 162 UU Minerba yang justru digunakan untuk menjerat masyarakat yang melawan, seperti warga Maba Sangaji. Pada 16 Mei 2025, sebanyak sebelas warga Maba Sangaji ditangkap karena menolak aktivitas tambang nikel milik PT Position di Halmahera Timur. Masyarakat yang mempertahankan tanah dan lingkungan hidup justru dihadapkan pada tuduhan membawa senjata tajam tanpa izin, merintangi kegiatan pertambangan yang berizin, serta dugaan pemerasan dan pengancaman. Dari balik jeruji besi, warga Maba Sangaji menuliskan surat-surat sebagai penolakan tindakan kriminalisasi dan perlawanan terhadap hak-hak mereka yang seharusnya dipenuhi. Sehubungan dengan hal tersebut, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 mengunggah infografis bertajuk "Surat di Balik Jeruji Besi: Jerit Perlawanan Warga Maba Sangaji" pada 23 Juni 2025 sebagai ajakan kepada masyarakat secara luas untuk bersolidaritas dan mengawal perjuangan warga Maba Sangaji.

Putusan pidana terhadap sebelas warga Maba Sangaji kembali menegaskan peran hukum yang malah digunakan sebagai alat kriminalisasi. Pada 16 Oktober 2025, pengadilan menjatuhkan hukuman kurungan selama 5 bulan 8 hari dengan dalih "mengganggu kegiatan pertambangan". Padahal, tindakan yang dilakukan warga Maba Sangaji merupakan usaha mempertahankan hutan dan tanah adat yang diubah secara sepihak menjadi lahan tambang. PT Position tetap kembali beroperasi meskipun adanya kekerasan yang dialami para warga selama penahanan dan tidak ada persetujuan penggunaan lahan masyarakat adat. Menyikapi putusan ini, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 mengunggah infografis bertajuk "Berjuang Ditahan yang Merusak Dibiarkan!" pada 24

Oktober 2025 yang memandang bahwa perkara Warga Maba Sangaji adalah kasus nyata cerminan kegagalan peran negara dalam melindungi pembela lingkungan dan masyarakat adat.

Nyatanya, pembungkaman terhadap pejuang lingkungan tidak terbatas pada kriminalisasi, tetapi juga kerap hadir dalam bentuk *eco*-SLAPP lainnya, seperti gugatan. Bambang Hero dan Basuki Wasis menyampaikan pendapat mereka dalam kapasitasnya sebagai ahli lalu dibungkam oleh gugatan PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) atas dasar menimbulkan kerugian terhadap perusahaan. Untuk ini, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 mengirimkan *amicus curiae brief* yang ditujukan untuk perkara nomor 212/Pdt.G/2025/PN Cbi kepada Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 September 2025 dengan harapan majelis hakim akan memutus adil.

Melihat makin maraknya kasus kriminalisasi dan *eco*-SLAPP yang ditujukan terhadap para pejuang lingkungan, mulai dari tokoh masyarakat adat hingga akademisi, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 mengunggah infografis bertajuk "Everything Everywhere All at Risk: Kilas Balik Kriminalisasi Pejuang Lingkungan" pada 28 Juli 2025 untuk menyoroti hal tersebut. Banyaknya fenomena SLAPP bagi para pejuang lingkungan hidup ini menunjukkan bahwa penegakan keadilan dalam rangka memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak kebebasan berpendapat di Indonesia belum terpenuhi.

Melihat celah-celah hukum yang dimanfaatkan, begitu nyata bahwa perlindungannya belum menyeluruh, salah satunya karena belum dicakupnya wewenang kepolisian. Untuk menanggapi hal tersebut serta mendorong sistem perlindungan yang lebih holistik, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 merilis kajian yang berjudul "Meneguhkan Perlindungan Hukum bagi Pejuang Lingkungan: Tinjauan *Eco*-SLAPP dan Urgensi Penegakan Hukum Anti-*Eco*-SLAPP di Indonesia" dengan harapan negara dapat memperkuat peran dan tanggung jawabnya dalam melindungi para pejuang lingkungan hidup yang membela hak mereka.

Selain kriminalisasi, Indonesia masih memiliki masalah dalam perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan akses informasi. Pada 10 Maret 2025, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, telah menandatangani Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025

tentang Pengawasan Fungsional Terhadap Orang Asing (Perpol 3/2025). Alih-alih memberikan perlindungan yang proporsional, kebijakan ini justru menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi jurnalis, peneliti, dan penulis asing yang bekerja di Indonesia. Meskipun pihak Polisi Republik Indonesia (Polri) menyatakan bahwa pengaturan tersebut bersifat opsional, pada faktanya substansi dari perpol tersebut berpotensi mempersempit ruang kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi terutama dalam isu-isu sensitif seperti lingkungan hidup, tata kelola perkotaan, dan kebijakan publik. Menyikapi kondisi tersebut, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 mengunggah infografis bertajuk "Jurnalis dan Peneliti Asing, Harap Izin Sebelum Mencium Bau Sampah Kota!" pada 4 Mei 2025 sebagai bentuk kritik atas kecenderungan negara dalam mengontrol narasi dan membatasi akses informasi, khususnya terkait persoalan lingkungan.

Masih dalam perjuangan mempertahankan hak atas lingkungan hidup, pada 22 Mei 2025, Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Warga Dairi mengundang masyarakat untuk melaksanakan aksi damai di depan PTUN dan Kantor KLH/BPLH Jakarta yang menuntut pelaksanaan putusan MA No. 277 K/TUN/LH/2024. Putusan ini membatalkan kelayakan lingkungan hidup yang dimiliki PT DPM atas pembangunan bendungan yang menampung limbah tailing dalam jumlah besar. Menyikapi semangat tersebut, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 mengunggah infografis bertajuk "15 Tahun Berjuang Hak atas Lingkungan Hidup Dairi Masih Terus Terancam" pada 22 Mei 2025 untuk mengawal pelaksanaan Putusan MA No. 277 K/TUN/LH/2024. Pada tanggal 24 Mei 2025, KLH/BPLH telah mencabut kelayakan lingkungan hidup PT DPM. Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 turut merilis propaganda lepas untuk memasifkan pencabutan izin PT DPM dan kemenangan bagi Warga Dairi.

Selain Dairi, pada pertengahan tahun 2025, masyarakat Pulau Pari dengan pendampingan LBH Jakarta juga mengajukan gugatan terhadap PT CPS yang melakukan reklamasi tanpa sesuai dengan izin PKKPRL. Gugatan yang diajukan ke PTUN menuntut pencabutan atas izin tersebut. Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 mengunggah infografis berjudul "Perlawanan Terhadap PKKPRL dan Reklamasi Pulau Pari: Ruang Hidup Dirampas, Warga Menggugat" pada 5 November 2025 untuk mengawal jalannya proses

gugatan Warga Pulau Pari menuntut keadilan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup mereka yang dirampas oleh PT CPS demi kemajuan pariwisata. Sayangnya, pada tanggal 28 November 2025 Majelis Hakim PTUN Jakarta menolak seluruh gugatan Warga Pulau Pari dengan mengabaikan dampak lingkungan.

b. Permasalahan Perkotaan

Pernyataan kontroversial oleh I Wayan Koster mengenai penutupan TPA Suwung menunjukkan adanya kecenderungan pelimpahan beban tanggung jawab pengelolaan lingkungan sepenuhnya kepada individu, padahal negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menyediakan infrastruktur dan tata kelola limbah yang mumpuni demi menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk menanggapi hal ini, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 mengajak publik untuk menyoroti pernyataan I Wayan Koster melalui fitur Add Yours. Dengan ini, diharapkan dapat tercipta tekanan publik agar pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan yang sewenang-wenang.

Di lingkungan kampus, sampah juga menjadi masalah yang belum terselesaikan. Makin mendesaknya permasalahan sampah plastik yang mencemari ekosistem dan sulitnya manajemen limbah di lingkungan kampus melatarbelakangi kolaborasi Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 dengan CSWM UI dalam menginisiasi program Dropbox Botol Plastik. Tingkat daur ulang sampah plastik di Indonesia yang masih relatif rendah menunjukkan bahwa edukasi pemilahan sampah dan infrastruktur pengelolaan sampah yang aksesibel masih diperlukan. Untuk menanggapi hal ini, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 dan CSWM UI menghadirkan sarana untuk mengumpulkan botol plastik sebagai langkah konkret untuk minmalisasi residu sampah yang berakhir di TPA. Dengan ini, warga FH UI diharapkan dapat berkontribusi langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong terciptanya tata kelola sampah yang lebih terintegrasi dan bertanggung jawab di lingkungan universitas.

Selain sampah, kualitas udara di perkotaan juga menjadi masalah yang diangkat. Mengingat kondisi udara Indonesia yang kian memprihatinkan dan memberikan dampak langsung pada kesehatan masyarakat dan ekosistem, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 merilis rangkaian unggahan Peringatan Hari Udara Bersih Internasional pada 10 September 2025. Unggahan ini

mengingatkan masyarakat bahwa hak atas udara bersih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Namun, pada kenyataannya, polusi udara masih menjadi ancaman yang belum dapat ditangani dengan efektif. Polusi yang melanda berbagai wilayah perkotaan di Indonesia menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengendalian emisi dan penegakan hukum bagi sektor-sektor penyumbang polutan terbesar. Unggahan ini disusun dengan menelaah efektivitas regulasi udara bersih saat ini dan menuntut tanggung jawab negara dalam menjamin standar kualitas udara yang layak. Publikasi ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran kolektif serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih progresif untuk mewujudkan lingkungan yang sehat.



Kenalan Yuk, Bersama Masyarakat Adat!



15 Tahun Menunggu Belum Juga Disahkan!



Diskusi Publik Mendukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat “Bentuk Pengakuan, Keadilan, dan Penghormatan Hak bagi Masyarakat Adat



Seruan Aksi Mengawal



Pembela HAM Memangnya

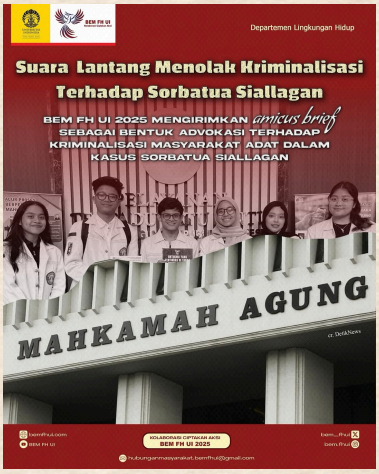

Suara Lantang Menolak

Keadilan untuk Sorbatua

Boleh Dikriminalisasi?

Kriminalisasi Terhadap Sorbatua Siallagan



Seruan Aksi Doa Bersama Merawat Lingkungan Hidup



Surat di Balik Jeruji Besi: Jerit Perlawanan Warga Maba Sangaji



Berjuang Ditahan, yang Merusak Dibiarkan!

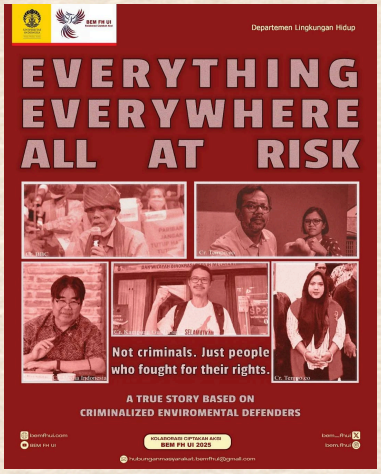

Everything Everywhere All at Risk: Kilas Balik Kriminalisasi Pejuang Lingkungan



Jurnalis dan Peneliti Asing, Harap Izin Sebelum Mencium Bau Sampah Kota!



15 Tahun Berjuang Hak atas Lingkungan Hidup Dairi Masih Terus Terancam



Perlawanan Terhadap PKKPRL dan Reklamasi Pulau Pari: Ruang Hidup Dirampas, Warga Menggugat



Ada yang Baru *Nih*, di FH UI "*Dropbox*?"



Open Booth Pengenalan *Dropbox*



Meneguhkan Perlindungan Hukum bagi Pejuang Lingkungan: Tinjauan *Eco*-SLAPP dan Urgensi Penegakan Hukum Anti-*Eco*-SLAPP di Indonesia

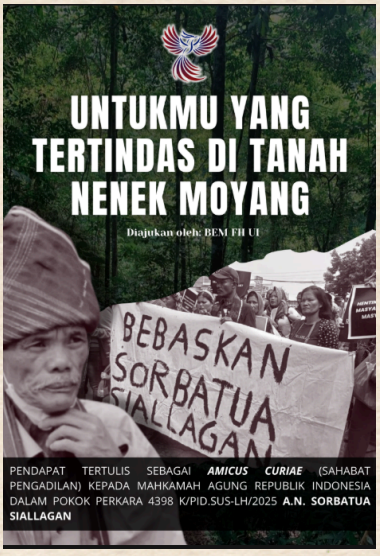

Amicus Curiae Sorbatua Siallagan



Amicus Curiae Basuki Wasis & Bambang Hero



Peringatan Hari Udara Bersih Sedunia: 2 Tahun Berlalu, Kami Masih Menunggu!

Energi

(Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan)







(Transisi Energi Berkeadilan)

DAN



Iklim

Energi dan Iklim

Subisu Energi dan Iklim merupakan salah satu kelompok isu Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 yang berfokus untuk mengawal, menyikapi, dan mengadvokasikan yang mencakup isu-isu mengenai transisi energi berkeadilan serta rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan. Cakupan isu-isu tersebut meliputi PLTU Batubara, COP30 serta komitmen Pemerintah Indonesia menuju *net zero emission*.

a. Transisi Energi Berkeadilan

Dalam upaya menurunkan emisi karbon, Pemerintah Indonesia kini sedang mendorong transisi energi dari sumber energi yang tidak terbarukan menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kendati demikian, pemerintah justru tidak jarang menerbitkan kebijakan yang tampak mundur dari kata "transisi" dengan terus menciptakan celah bagi pelanggengan PLTU batu bara, sekadar berpindah ke perkembangan teknologi terbaru atau energi baru, serta meletakkan faktor sosial sebagai prioritas belakangan.

Kebijakan yang cenderung mempertahankan PLTU baru bara ini kemudian berlanjut dengan diterbitkannya regulasi baru di awal 2025. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri (permen) ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan. Terlampau jauh dari ekspektasi masyarakat, permen ini seakan tidak memahami urgensi transisi energi sebab justru menjadi langkah mundur bagi pemensiunan dini PLTU batu bara dengan menawarkan pemensiunan sebagai tindakan kondisional sehingga terus bergantung pada kondisi-kondisi yang tidak dapat ditentukan. Menyikapi hal ini, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 mengunggah infografis bertajuk "Energi dalam Genggaman Bahlil: Solusi atau Konflik Kepentingan?" pada 5 Mei 2025 untuk mengkritisi bahwa permen tersebut tidak sejalan dengan semangat transisi energi berkeadilan karena mengaburkan komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi.

Selanjutnya pada Mei 2025, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 kembali menyoroti lemahnya komitmen pemerintah dalam menjalankan transisi energi melalui unggahan infografis bertajuk "PLTU Babelan: Ini *mah* Pemerintahnya yang Bebal!" pada 30 Mei 2025. Infografis ini mengangkat persoalan pencemaran udara dan air

yang ditimbulkan oleh PLTU Babelan milik PT Cikarang Listrindo di Bekasi yang telah menyebabkan gangguan kesehatan dan beban ekonomi bagi masyarakat sekitar. Keberlanjutan operasional PLTU Babelan menunjukkan abainya pemerintah dalam memprioritaskan pemensiunan PLTU batu bara *captive* dalam strategi kebijakan transisi energi sektor ketenagalistrikan serta memperlambat langkah menuju transisi energi berkeadilan.

Menjelang pelaksanaan Conference of the Parties 30 (COP30), aliansi masyarakat sipil menggerakkan tajuk baru, yakni "*Draw the line*!" dengan harapan bahwa pemerintah akhirnya akan menetapkan batas dari segala solusi palsu dan mulai bertekad dalam melaksanakan transisi energi. Aliansi yang berisikan NGO seperti Enter Nusantara dan Climate Rangers melaksanakan aksi untuk menyuarakan hal ini. Menyikapi semangat tersebut, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 mengadakan Diskusi Publik Draw The Line "Menuju Net Zero Emission 2060: Menilik Komitmen Indonesia dalam COP30" sebagai upaya untuk menyoroti langkah yang seharusnya Indonesia ambil Indonesia pada COP30. Masih dengan semangat yang sama, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 juga ikut serta dalam pawai Koalisi Indonesia Bebas Emisi 2025 sebagai simbol konsolidasi gerakan masyarakat sipil untuk menuntut transisi energi bersih yang berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan industri fosil.

Mendekati penyelenggaraan COP30, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 juga mengunggah infografis bertajuk "Desak Pemerintah: Menuntut Komitmen COP30" pada 7 November 2025 untuk menggambarkan kontradiksi antara citra Indonesia sebagai negara berkomitmen dalam forum global dan realitas kebijakan nasional yang justru melemahkan agenda transisi energi. Pemerintah bahkan terlambat menyerahkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan belum memiliki instrumen hukum yang memberikan kepastian terhadap pelaksanaan komitmen transisi energi. Saat berjalannya COP30, Indonesia hadir seperti tidak memahami tujuan dari konferensi dengan mengikutsertakan sejumlah *fossil fuel lobbyists* sehingga diberikan penghargaan ironis Fossil of the Day oleh Climate Action Network (CAN) International. Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 turut merilis propaganda lepas yang

disajikan dalam bentuk gambar yang diposting di media sosial BEM FH UI dan dikembangkan secara mandiri serta kreatif untuk memasifkan sindiran atas minimnya kemajuan pemerintah dalam memitigasi krisis iklim.

Tidak hanya pada COP30, permasalahan transisi energi juga tercermin dalam konferensi internasional lainnya. Konferensi Tingkat Tinggi Konferensi Tingkat Tinggi Asia Zero Emission Community (AZEC) yang digelar di Kuala Lumpur juga menuai kritik tajam karena hanya melahirkan solusi palsu atas nama transisi energi. Sebagai tanggapan atas hal tersebut, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 mengunggah infografis bertajuk "Asia Menuju Zero Emission: Komitmen dengan Solusi Palsu" pada 5 November 2025. Melalui infografis ini, disoroti bahwa forum AZEC hanya menjadi alat legitimasi negara untuk mempertahankan ketergantungan pada energi fosil dan menampilkan citra seolah-olah telah berkontribusi terhadap upaya dekarbonisasi.

Sejalan dengan kritik terhadap fenomena solusi palsu tersebut, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 juga merilis kajian berjudul "Energi Hijau, Hutan Hilang: Transisi Energi Palsu di Balik Co-Firing". Kajian ini mengungkapkan bahwa kebijakan *co-firing* biomassa pada PLTU batu bara bukanlah solusi, melainkan bentuk *greenwashing* yang melanggengkan ketergantungan pada batu bara serta mengkhianati prinsip transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mempermudah pencernaan isu tersebut, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 juga mengunggah *reels* bertajuk "Membongkar Kepalsuan *Co-firing* sebagai Solusi Lingkungan: Hutan menjadi Tumbal Transisi Energi" pada 21 Oktober 2025.

b. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan

Lama menetap dalam Prolegnas, Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) tak kunjung disahkan hingga akhir tahun 2025. RUU EBET masih melibatkan sumber energi baru, seperti nuklir, hidrogen, serta produk-produk batu bara sebagai sumber energi baru pada Pasal 9 ayat (1). Turunan batu bara ini, gas metana batu bara, batu bara tercairkan, dan batu bara tergaskan, sebagai energi baru justru tidak menghemat jumlah emisi yang dikeluarkan. Obsesi terhadap batu bara ini menjadi masalah besar karena penggunaan energi baru yang berkontribusi emisi tinggi ini dapat

dikategorikan sebagai upaya pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT). “Upaya” ini justru menjauhkan Indonesia dari transisi energi dan penggunaan energi terbarukan yang sesungguhnya



Energi dalam Genggaman Bahlil: Solusi atau Konflik Kepentingan?



PLTU Babelan: Ini *mah* Pemerintahnya yang Bebal!



Menuju Net Zero Emission 2060: Menilik Komitmen Indonesia dalam COP30



Desak Pemerintah: Menuntut Komitmen COP30



Asia Menuju Zero Emission: Komitmen dengan Solusi Palsu

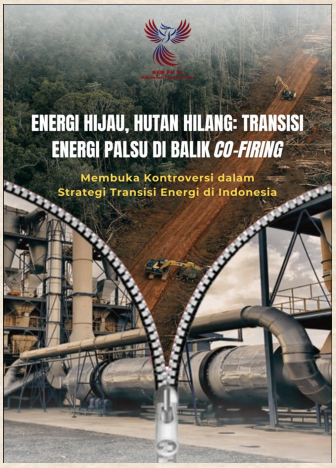

Energi Hijau, Hutan Hilang: Transisi Energi Palsu di Balik Co-Firing

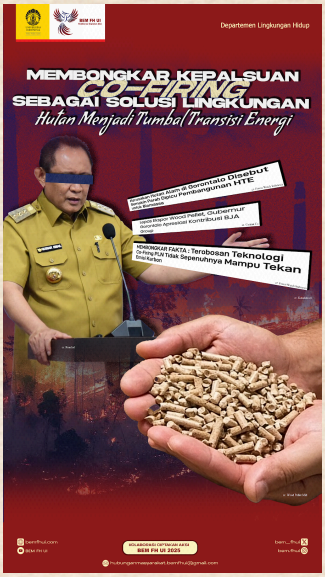

Membongkar Kepalsuan *Co-firing* sebagai Solusi Lingkungan: Hutan menjadi Tumbal Transisi Energi

Sumber Daya

ALAM

(Deforestasi dan FOLU Net Sink)

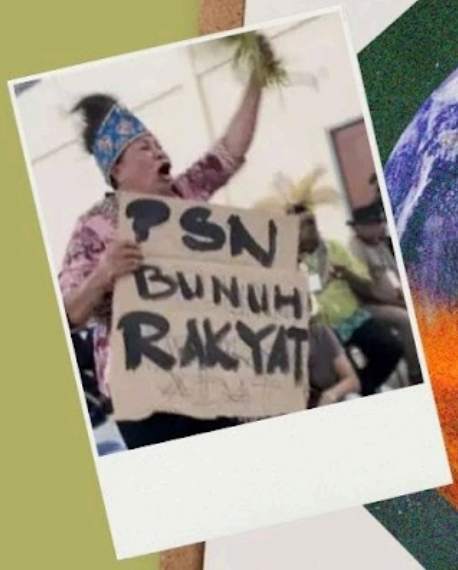

(Proyek Strategis Nasional)



(Kedaulatan Pangan)



(Konflik Pertambangan dan SDA)

DAN

Agraria

Sumber Daya Alam dan Agraria

Subisu Perlindungan Sumber Daya Alam dan Agraria merupakan salah satu kelompok isu Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 yang berfokus untuk mengawal, menyikapi, dan mengadvokasikan beberapa isu utama yang mencakup isu-isu Proyek Strategis Nasional, Deforestasi dan *Forestry and Other Land Use* Net Sink, Konflik Pertambangan Sumber Daya Alam, dan Kedaulatan Pangan. Cakupan isu-isu tersebut meliputi pembangunan PSN yang serampangan dan berakibat pada kerusakan lingkungan, komitmen pemerintah dalam mengurangi angka deforestasi, solusi palsu dari pemerintah berupa co-firing, konflik-konflik yang terjadi di area pertambangan, serta mendorong program diversifikasi pangan.

a. **Proyek Strategis Nasional**

Proyek Strategis Nasional (PSN) dikonstruksikan sebagai proyek yang mengamini keberlanjutan ekologis dan keadilan antargenerasi, tetapi praktik pelaksanaannya justru menunjukkan hal sebaliknya. Sering kali proyek PSN kini justru lebih menguntungkan korporasi sehingga disebut sebagai proyek pelat merah karena menyediakan *fast track* atau *red carpet* administrasi bagi korporasi yang memiliki koneksi kuat dengan pemerintah. Sementara, manfaat bagi masyarakat sekitar sangat minim dan tidak sebanding dengan kerugian sosial-ekologis yang mereka tanggung. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional menjadi celah dalam perizinan pemanfaatan ruang dan pembukaan lahan bagi proyek PSN sehingga memperbesar risiko konflik agraria seperti deforestasi, pencemaran, dan hilangnya ruang hidup masyarakat lokal maupun adat. Menanggapi hal tersebut, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI membuat pendapat tertulis berbentuk *amicus curiae* kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 bertajuk "Nafsu Oligarki di Balik Selimut Kepentingan Umum: Segera Batalkan Proyek Strategis Nasional!".

PSN digadang-gadang menjadi jalan keluar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan penduduk. Dalam kondisi demikian, klaim pembangunan untuk “mensejahterakan rakyat” menjadi kontradiktif karena PSN justru merepresentasikan pembangunan yang mengorbankan ekologi dan ruang hidup masyarakat, seperti yang terjadi di PSN Rempang Eco-City. Guna menyikapi hal tersebut, Departemen Lingkungan Hidup BEM

FH UI telah melangsungkan Audiensi Policy Brief PSN pada tanggal 4 Agustus 2025 bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan pembangunan Kewilayahan bertajuk "Proyek Serampangan Nasional: Lingkungan Dirusak, Masyarakat Terdesak" sebagai bentuk kontribusi dalam mengawali keadilan sosial dan lingkungan yang seringkali terabaikan.

Perluasan PSN sejak awal diproyeksikan mencapai sekitar 20,6 juta hektare. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator bahwa negara secara sadar menyiapkan kerangka kebijakan yang mengizinkan perombakan struktur ekologis dan agraris dalam skala luas. Papua menjadi salah satu wilayah yang dikorbankan melalui rencana pembukaan lahan hingga 633.000 hektare, yakni Proyek Etanol 10 (E10). Menanggapi hal tersebut, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI menyuarakan kritik melalui infografis bertajuk "Ramah Lingkungan atau Perampasan Lahan? Klaim Palsu Proyek Bioetanol Papua!" pada 3 November 2025 sebagai bentuk penyikapan bahwa narasi energi hijau tidak boleh dijadikan pembenaran bagi perampasan lahan dan perusakan lingkungan atas nama PSN.

b. Deforestasi dan *Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink*

Berdasarkan laporan "Jalur Indonesia Menuju Net Zero 2060", sektor penyumbang emisi terbesar (55%) di Indonesia adalah sektor *agriculture*, *forestry*, and *other land use* (AFOLU), dengan kebakaran gambut sebesar 44% dari seluruh emisi AFOLU. Padahal, Indonesia memiliki target FOLU Net Sink 2030—aksi mitigasi penurunan emisi dari sektor kehutanan dengan kondisi tingkat serapan melebihi tingkat emisi—dengan proyeksi kontribusi sektor FOLU sebesar 60% terhadap total target penurunan emisi. Realisasi di lapangan masih jauh dari target yang ditetapkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru karena dinilai memvaluasi semata hutan tanpa mempertimbangkan kehidupan di dalamnya, seperti masyarakat yang mengelolanya. Laju deforestasi di Indonesia masih tinggi akibat ekspansi industri ekstraktif, khususnya perkebunan sawit, pertambangan, proyek skala besar, kebakaran hutan dan gambut menunjukkan adanya kontradiksi antara target penurunan emisi dan arah pembangunan nasional. Kebakaran lahan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, melainkan juga akibat praktik pembukaan lahan yang terus

berlangsung dan dilegitimasi oleh lemahnya pengawasan serta penegakan hukum. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan emisi gas rumah kaca, tetapi juga menghilangkan fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan dan habitat keanekaragaman hayati.

Menyoroti persoalan khusus mengenai deforestasi dan lemahnya perlindungan sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) dalam kebijakan iklim nasional. Menyikapi hal ini, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 merilis infografis "Ramah Lingkungan" atau Perampasan Lahan? Klaim Palsu Proyek Bioetanol Papua pada 3 November 2025, untuk menegaskan bahwa proyek bioenergi yang dipromosikan sebagai solusi rendah emisi justru berpotensi mempercepat laju deforestasi dan degradasi hutan. Narasi bioetanol tersebut dinilai mengabaikan fakta bahwa pembukaan lahan skala besar untuk tanaman energi akan berdampak langsung pada hilangnya tutupan hutan, peningkatan emisi dari perubahan tata guna lahan, serta pengabaian hak masyarakat adat yang selama ini berperan penting dalam menjaga hutan.

Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 juga mengunggah reels Membongkar Kepalsuan Co-Firing Sebagai Solusi Lingkungan: Hutan menjadi Tumbal Transisi Energi pada 21 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pohon. Dalam unggahan tersebut, disoroti bahwa meningkatnya kebutuhan biomassa untuk memenuhi skema co-firing berpotensi mendorong eksploitasi hutan, baik melalui penebangan hutan alam maupun konversi hutan menjadi hutan tanaman energi. Praktik ini mengancam keberlanjutan ekosistem hutan, menghilangkan fungsi ekologisnya sebagai penyerap karbon, serta berpotensi menggagalkan target FOLU Net Sink 2030, yang menempatkan sektor kehutanan sebagai kontributor utama penurunan emisi nasional.

Melalui beberapa unggahan tersebut, sebagai bentuk pendalaman isu, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 merilis kajian berjudul “Energi Hijau, Hutan Hilang: Transisi Energi Palsu di Balik Co-Firing” yang secara khusus menyoroti peran Hutan Tanaman Energi (HTE) dalam skema co-firing biomassa. Kajian ini mengungkap bahwa pengembangan HTE untuk memenuhi kebutuhan biomassa PLTU berpotensi mendorong konversi hutan alam dan lahan masyarakat, sehingga mempercepat deforestasi dan degradasi ekosistem. Alih-alih menjadi solusi rendah emisi, HTE justru

berisiko melemahkan capaian sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) sebagai penyerap emisi, karena perubahan tata guna lahan yang masif menghasilkan emisi baru dan menghilangkan fungsi ekologis hutan.

c. Konflik Pertambangan Sumber Daya Alam

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan mineral dan energi yang melimpah, mulai dari batu bara, nikel, emas, tembaga, hingga mineral strategis lainnya yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Dalam konteks pembangunan, pertambangan dipandang sebagai instrumen penting untuk mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara menempatkan sektor pertambangan sebagai salah satu sektor strategis yang krusial. Di balik maraknya kegiatan pertambangan di Indonesia, kegiatan pertambangan juga menimbulkan sejumlah dampak negatif yang serius seperti deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta penurunan kualitas ekosistem laut dan daratan telah terdokumentasi di berbagai wilayah tambang. Selain itu, konflik agraria antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal atau adat sering terjadi karena tumpang tindih izin konsesi, perampasan lahan, dan minimnya pengakuan atas hak atas tanah masyarakat adat.

Menyoroti permasalahan pertambangan ini, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 merilis infografis Berapa Harga Nikelmu? Ketika Nasib Alam Berada di Genggaman Ekskavator pada 11 Juni 2025 yang membahas mengenai maraknya kerusakan yang disebabkan oleh pertambangan nikel. Mulai dari Sulawesi sampai Raja Ampat, berbagai wilayah telah mengalami dampak negatif yang dibawakan pertambangan nikel, yaitu kerusakan lingkungan seperti pencemaran, hilangnya tanah tempat tinggal, timbulnya penyakit akut, dan lain sebagainya. Unggahan ini juga mengkritik mengenai sikap presiden yang justru mengabaikan perlindungan dan penghormatan kepada lingkungan serta masyarakat lokal demi investasi jangka pendek pertambangan.

Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 pun menyikapi mengenai permasalahan ini melalui unggahan propaganda lepas yang diunggah pada Instagram Story akun BEM FH UI mengenai isu pertambangan nikel di Raja Ampat yang sempat memanas pada pertengahan tahun 2025 silam. Lebih lanjut, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 pun menyoroti

mengenai maraknya kegiatan eksploitasi pertambangan yang destruktif di wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia melalui propaganda lepas pada tanggal 8 Juni 2025. Selain itu, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 juga sempat mengkritisi Rektor UI yang menerima izin tambang melalui propaganda poster lepas yang dirilis pada tanggal 18 Februari 2025. Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 pun mengkritisi mengenai wawancara bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau (PBNU), Yahya Cholil, yang menerima konsesi pertambangan dari pemerintah melalui propaganda lepas yang diunggah pada tanggal 17 Juni 2025 di Instagram Story BEM FH UI.

Selain merilis unggahan infografis dan propaganda, dalam menyikapi isu pertambangan di Indonesia, Departemen Lingkungan Hidup bersama TuK Indonesia melakukan kegiatan Peluncuran Eksaminasi Putusan #DesakMandiri pada hari Selasa, 16 September 2025. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai respons terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel. yang dinilai malah berpihak pada tindakan destruktif dari korporasi besar dibandingkan menjawab tantangan iklim.

d. Kedaulatan Pangan

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa landasan kokoh yang menjadi kunci pembangunan ekonomi Indonesia adalah swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air. Hal ini ia tegaskan pada wawancara eksklusif bersama enam jurnalis dari berbagai media yang dipublikasikan melalui kanal Youtube Najwa Shihab. Dalam wawancara tersebut, Prabowo seringkali memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan konteks pertanyaan jurnalis. Selain itu, jawaban yang ia layangkan juga tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Salah satu upaya yang digaungkan Prabowo untuk swasembada pangan adalah melalui proyek lumbung pangan (*food estate*). Namun, alih-alih memperkuat kemandirian petani, program ini justru mengalihkan kendali pangan ke tangan korporasi. Lebih jauh, ambisi Prabowo dalam melibatkan militer untuk urusan pangan justru memberikan kecenderungan pengancaman ruang hidup masyarakat. Militer diberikan kemudahan untuk melakukan intimidasi terhadap warga yang menolak penggusuran untuk proyek lumbung pangan. Sebagai tanggapan atas hal tersebut, Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025 mengunggah

infografis yang bertajuk “Banyak Bunyi, Banyak Blunder: This Is Prabowo Subianto!.” pada 11 April 2025.

Proyek *food estate* bukan merupakan barang baru di Indonesia. Dengan menanam secara monokultur, proyek ini dilaksanakan demi mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Ketergantungan masyarakat Indonesia akan satu macam komoditas, seperti beras, bukan tanpa alasan. Hal ini dapat ditarik dari masa pemerintahan Orde Baru yang menerapkan Revolusi Hijau di Indonesia dengan melakukan investasi secara besar-besaran di sektor pertanian. Program ini membantu Indonesia mencapai swasembada beras untuk 5 tahun, yakni pada tahun 1984–1989. Pada periode 1979–1987, pertumbuhan produksi padi yakni 4,89% per tahun lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk, yakni 2,17% per tahun. Namun, setelah Soeharto diturunkan dan program Revolusi Hijau tidak lagi semasif sebelumnya, luas panen mengalami penurunan sekitar 0,20% per tahun di tahun 1998 hingga 2004 sehingga produksi beras tidak mencukupi kebutuhan masyarakat yang sudah bergantung pada beras. Hal ini mengakibatkan impor beras mencapai 2 juta ton per tahun. Selain itu, banyak daerah di Indonesia yang bergantung pada beras, padahal, tidak semua daerah cocok ditanami padi. Diversifikasi pangan menjadi suatu solusi yang sering tidak dipikirkan oleh Pemerintah yang sedang mengejar ketahanan pangan. Oleh karena itu, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 mengunggah infografis yang bertajuk “Hari Pangan: Melawan Gastrokolonialisme dengan Diversifikasi Pangan.” pada 23 Oktober 2025 sebagai salah satu wujud edukasi untuk kembali memperkenalkan Diversifikasi Pangan terhadap masyarakat luas.



Berapa Harga Nikelmu? Ketika Nasib Alam Berada di Genggaman Ekskavator



Berapa Harga Nikelmu? Ketika Nasib Alam Berada di Genggaman Ekskavator



Peluncuran Eksaminasi Putusan #DesakMandiri

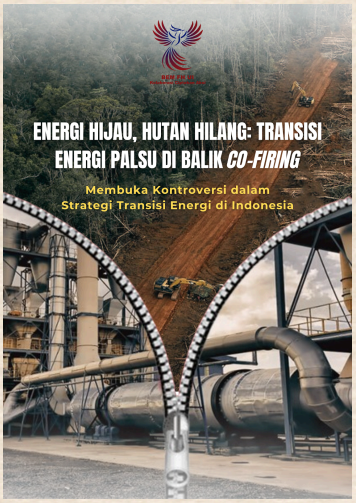

"Energi Hijau, Hutan Hilang: Transisi Energi Palsu di Balik Co-Firing"



Hari Pangan: Melawan Gastrokolonialisme dengan Diversifikasi Pangan



Membongkar Kepalsuan Co-firing sebagai Solusi Lingkungan: Hutan menjadi Tumbal Transisi Energi

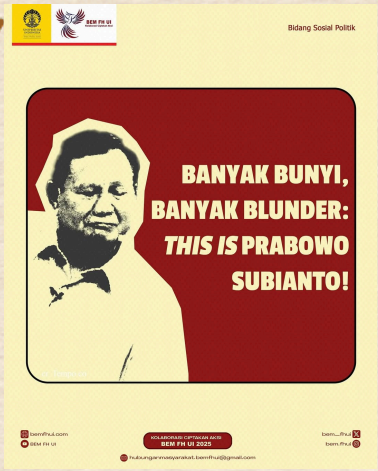

Banyak Bunyi, Banyak Blunder: This is Prabowo Subianto



Nafsu Oligarki di Balik Selimut Kepentingan Umum: Segera Batalkan Proyek Strategis Nasional!



Proyek Serampangan Nasional: Lingkungan Dirusak, Masyarakat Terdesak

BUMI BERCERITA





Kayla Manda Maharani
Person in Charge
Bumi Bercerita

Jasmine Nurhaliza Erlangga
Person in Charge
Bumi Bercerita

Bumi Bercerita merupakan program kerja DLH BEM FH UI 2025 berupa *open booth* yang dilaksanakan di Taman SnT FH UI selama dua hari dengan membuat tiga permainan yang bertujuan untuk mengangkat serta mengedukasi para peserta terkait isu *triple planetary crisis*. Dalam rangka membangun momentum untuk meramaikan *booth*, *pre-event* Bumi Bercerita dilakukan melalui publikasi melalui kanal Instagram BEM FH UI. Adapun isi dari publikasi tersebut adalah poster yang berisikan masing-masing isu dari *triple planetary crisis*. Publikasi pertama mengangkat isu perubahan iklim, publikasi kedua mengangkat isu polusi, dan publikasi ketiga mengangkat isu hilangnya keanekaragaman hayati.

Bumi Bercerita pada tahun ini mengusung tema “Tiga Krisis Planet: Satukan Aksi untuk Bumi”. Melalui tema ini, diharapkan para peserta dapat lebih memahami isu terkait *triple planetary crisis*, yang terdiri atas perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Saat ini, ketiga isu tersebut menjadi isu krusial yang dapat mengancam keberlangsungan bumi dan kesejahteraan manusia. Pelaksanaan program kerja Bumi Bercerita memiliki beberapa tujuan. Pertama adalah melaksanakan penuansaan Hari Bumi Sedunia kepada anggota IKM FH UI serta masyarakat. Kedua melakukan edukasi kepada anggota IKM FH UI dan masyarakat terkait isu *triple planetary crisis*. Adapun tujuan ketiga adalah untuk meningkatkan kesadaran anggota IKM FH UI terhadap isu *triple planetary crisis*. Dalam publikasi pertama, Bumi Bercerita memperoleh *likes* sebanyak 334 *likes*. Untuk publikasi kedua 216 *likes* dan publikasi ketiga mendapat 118 *likes*. Sementara untuk *open booth*, terdapat 80 anggota IKM FH UI yang mengunjungi *booth* pada

hari pertama dan terdapat 56 anggota IKM FH UI yang mengunjungi *booth* pada hari kedua .



Publikasi Pertama Bumi Bercerita



Publikasi Kedua Bumi Bercerita



Publikasi Ketiga Bumi Bercerita









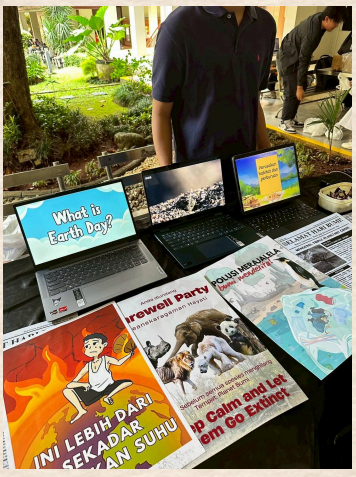



FH UI ENVIRONMENTAL PROJECT 2025





Daryn Dehyazza
Project Officer
FH UI Environmental Project 2025

Puspa Ayu Pandu Tirta
Vice Project Officer
FH UI Environmental Project 2025

FH UI Environmental Project 2025 adalah program kerja berbentuk *community service* dari Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025. Kegiatan ini dirancang untuk menjadi wadah bagi para pesertanya agar lebih peduli terhadap masalah lingkungan dengan turun langsung ke lingkungan masyarakat. Permasalahan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan serius di Kampung Paniis, Desa Taman Jaya, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, yang berpotensi mengancam ekosistem darat dan laut, termasuk terumbu karang. Keterbatasan fasilitas dan rendahnya kesadaran masyarakat mendorong perlunya upaya kolaboratif dalam pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 menyelenggarakan FH UI Environmental Project 2025 bertema *"Bergerak Bersama, Wujudkan Lingkungan Berkelanjutan"* sebagai wadah edukasi, advokasi, dan aksi nyata yang melibatkan mahasiswa, masyarakat, dan pemangku kepentingan setempat untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai upaya memasifkan dan memperkenalkan program kerja FH UI Environmental Project 2025, dalam rangkaian pra-acara diadakan kegiatan publikasi infografis sebagai penuansaan sebelum berjalannya kegiatan, *teaser*, *open recruitment volunteers*, *open donation* dan *baby coral open adoption*, serta *upgrading* untuk *volunteers*. FH UI Environmental Project 2025 bertujuan untuk menanamkan kepedulian dan mendorong partisipasi aktif masyarakat Kampung Paniis mengenai pentingnya kelestarian ekosistem sekitar, memberikan pemahaman kepada peserta didik di SD setempat mengenai ekosistem yang ada di sekitar mereka dan cara melestarikan lingkungan, dan membantu masyarakat Kampung Paniis dalam menjaga ekosistemnya.

ACARA



1. **Edukasi Pelajar SD**

   Edukasi diberikan kepada peserta didik dari kelas 1 hingga 6 yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Pada kesempatan ini, edukasi yang diberikan oleh menekankan pada pentingnya pengolahan sampah yang baik untuk menjaga ekosistem. Edukasi ini diberikan dengan cara interaktif, yakni pembuatan mading oleh peserta didik. Dalam menguji pemahaman peserta didik, pada akhir kegiatan, dilakukan *post test* yang dikerjakan oleh para peserta didik.



2. ***Talkshow***

   Talkshow membahas mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk pelestarian ekosistem yang dihadiri oleh komunitas Paniis Lestari dan warga Kampung Paniis. Setelah *talkshow*, terdapat diskusi interaktif bersama warga mengenai tantangan, harapan, serta aspirasi mereka dalam pelestarian ekosistem sekitar. Adapun hasil dari diskusi ini dituliskan di dalam *stakeholder recommendations*.

3. **Edukasi Ekosistem Ujung Kulon**

   Edukasi ekosistem diberikan kepada peserta FH UI Environmental Project 2025. Edukasi ini diberikan oleh perwakilan dari kantor Taman Nasional Ujung Kulon. Pada intinya, edukasi ini membahas mengenai upaya lembaga untuk menjaga ekosistem badak yang mulai terancam.





4. **Transplantasi Terumbu Karang dan Penanaman Pohon**

   Transplantasi terumbu karang dan penanaman pohon dilakukan oleh peserta FH UI

Environmental Project 2025. Mata acara ini sebagai aksi nyata kepedulian terhadap ekosistem yang mulai terancam.

PASCAACARA

1. **Publikasi *After Movie***

   After movie dipublikasikan melalui kanal Instagram BEM FH UI. Video ini berisikan seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir FH UI Environmental Project 2025.

2. **Penyerahan *Stakeholder Recommendations***

   Stakeholder Recommendations berisikan rangkuman permasalahan mengenai isu pengelolaan sampah hingga ancamannya terhadap ekosistem serta diskusi yang berlangsung bersama warga. Kajian ini diberikan kepada dua instansi terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kabupaten Pandeglan

Dalam pelaksanaan **FH UI Environmental Project 2025**, capaian riil yang telah dicapai antara lain adalah mendapatkan 15 orang volunter, menanam 40 pohon, menanam 6 media terumbu karang, dan melibatkan 62 warga sekitar dalam sesi *talkshow* dan 82 siswa/i SDN Taman Jaya 2 dengan rata-rata nilai *post-test* sebesar 82.



Publikasi After Movie



Publikasi Penyerahan Stakeholder Reccomendations

PERAYAAN HARI BESAR LINGKUNGAN
HARI KEANEKARAGAMAN HAYATI 2025





Geovara Soambingon Siregar
Person in Charge
Hari Keanekaragaman Hayati 2025

Aphrodite Shaina Riyadi
Person in Charge
Hari Keanekaragaman Hayati 2025

Penetapan publikasi video dokumenter pada tanggal Hari Keanekaragaman Hayati 2025 dimaksudkan untuk merayakan dan menggalakkan isu biodiversitas, termasuk mengangkat isu perdagangan hewan ilegal yang telah dilarang melalui Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), sebagai bagian dari upaya global menjaga kelestarian spesies dan ekosistem di seluruh dunia. Di tahun 2025, perayaan Hari Keanekaragaman Hayati mengusung tema “Perdagangan Hewan Ilegal: Dari Hutan ke Etalase.” Program kerja ini dilaksanaksanakan dengan pembuatan video dokumenter tentang maraknya perdagangan satwa liar Indonesia. Pembuatan video diawali dengan perekaman video pada tanggal 3 Mei 2025 di Pasar Hewan Jatinegara dan Pasar Burung Pramuka yang diikuti dengan pengeditan video menjadi sebuah video dokumenter. Selanjutnya, video dokumenter tersebut dipublikasikan di kanal informasi BEM FH UI (Instagram dan Youtube) pada tanggal 22 Mei 2025. Pada video dokumenter ini, kami mengupas seluk beluk lingkaran perdagangan hewan ilegal yang terjadi di Pasar Hewan Jatinegara dan Pasar Burung Pramuka. Adapun tujuan dari dilaksanakannya program kerja ini adalah untuk memperkenalkan isu perdagangan hewan ilegal kepada masyarakat umum, meningkatkan kesadaran tentang isu perdagangan hewan ilegal kepada masyarakat umum, dan memberikan edukasi kepada masyarakat umum mengenai isu perdagangan hewan ilegal. Publikasi video dokumenter mengenai perdagangan hewan ilegal di Pasar Hewan Jatinegara dan Pasar Burung Pramuka mendapat perhatian publik yang baik. Total

view pada kedua kanal, yakni Instagram BEM FH UI dan Youtube BEM FH UI mencapai 15.658 *viewers* dengan total *likes* mencapai 454 *likes*.







Publikasi Instagram





Publikasi Youtube

HARI UDARA BERSIH



Fadhlan Kautsar Faturrahman
Person in Charge
Hari Udara Bersih 2025

Perayaan Hari Udara Bersih 2025 bertujuan sebagai penuansaan isu bahwasanya hak warga negara atas udara yang bersih terbebas dari polusi belum dipenuhi oleh negara. Program kerja ini dilaksanakan dengan mempublikasikan 3 infografis dan satu *reels* yang secara berkesinambungan membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt. Pst., hakim menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan berbagai upaya hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi hingga saat ini belum ada tindakan konkrit oleh pemerintah untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut. Maka dari itu, publikasi pada hari udara bersih memiliki tujuan untuk mengingatkan kembali pemerintah akan putusan ini dan menuntut tindak lanjut pemerintah dalam mengupayakan udara bersih yang merupakan hak warga negara. Program kerja ini bertujuan untuk menuansakan kembali isu kepada masyarakat umum mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt. Pst., yang pada intinya mengharuskan pemerintah untuk melakukan beberapa hal dalam rangka memperbaiki kualitas udara dan menuntut pemerintah untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara melakukan tindakan konkrit. Pada pelaksanaannya, publikasi *reels* dilakukan pada hari Minggu, 7 September 2025 dan publikasi *feeds* satu *row* dilakukan pada Rabu, 10 September 2025. Peringatan Hari Udara Bersih pada tahun ini berhasil membawakan kembali isu yang sudah cukup lama tetapi dengan kebaruan dari segi cara pengemasannya.

Publikasi ini mencapai total *likes* pada publikasi sebanyak 382 *likes* dan total penonton reels mencapai 6.400 penonton.



Publikasi Ketiga



Publikasi Kedua



Publikasi Pertama



Publikasi Reels





HARI PANGAN



Anggita Nashwa Taufiqa
Person in Charge
Hari Pangan 2025

Berangkat dari program swasembada beras saat pemerintahan orde baru, hal ini mengakibatkan ketergantungan masyarakat Indonesia akan beras terus meningkat tahun per-tahun. Banyak daerah di Indonesia yang bergantung pada beras, padahal, tidak semua daerah cocok ditanami padi. Diversifikasi pangan menjadi suatu solusi yang sering ditinggali oleh Pemerintah yang sedang mengejar ketahanan pangan. Oleh karena itu, Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 menyelenggarakan kampanye Hari Pangan 2025 sebagai wujud edukasi untuk kembali memperkenalkan diversifikasi pangan terhadap masyarakat luas. Kampanye Hari Pangan 2025 mengangkat *tagline* "Makanan Bergizi Gratis: Pangan Sehat Hanya Ilusi." Adapun tujuan dari diselenggarakannya kampanye Hari Pangan 2025 adalah meningkatkan kesadaran anggota IKM FH UI dan civitas akademika mengenai keanekaragaman konsumsi pangan pokok serta mendorong anggota IKM FH UI dan civitas akademika untuk mengkritisi aksesibilitas dan keterjangkauan pangan bergizi serta aktif dalam upaya mendorong kedaulatan pangan. Kampanye ini dilakukan dengan dua cara, yakni penuansaan dan *open booth*.

Penuansaan

Penuansaan dilakukan dengan melakukan publikasi infografis pada kanal Instagram BEM FH UI. Isi dari infografis ini membahas mengenai diversifikasi pangan untuk mendukung ketahanan pangan.

Adapun tujuan dari publikasi ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keberagaman pangan di Indonesia, bahwa makanan pokok tidak hanya nasi.

Open Booth

Kampanye ini dilakukan dengan cara *open booth* di kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan target audiens adalah anggota IKM FH UI. Dalam *booth* ini terdapat beberapa permainan yang mengangkat substansi mengenai diversifikasi pangan seperti mencocokkan jenis pangan dengan asal daerahnya dan menebak definisi dari sebuah kata yang berkaitan dengan diversifikasi pangan. Untuk menarik perhatian anggota IKM FH UI, pada *booth* disediakan hadiah bagi pemenang *games* berupa macam-macam pangan.

Kampanye Hari Pangan 2025 berhasil untuk mengundang 35 anggota IKM FH UI untuk mengunjungi *booth* dan meningkatkan kesadaran mereka terkait diversifikasi pangan. Total *likes* pada publikasi di kampanye Hari Pangan 2025 sebanyak 183 *likes*.



Publikasi Perayaan Hari Pangan



Publikasi Undangan *Open Booth*



Publikasi Telah Berlangsung


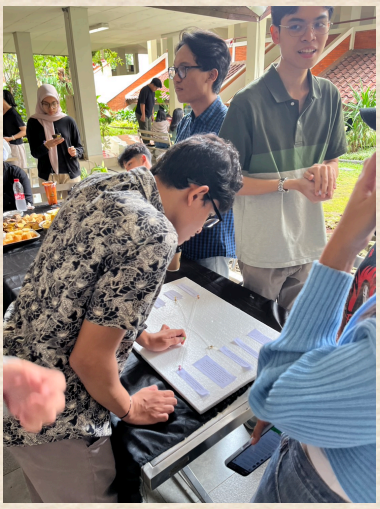




HARI POHON





Riliya Adinda
Person in Charge
Hari Pohon 2025

Bintang Sheva Cahyadi
Person in Charge
Hari Pohon 2025

Kampanye Hari Pohon di tahun 2025 merupakan program kerja Departemen Lingkungan Hidup yang dikemas dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah publikasi kajian dan bentuk kedua adalah turun lapangan bersama dengan volunter yang merupakan anggota IKM FH UI tahun 2025 untuk menanam mangrove. Isu yang diangkat pada tahun ini adalah hubungan antara deforestasi dengan permasalahan iklim. Menekan laju peningkatan gas emisi rumah kaca (GRK) telah menjadi suatu problematika baru bagi pemerintah setempat. Dalam rentang waktu 2012–2023, total emisi GRK di Indonesia telah mencapai rata-rata 57,2 juta ton per tahun. Pohon yang berkemampuan untuk menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar telah melanggengkan peran vital hutan dalam upaya mitigasi krisis iklim. Ekosistem hutan mangrove menjadi salah satu penyerap karbon dioksida yang paling efektif di dunia, berkemampuan untuk menyimpan lima kali lipat jumlah karbon dioksida yang dapat disimpan hutan tropis. Namun, saat ini, telah dilakukan berbagai konversi lahan di Indonesia yang menyebabkan terjadinya deforestasi kawasan hutan mangrove. Rangkaian kegiatan Hari Pohon diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anggota IKM FH UI mengenai peran penting ekosistem mangrove dalam upaya mitigasi dampak krisis iklim, serta membuka ruang partisipasi aktif anggota IKM FH UI dalam melakukan aksi nyata pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, diharapkan juga dilaksanakannya rangkaian acara pada kampanye Hari Pohon 2025 dapat memberikan kesadaran bagi anggota IKM FH UI mengenai dampak deforestasi dan pentingnya menjaga kawasan hutan.

PRAACARA

Rangkaian kampanye Hari Pohon 2025 diawali dengan *open booth* yang dilakukan di Taman S&T Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada hari Rabu 19 November 2025 hingga Kamis, 20 November 2025. Dalam *booth* ini, terdapat beberapa permainan yang pada intinya menjelaskan mengenai peran pohon pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga terdapat konten interaktif untuk pengunjung *booth* menyampaikan pesan mereka dalam rangka perayaan hari Pohon ini.

ACARA

1. **Publikasi Kajian**

   Publikasi kajian dilakukan pada kanal Instagram BEM FH UI.

   Kajian ini membawa judul "Energi Hijau, Hutan Hilang: Transisi Energi Palsu di Balik Co-Firing." Kajian ini membahas problematika pengupayaan *co-firing* yang pada kenyataannya membutuhkan deforestasi dalam jumlah yang besar.

2. **Penanaman Mangrove**

   Penanaman pohon mangrove dilakukan di kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk dengan *tagline* "Menanam Harapan, Merawat Kehidupan."

PASCAACARA

1. **Publikasi *After Movie***

   After Movie dibuat dalam bentuk *reels* yang dipublikasikan pada kanal Instagram BEM FH UI. Adapun isi dari *after movie* ini adalah pelaksanaan kegiatan *open booth* dan turun lapangan penanaman mangrove.

2. **Pemberian Donasi**

   Selama rangkaian kegiatan, untuk pendanaan, dibuka *open donation* untuk pelaksanaan turun lapangan. Berhubung *open donation* yang didapatkan lebih dari cukup, maka uang donasi yang tidak terpakai untuk pelaksanaan turun lapangan diberikan kepada Forest Watch Indonesia sebesar Rp1.700.000,00.

Kampanye Hari Pohon 2025 telah diikuti oleh 87 anggota IKM FH UI, dengan 36 peserta volunter yang juga merupakan anggota IKM FH UI. Selain volunter, sebanyak 43 anggota IKM FH UI juga mengadopsi pohon mangrove yang turut berkontribusi ke total 100 bibit pohon mangrove yang ditanam pada acara puncak.

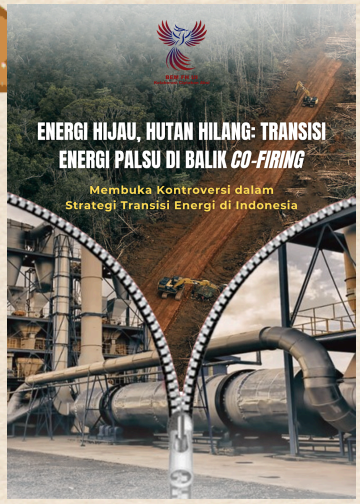

Energi Hijau, Hutan Hilang: Transisi Energi Palsu Di Balik *Co-Firing*



Publikasi Selamat Hari Pohon



Publikasi After Movie



















DISKUSI PUBLIK RUU MASYARAKAT ADAT

Pada tahun ini, Departemen Lingkungan Hidup dan Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UI 2025 menyelenggarakan program kerja bernama Diskusi Publik Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (Dispub RUU MA). Program kerja ini merupakan kerja sama antara BEM FH UI 2025 dengan Koalisi RUU Masyarakat Adat. Dispub RUU MA dilaksanakan melalui pemaparan materi serta diskusi dengan para pemantik diskusi mengenai urgensi dari pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang sedari dulu tidak pernah menjadi prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk disahkan. Adapun tujuan dari pelaksanaan program kerja ini adalah memberikan pemahaman kepada IKM FH UI, IKM UI, dan masyarakat luas mengenai urgensi dari pengesahan RUU Masyarakat Adat, membangkitkan semangat diskusi IKM FH UI, IKM UI, dan masyarakat luas mengenai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, serta meningkatkan kesadaran IKM FH UI, IKM UI, dan masyarakat luas mengenai urgensi dari pengesahan RUU Masyarakat Adat. Program kerja ini berjalan dengan baik dan berhasil diikuti oleh 150 peserta, melebihi target jumlah peserta yang telah ditetapkan.








KERJASAMA PENGADAAN *DROP BOX* DENGAN CSWM UI



Nadya Almunawar
Person in Charge
Kerjasama dengan CSWM UI



Geovara Siregar
Person in Charge
Kerjasama dengan CSWM UI



Ribka Purba
Person in Charge
Kerjasama dengan CSWM UI



Fadhlan Kautsar
Person in Charge
Kerjasama dengan CSWM UI

Center for Sustainability and Waste Management Universitas Indonesia (CSWM UI) melakukan kerjasama yang dilakukan dengan BEM se-UI untuk melaksanakan program *waste management* dengan diadakan serangkaian acara, di mana di Fakultas Hukum sendiri dilakukan dengan peletakan *drop box* botol plastik agar memudahkan daur ulangnya. Program ini diadakan untuk mengolah sampah plastik yang dihasilkan dari kemasan air mineral para mahasiswa yang tidak membawa tempat minum. Pelaksanaan program kerja ini dilakukan dengan cara publikasi mengenai pengenalan adanya *drop box* di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dilatarbelakangi dari permasalahan sampah dan tata cara pengumpulan botol sampah plastik yang benar. Selain itu, terdapat penukaran botol bekas dengan *voucher* kantin. Penukaran ini dilakukan di *booth* yang telah dipersiapkan oleh Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 pada rabu, 17 September 2025. Botol sampah yang dikumpulkan dapat ditukarkan dengan *voucher* potongan harga senilai Rp10.000,00 yang dapat digunakan di kantin Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memperkenalkan sistem *drop box* untuk mengolah sampah plastik agar memudahkan proses daur ulang. Selain itu, program kerja ini memiliki tujuan untuk menanamkan kebiasaan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengenai cara yang benar dalam menggunakan *drop box*, seperti botol yang dimasukkan harus dalam keadaan bersih dan kering lalu diremukkan sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam *drop box*. Program kerja ini berjalan dengan baik dan berhasil merangkul 70 orang untuk membuang sampah botol plastik mereka pada hari pertama

peletakan *drop box*.



Pengenalan *Drop Box*



Ajakan *Open Booth*

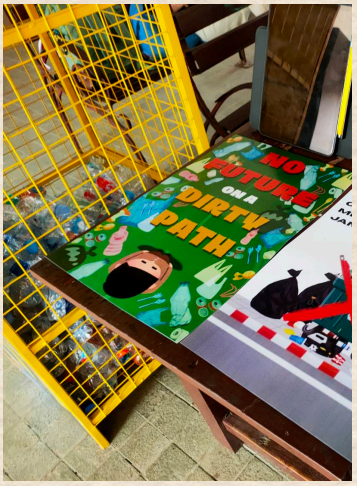







DISKUSI PUBLIK DRAW THE LINE



Anggita Nashwa Taufiqa
Person in Charge
Diskusi Publik Draw The Line



Ribka Purba
Person in Charge
Diskusi Publik Draw The Line



Geovara Siregar
Person in Charge
Diskusi Publik Draw The Line

Kegiatan diskusi publik merupakan program kerja dari Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 sebagai bentuk kolaborasi terhadap koalisi gerakan Draw The Line. Diskusi publik ini mengambil tema **"Menuju Net Zero Emission 2060: Menilik Komitmen Indonesia dalam COP30."** Adapun tujuan dari diskusi publik ini adalah untuk membangkitkan semangat diskusi mengenai pentingnya penguatan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim serta langkah konkret menuju target *net zero emission* 2060, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam lingkup nasional. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman mengenai pentingnya komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan iklim nasional menuju pencapaian *net zero emission* pada tahun 2060. Urgensi dilakukannya diskusi ini adalah semakin dekatnya pelaksanaan COP30, tetapi tidak ada langkah konkrit yang telah dilakukan pemerintah sebagai bentuk kesungguhan dalam membawa perubahan yang berarti untuk lingkungan. Hal ini terlihat dari komitmen pemerintah yang dipublikasikan lewat dari tenggat waktu yang seharusnya. Melihat kondisi ini, perlu tekanan dari publik supaya tumbuh *political will* dari pemerintah untuk secara serius mulai membawa perubahan yang berarti dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Diskusi publik ini dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Rabu, 17 September 2025 dengan total partisipan sebanyak 20 peserta.



Publikasi Undangan Diskusi Publik



Publikasi Telah Berlangsung Diskusi Publik









PELUNCURAN EKSAMINASI PUTUSAN #DESAKMANDIRI

Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2025 bekerja sama dengan Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) melaksanakan program kerja yang bertajuk “Peluncuran Eksaminasi Putusan #DESAKMANDIRI”. Program kerja ini dilakukan secara *hybrid* melalui media Zoom meetings dan secara daring di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 16 September 2025. Tujuan dilaksanakannya program kerja ini adalah untuk menguji kualitas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan yang sebelumnya diajukan oleh TuK Indonesia yang dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) atau tidak dapat diterima dengan alasan kurang pihak. Melalui putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabaikan pokok perkara yang substansial yang mengancam Hak Asasi Manusia dan kerusakan lingkungan akibat pemberian kredit oleh Bank Mandiri. Melalui program ini diharapkan para akademisi dan hakim eksaminator dapat memberikan tanggapan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta meluncurkan hasil eksaminasi kepada publik. Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dari dilaksanakannya program kerja ini, yakni menguji kualitas putusan PN Jakarta Selatan terkait gugatan terhadap Bank Mandiri melalui mekanisme eksaminasi publik, memberikan analisis kritis atas penerapan hukum, khususnya alasan *kurang pihak* yang berpotensi menghambat akses keadilan, menggali perspektif akademis untuk memperkuat argumentasi hukum masyarakat sipil dalam perkara lingkungan dan HAM, mendorong kolaborasi antara masyarakat sipil serta kampus dalam mengawal akuntabilitas peradilan, dan meluncurkan hasil eksaminasi kepada publik sebagai bentuk pendidikan hukum kritis dan advokasi. Program kerja ini berjalan dengan baik dan berhasil dihadiri oleh 72 peserta, melebihi target yang telah ditetapkan.








Publikasi Undangan



Publikasi Telah Berlangsung

KERJA SAMA ALIANSI DLH

Aliansi Bebaskan Sorbatua Siallagan

Aliansi Bebaskan Sorbatua Siallagan merupakan aliansi yang baru dibentuk pada tahun 2025. Aliansi ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawalan serta pengadvokasian isu mengenai Bapak Sorbatua Siallagan yang merupakan tetua dari masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan PT Toba Pulp Lestari Tbk (PT TPL). Aliansi ini aktif dalam mengawal perkara Bapak Sorbatua Siallagan sejak dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Adapun, pengawalan dari Aliansi Bebaskan Sorbatua Siallagan dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan melakukan aksi solidaritas di depan Mahkamah Agung sebanyak 2 kali, yakni pada 26 Februari 2025 dan 9 Mei 2025 serta Aksi Doa Bersama Merawat Lingkungan Hidup yang dilaksanakan di Tugu Proklamasi pada Senin, 18 Agustus 2025. Selain itu, sebagai bentuk penuansaan isu kriminalisasi pejuang lingkungan hidup, DLH BEM FH UI 2025 juga membuat publikasi dengan judul “Everything, Everywhere, All at Risk.” Publikasi ini memuat beberapa tokoh pejuang lingkungan yang dikriminalisasi.







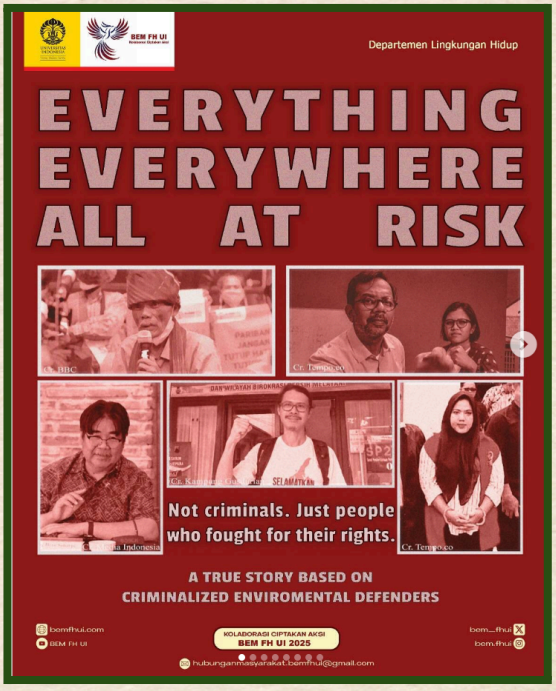

Aliansi Draw The Line

Aliansi Draw The Line merupakan sebuah aliansi yang berfokus pada pengawalan isu krisis iklim dengan memerhatikan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam kontribusinya untuk mengurangi emisi yang dihasilkan. Aliansi ini merupakan pengawalan isu untuk penyelenggaraan COP30 yang diselenggarakan di Brazil pada 10 November 2025. Adapun pihak eksternal yang tergabung dalam aliansi ini adalah Climate Rangers Jakarta, Enter Nusantara, 350.org Yayasan Indonesia Cerah, XR, dan Fossilfreeuki. Aliansi ini menghasilkan aksi turun ke jalan pada Jumat, 19 September 2025 di Terowongan Kendal hingga Istana Presiden. Adapun bentuk kerja sama DLH BEM FH UI 2025 dalam aliansi ini adalah mengadakan suatu diskusi publik yang mengangkat tema “Menuju Net Zero Emission 2060: Menilik Komitmen Indonesia dalam COP30” sebagai bentuk penuansaan isu.





Aliansi Center for Sustainability and Waste Management Universitas Indonesia

Aliansi Center for Sustainability and Waste Management Universitas Indonesia merupakan kerja sama aliansi yang diadakan oleh Universitas Indonesia dalam menangani permasalahan sampah yang dilakukan melalui pemilahan, pengadaan fasilitas, hingga edukasi kepada *civitas academica* serta kolaborasi dengan pemerintah dan mitra strategis. Kolaborasi ini dilakukan melalui pengadaan *Dropbox* Botol Plastik di setiap fakultas di Universitas Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah plastik sekali pakai serta memberi ruang partisipasi aktif dari *civitas academica* dalam menciptakan lingkungan kampus yang bersih dan sehat. Dalam aliansi

ini, peran masing-masing BEM fakultas adalah mengenalkan cara penggunaan *dropbox* di masing-masing fakultas. DLH BEM FH UI memilih untuk mensosialisasikan penggunaan *dropbox* dengan cara membuka *booth* penukaran botol bekas dengan *voucher* kantin senilai Rp10.000,00. *Open booth* ini ditujukan untuk mengajarkan anggota IKM FH UI mengenai perawatan yang harus dilakukan terhadap botol yang akan dimasukkan ke dalam *dropbox*. Adapun dalam *open booth* juga terdapat beberapa poster yang berisikan penuansaan isu mengenai permasalahan persampahan secara general dan yang terdapat di Universitas Indonesia.







Aliansi Rancangan Undang-Undang Keadilan Iklim

Aliansi Rancangan Undang-Undang Keadilan Iklim merupakan sebuah aliansi yang bekerja sama dengan BEM di beberapa fakultas di Universitas Indonesia. Kerja sama ini direncanakan untuk dilaksanakan

melalui pembuatan *policy brief*, publikasi propaganda daring, dan tujuan akhirnya adalah dilaksanakannya audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan tujuan memberikan masukan mengenai substansi yang perlu diatur di dalam Undang-Undang Krisis Iklim serta mendorong pengesahan Undang-Undang tersebut secepatnya.

Departemen **Lingkungan Hidup**

ACTION RECEIPT

IN 2025

100 _____ Publikasi

23 _____ Infografis

9 _____ Reels

11 _____ Propaganda Lepas

4 _____ Aksi Massa dan Simbolik

3 _____ Amicus Curiae Brief

7 _____ Kajian

1 _____ Audiensi

2 _____ Policy Brief



Hidup di DLH


FILM NEGATIVE
13
13 A
FILM NEGATIVE
14
14 A
FILM NEGATIVE





What is Earth Day?
INI LEBIH DARI
SEKADAR
AN SUHU





DEPARTEMEN PENGABDIAN MASYARAKAT



MENGENAL LEBIH DEKAT
DEPARTEMEN PENGABDIAN MASYARAKAT BEM FH UI 2025

Departemen Pengabdian Masyarakat (Pengmas) BEM FH UI 2025 hadir untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Pengmas bertugas untuk melaksanakan advokasi sosial dan intervensi komunitas untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pengmas BEM FH UI 2025 juga hadir sebagai wadah agar IKM FH UI dapat menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam menjalankan kepengurusannya, Pengmas BEM FH UI 2025 dikepalai oleh satu orang Kepala Departemen, Gabriella Stephanie Cheng dan dua orang Wakil Kepala Departemen, Vindy Sari Tiatira Sianipar dan Nihaya Mumtaz Suratno atau yang biasa disebut sebagai Badan Pengurus Harian (BPH). Selama satu tahun kepengurusan, BPH Pengmas BEM FH UI 2025 dibantu oleh 14 orang staf yang diberikan tanggung jawab sebagai PiC Program Kerja Pengmas BEM FH UI 2025. Dalam menjalankan fungsinya, terdapat beberapa isu yang menjadi fokus arah gerak Departemen Pengabdian Masyarakat, yaitu**:**

- **Kemiskinan Struktural** yang merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan sistemik dalam akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan kesempatan sosial ekonomi**.**
- **Kesejahteraan Sosial**, yakni keadaan masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya, layanan, dan lingkungan yang memungkinkan mereka mencapai potensi maksimum mereka serta menikmati hidup yang bermakna, sehat, dan produktif.
- **Pendidikan dan Anak** mencakup berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak atas pendidikan yang layak serta kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Selain itu, isu pendidikan juga termasuk dalam fokus Pengmas BEM FH UI 2025, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, rendahnya tingkat partisipasi sekolah, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
- **Bantuan Hukum Struktural**, yakni pemberian bantuan hukum yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada upaya mengatasi akar permasalahan yang bersifat sistemik dalam masyarakat.
- **Intervensi Komunitas** yang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu *community action, community service,* dan *community development*. *Community action* (Comact) adalah tindakan kolektif oleh masyarakat untuk mengatasi masalah yang dihadapi guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

bersama. *Community service* (Comserv) adalah kegiatan pelayanan sosial untuk memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. *Community development* (Comdev) adalah model pengembangan masyarakat memiliki tujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat, di mana terdapat masalah sosial di tengah masyarakat.

Isu-isu tersebut kemudian diejawantahkan dalam berbagai program kerja Pengmas BEM FH UI 2025, yaitu FH UI Mengabdi 2025, Makara Merah Bina Desa 2025, Smile Project 2025, Dharma Makara, SKIP FH UI 2025, Hari Besar Sosial Sosial Masyarakat, Mimbar Merdeka, Lensa Sosial, Let's Donate, serta Kilas Pergerakan dan Pengabdian.

FH UI MENGABDI 2025



Nasywa Azighah
Vice Project Officer I
FH UI Mengabdi 2025



Kanaya Putri Maheswari
Project Officer
FH UI Mengabdi 2025



Abie Leonardus Panota
Vice Project Officer II
FH UI Mengabdi 2025

FH UI Mengabdi adalah program kerja dari Pengmas BEM FH UI 2025 dalam bentuk *community service* untuk memberikan manfaat baik dari segi materiil, maupun intelektual kepada anak-anak pegawai FH UI. Tahun ini, FH UI Mengabdi mengangkat tema "Langkah Kecil Menuju Dunia yang Besar: Literasi sebagai Bekal Masa Depan. Program kerja ini dibagi menjadi dua rangkaian acara besar, yaitu *Pre-Event* dan *Main Event*. Dalam menjalankan program kerja ini, BEM FH UI 2025 bekerja sama dengan Lembaga Tinggi Kemahasiswaan (LTK) dan Badan Otonom (BO) di FH UI, yaitu ALSA LC UI, PERFILMA, KOPMA FH UI, dan LK2 FH UI. Selain dalam bentuk acara, FH UI Mengabdi secara rutin melakukan publikasi Ruang Cerita, yakni sebuah wadah bagi pegawai FH UI bercerita mengenai pengalamannya bekerja di FH UI. Harapannya, Ruang Cerita dapat menjadi jembatan penyampaian pesan pegawai FH UI kepada IKM FH UI sekaligus memperkenalkan pegawai FH UI kepada IKM FH UI. FH UI Mengabdi bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada anak-anak pegawai FH UI, mempererat tali persaudaraan antara IKM FH UI dan pegawai FH UI, serta mengenalkan dan mengembangkan minat serta bakat anak-anak pegawai melalui pelaksanaan tes penelusuran potensi diri.

PRE-EVENT

1. **Pembimbingan**

   Rangkaian acara merupakan tahap pengajaran yang diberikan kepada anak-anak pegawai FH UI dengan melibatkan di LTK dan BO FH UI untuk memberikan pengajaran terkait bahasa Inggris, musik, kewirausahaan, dan menulis esai.



MAIN EVENT

1. **Tes Minat Bakat**

   Rangkaian acara ini ditujukan bagi anak-anak pegawai FH UI yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Smile Consulting selaku penyedia jasa tes minat dan bakat bagi anak-anak pegawai FH UI sesuai jenjang pendidikan mereka.



2. **Sesi *Talkshow***

   Rangkaian acara ini ditujukan bagi pegawai FH UI. Sesi *talkshow* diisi oleh Bapak Mario Manuhutu yang memaparkan materi tentang pentingnya mengetahui minat dan bakat anak mereka dan peran orang tua dalam proses pengembangan minat dan bakat anak



FH UI Mengabdi 2025 berhasil menyelenggarakan tes minat bakat dengan 20 (dua puluh) anak pegawai sebagai peserta. Selain itu, terdapat 50 (lima puluh) anak pegawai menerima bantuan dana pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kemudian, dalam rangka menyediakan wadah bagi Pegawai FH UI berbagi cerita serta memperkenalkan mereka ke IKM FH UI, telah terdapat 6 (enam) Ruang Cerita yang dipublikasi di Instagram BEM FH UI.



Ruang Cerita: Mas Arga



Ruang Cerita: Pak Yusuf



Ruang Cerita: Pak Aris



Ruang Cerita: Pak Doni



Ruang Cerita: Pak Bukhori



Ruang Cerita: Mbak Lita

MAKARA MERAH BINA DESA 2025



Oliver Dave
Vice Project Officer I
Makara Merah Bina Desa 2025



Hanna Cristabel Donata
Project Officer
Makara Merah Bina Desa 2025



Tazkiyatun Nafsi
Vice Project Officer II
Makara Merah Bina Desa 2025

Kegiatan Makara Merah Bina Desa 2025 yang mengusung tema "Menanam Asa di Tanah Cita, Menuai Ilmu untuk Nusantara" merupakan wujud kontribusi konkret Pengmas BEM FH UI 2025 dalam membantu masyarakat yang memerlukan bantuan di daerah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Kegiatan Makara Merah Bina Desa 2025 adalah program kerja dari Pengmas BEM FH UI 2025 berupa kegiatan *community service* yang akan dilakukan dalam bentuk *live-in*. Tahun ini, Makara Merah Bina Desa 2025 diadakan di Kampung Lengkong dan Kampung Ciwaluh, Desa Wates Jaya selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam. Desa Wates Jaya yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dipilih sebagai lokasi kegiatan Makara Merah Bina Desa 2025 karena masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, Makara Merah Bina Desa 2025 hadir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Wates Jaya terhadap hak-haknya sebagai warga negara, menyediakan sarana yang menumbuhkan kepercayaan diri serta minat dan bakat siswa SDN 05 Cigombong serta melakukan kegiatan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi masyarakat Desa Wates Jaya. Tidak hanya itu, Makara Merah Bina Desa 2025 juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa FH UI dalam pemahaman isu-isu sosial.

HARI PERTAMA

1. ***Grand Opening* Makara Merah Bina Desa 2025**

   Rangkaian ini menjadi pembuka kegiatan Makara Merah Bina Desa 2025. Terdapat sambutan dari Wakil Ketua BEM FH UI 2025 dan Ketua Pelaksana. Selain itu, terdapat pembagian rumah tinggal panitia dan *volunteers*. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan selama berada di Kampung Lengkong dan Kampung Ciwaluh, Desa Wates Jaya.



2. **Kerja Bakti**

   Seluruh panitia dan *volunteers* bergotong royong bersama warga dalam kegiatan kerja bakti sebagai langkah awal membangun rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar



HARI KEDUA

1. ***Move and Groove***

   Panitia dan *volunteers* mengadakan sesi senam bersama dengan siswa siswi SDN 05 Cigombong. Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang positif dan timbulnya kedekatan antara panitia, *volunteers*, dan seluruh warga SDN 05 Cigombong.



2. **Pengajaran mengenai Minat dan Bakat**

   Panitia dan *volunteers* akan memberikan berbagai fasilitas minat dan bakat kepada seluruh siswa-siswi SDN 05 Cigombong dengan tujuan untuk membantu pencarian minat dan bakat apa yang dimiliki oleh siswa-siswi.





3. ***Workshop* Pembuatan Pupuk Kompos**

   Workshop ini diikuti oleh warga sekitar, panitia, dan volunteers yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan bahwa pupuk dapat dihasilkan sendiri dari limbah rumah tangga.



HARI KETIGA

1. **Pengajaran Matematika dan Bahasa Inggris kepada Siswa SDN 05 Cigombong**

   Panitia dan *volunteers* mengajarkan materi matematika dan bahasa inggris dasar kepada siswa-siswi SDN 05 Cigombong dengan tujuan membantu membangun fondasi yang kuat dalam kedua mata pelajaran tersebut dan mempersiapkan siswa-siswi dalam tantangan akademik di jenjang pendidikan selanjutnya.



2. **Menuju Derai**

   Kegiatan ini berupa kunjungan ke Curug Ciawitali dan sungai yang bertujuan untuk momen relaksasi dan menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara panitia dan *volunteers*.





HARI KEEMPAT

1. **Menapak Jejak Warga**

   Panitia dan *volunteers* turut serta dalam aktivitas harian

warga, seperti bertani dan mengolah kopi. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin kedekatan yang lebih erat antara warga, *volunteers*, dan panitia Makara Merah Bina Desa 2025.



2. **Bazar**

   Dalam bazar, para warga Desa Wates Jaya berkumpul untuk memilih pakaian dan aksesoris yang mereka sukai. Pakaian dan aksesoris tersebut merupakan hasil donasi yang terkumpul dari *Open Donation* Makara Merah Bina Desa 2025.



3. **Malam Keakraban (Makrab)**

   Makrab dilakukan di malam terakhir panitia dan *volunteers* di Desa Wates Jaya sebagai wujud terima kasih kepada kepala desa dan warga setempat. Selain itu, Makrab bertujuan agar masyarakat desa, panitia, dan *volunteers* dapat berinteraksi dan saling mengenal satu sama lain dengan cara yang menyenangkan. Hal ini juga dilakukan agar tali silaturahmi yang sudah terjalin akan terus berlanjut walaupun kegiatan ini telah selesai.



HARI KELIMA

1. **Sosialisasi Hak Warga Negara**

   Dalam konteks pembangunan nasional, masyarakat sering dihadapkan pada tantangan terhadap hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu, Makara Merah Bina Desa 2025 mengadakan sosialisasi yang bersifat edukatif dan partisipatif sebagai salah satu rangkaiannya. Kegiatan ini ditujukan kepada warga guna membekali mereka dengan pemahaman hukum dan ruang diskusi yang konstruktif terkait hak-hak sebagai warga negara

yang dimiliki. Dengan melibatkan warga dalam diskusi ini, diharapkan lahir kesadaran kolektif yang lebih kuat dan kemampuan advokasi yang lebih terarah dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada atau mungkin datang ke depannya.



2. **Liwetan Bersama Warga Desa Wates Jaya**

   Sebagai bentuk terima kasih dan pamitan kepada warga, seluruh panitia dan *volunteers* Makara Merah Bina Desa 2025 mengadakan kegiatan liwetan bersama warga Desa Wates Jaya. Kegiatan makan bersama ini diharapkan dapat mempererat hubungan emosional antara warga lokal dengan para panitia dan *volunteers*, sekaligus menjadi momen hangat untuk menutup rangkaian kegiatan dengan penuh kebersamaan.



3. ***Grand Closing* Makara Merah Bina Desa 2025**

   Grand Closing dilakukan pada hari terakhir di Desa Wates Jaya. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan plakat kepada kepala desa sebagai tanda terima kasih dan penyerahan donasi yang telah dikumpulkan dari hasil *Open Donation* Makara Merah Bina Desa 2025.



Makara Merah Bina Desa 2025 diikuti oleh 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang panitia, 8 (delapan) orang pengurus inti BEM FH UI 2025, dan 15 (lima belas) orang *volunteers* IKM FH UI. Kemudian, *Open Donation* Makara Merah Bina Desa 2025 berhasil mengumpulkan donasi sebanyak 383 pakaian layak pakai, 110 buku bacaan, dan uang donasi sebesar Rp3.748.000,00.

Teaser
Makara Merah Bina Desa 2025

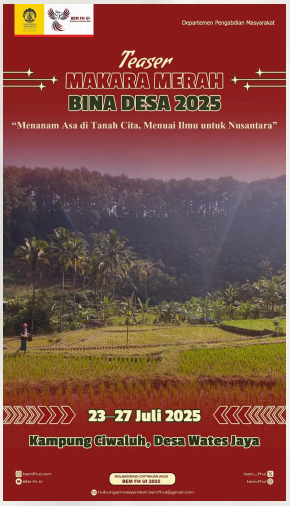

After Movie
Makara Merah Bina Desa 2025



Publikasi Pengumuman Volunteers





SMILE PROJECT 2025



Shakila Saraswati
Vice Project Officer I
Smile Project 2025



Muhammad Zhav Althaf
Project Officer
Smile Project 2025



Dasha Athalia Wiratama
Vice Project Officer II
Smile Project 2025

Smile Project 2025 mengusung tema "Menjalin Kasih di Usia Senja, Menebar Cinta di Setiap Langkah". Program kerja ini dilaksanakan untuk menunjukan komitmen BEM FH UI dalam memberikan perhatian kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang sering terlupakan, yakni masyarakat lanjut usia (lansia). Melalui pelaksanaan Smile Project 2025, BEM FH UI berupaya menghapus stigma negatif terhadap panti jompo, menghadirkan ruang kebersamaan antara generasi muda dan lansia, serta memberikan perhatian nyata dalam aspek kesehatan dan sosial. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa empati mahasiswa terhadap kelompok rentan, mengingatkan masyarakat luas akan pentingnya memperhatikan kesejahteraan para lansia, serta mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa usia senja adalah fase kehidupan yang patut dirayakan dengan kasih sayang, bukan dijalani dalam kesepian. Tujuan Smile Project 2025 adalah untuk meningkatkan kepedulian dan penghargaan terhadap lansia, menyediakan layanan kesehatan bagi lansia, serta menghapus stigma negatif terhadap panti jompo dengan menampilkan citra yang positif dan bernilai sosial.

PRE-EVENT

1. ***Smile and Care***

   Smile and Care merupakan rangkaian pembuka kegiatan *Pre-Event* Smile Project 2025 yang dilakukan di Panti Werdha Muslim Rumah Oma, Depok pada tanggal 15 November 2025. Rangkaian kegiatan dalam *Smile and Care* terdiri atas pemeriksaan kesehatan sederhana yang dilakukan bersama Departemen Pengabdian Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas

Kedokteran Universitas Indonesia (BEM IKM FK UI) dan sesi karaoke bersama.





2. ***Open Booth***

Open Booth merupakan rangkaian penuansaan *Pre-Event* Smile Project 2025 yang dilaksanakan pada selama 3 (tiga) hari di Taman S&T dan Taman Integrated Laboratory and Research Center (ILRC). Penuansaan tersebut diwujudkan melalui berbagai aktivitas, yakni area interaktif yang menghadirkan permainan jadul, seperti congklak, *nostalgic area*, bola bekel, dan *memory games*. Selain itu, terdapat *memory wall* yang menjadi sarana bagi pengunjung untuk menuliskan pesan atau harapan bagi para lansia menggunakan *sticky notes* dan *photobooth*.



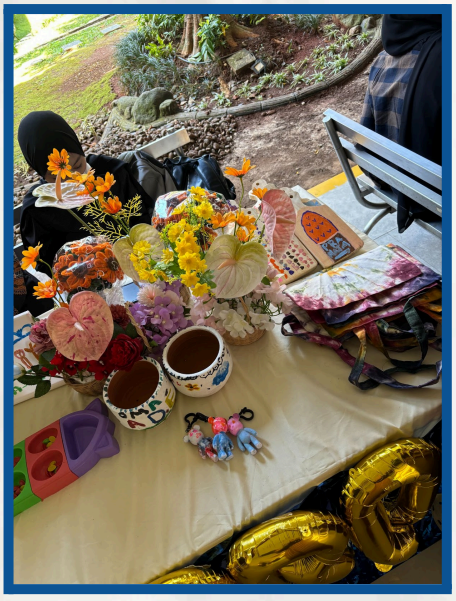

MAIN EVENT

Main Event Smile Project 2025 dilaksanakan pada tanggal 22 November 2025 di Panti Werdha Muslim Rumah Oma. Rangkaian kegiatan terdiri dari senam pagi

bersama Kloter 3 Barisan Inti Makara Merah (Barikara) *Batch* 13, *workshop* merangkai bunga, *sharing session*, dan makan siang bersama.



Tahun ini, Smile Project 2025 berkolaborasi bersama Departemen Pengabdian Masyarakat BEM IKM FK UI 2025 dalam mengadakan pengecekan kesehatan lansia. Lalu, Smile Project 2025 diikuti oleh 25 (dua puluh lima) lansia dari Panti Werdha Muslim Rumah Oma, Kloter 3 Barikara *Batch* 13, dan siswa/i PKL SMK Kesehatan Aras. Sebagai bentuk dukungan kepada Panti Werdha Muslim Rumah Oma, Pengmas BEM FH UI 2025 mengumpulkan donasi sebesar Rp4.650.000,00 dan menjual hasil karya Opa Oma sebesar Rp700.000,00 yang disalurkan secara tunai kepada Panti Werdha Muslim Rumah Oma, Depok.

Sebagai upaya menghapus stigma negatif terhadap panti jompo, Smile Project 2025 turut menghadirkan publikasi melalui akun Instagram BEM FH UI berupa konten edukatif dan informatif, yaitu:

NO ONE LEFT BEHIND: BERTUMBUH BERSAMA TANPA MELUPAKAN KELOMPOK LANSIA

Infografis ini membahas tentang realitas kehidupan penduduk lansia di Indonesia di tengah era modern yang semakin berfokus pada generasi muda, khususnya ketika Indonesia mulai memasuki fase *ageing population*. Infografis ini menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi lansia, mulai dari keterbatasan akses kesehatan, minimnya jaminan kesejahteraan, hingga stigma negatif terhadap panti wreda. Selain itu, infografis ini juga mengangkat tantangan dalam menjaga kesehatan lansia, pentingnya pemenuhan hak lansia untuk hidup layak di usia senja, serta menekankan bahwa lansia bukan sekadar kelompok rentan, melainkan individu yang tetap berdaya dan memiliki kontribusi bagi masyarakat. Harapannya, infografis ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepedulian, empati, dan peran bersama dalam

menciptakan lingkungan yang ramah lansia.



MENEBAR CINTA UNTUK MEREKA YANG MENUA

Reels ini dikemas dalam video kreatif yang menarik, yakni dengan mengaitkan Film *Up* dengan kesejahteraan lansia. Melalui *review* singkat Film *Up* yang menggambarkan kesepian dan kehilangan yang kerap dialami lansia di usia senja. *Reels* ini menunjukkan bahwa kisah Carl bukan sekadar cerita fiksi, melainkan cerminan realitas yang dialami banyak lansia di kehidupan nyata. Dari kisah tersebut, *reels* ini kemudian dilanjutkan dengan wawancara bersama para responden yang menggambarkan kekhawatiran orang tua ketika anak-anak mereka beranjak dewasa, harapan mereka di masa tua, serta hal-hal sederhana yang membuat mereka merasa dicintai.

Selain itu, *reels* ini juga menyoroti fenomena *ageing population* di Indonesia, di mana jumlah lansia terus meningkat tetapi belum sepenuhnya diiringi dengan perhatian dan dukungan yang memadai dari keluarga, masyarakat, maupun negara. *Reels* ini menegaskan bahwa lansia tidak seharusnya menghadapi masa tua dalam kesendirian, melainkan berhak untuk dihargai, ditemani, dan diperlakukan dengan penuh kasih.

Harapannya, *reels* ini dapat meningkatkan kesadaran generasi muda dan masyarakat untuk lebih peka terhadap kondisi lansia, menumbuhkan empati, serta mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan sekitar agar para lansia dapat menjalani hari tua dengan layak, bermakna, dan penuh kebahagiaan.



DHARMA MAKARA



Faiqah Nurizzah Riandika
Person in Charge
Dharma Makara



Grace Anabel Pakpahan
Person in Charge
Dharma Makara



Muhammad Fauzan
Person in Charge
Dharma Makara

Dharma Makara merupakan program kerja pengembangan masyarakat (*community development*) dari Pengmas BEM FH UI 2025. Program ini berfokus pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di RT 03 RW 19 Kampung Lio, Depok, melalui kegiatan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Dharma Makara menjalankan intervensi terhadap tiga isu utama, yaitu hukum, pendidikan, dan ekonomi, yang masing-masing dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara spesifik. Pelaksanaan program ini dilakukan secara berkesinambungan selama lima tahun, dengan tujuan menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kampung Lio. Untuk memulai program kerja tersebut, Pengmas BEM FH UI 2025 mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dan terukur berdasarkan hasil asesmen melalui penyusunan *Blueprint* Dharma Makara. Setelah itu, dilaksanakan Grand Launching Dharma Makara sebagai sarana pengenalan visi, misi, dan arah program Dharma Makara kepada warga Kampung Lio serta pemangku kepentingan terkait.

PENYUSUNAN *BLUEPRINT* DAN PEMBANTUAN HUKUM

Pada tahun 2024, lokasi pelaksanaan serta tiga bidang intervensi Dharma Makara telah ditetapkan secara pasti. Memasuki tahun 2025 sebagai bentuk keberlanjutan program, Dharma Makara menyusun sebuah *Blueprint* Dharma Makara yang berfungsi sebagai landasan pelaksanaan kegiatan *community development* selama lima tahun ke depan. Dalam proses penyusunan blueprint tersebut, Pengmas BEM FH UI 2025 juga

melakukan wawancara terhadap lebih dari 70 warga guna memperoleh pemetaan kebutuhan, permasalahan, serta potensi masyarakat secara komprehensif. Hasil wawancara tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rancangan program beserta tahapan pelaksanaan kegiatan ke depan. Seiring dengan penyusunan *blueprint*, Pengmas BEM FH UI 2025 juga melaksanakan pembantuan hukum kepada lima warga, yang meliputi pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran, serta berbagai permasalahan administrasi kependudukan lainnya.





Setelah *blueprint* selesai disusun, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan Grand Launching Dharma Makara sebagai simbol dimulainya kegiatan *community development* Dharma Makara di Kampung Lio bersama masyarakat setempat. Acara dimulai dengan penampilan dari anak-anak Kampung Lio dan Kloter 1 Barikara Batch 13. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemaparan *Blueprint* Dharma Makara serta penyerahan hasil bantuan hukum. Selanjutnya, acara ditutup dengan pembagian *doorprize*.





***GRAND LAUNCHING* DHARMA MAKARA**

Pada tahun ini, Pengmas BEM FH UI 2025 berhasil melakukan pemetaaan kebutuhan bantuan hukum warga Kampung Lio melalui pelaksanaan survei dan wawancara mendalam yang dilakukan kepada 71 warga RT 03 RW 19. Lalu, Pengmas

BEM FH UI 2025 juga berhasil menerbitkan *Blueprint* Dharma Makara 2026–2030 sebagai pedoman utama pelaksanaan Dharma Makara di Kampung Lio yang disusun berdasarkan kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat RT 03 RW 19. Selain itu, Pengmas BEM FH UI 2025 juga berhasil melaksanakan pembantuan hukum secara langsung kepada sekurang-kurangnya 5 (lima) warga Kampung Lio yang mengalami kendala dalam pengurusan dan pemenuhan dokumen hukum sebagai upaya awal untuk meningkatkan akses dokumen hukum dan pemahaman hukum di masyarakat. Terakhir, Pengmas BEM FH UI 2025 melaksanakan Grand Launching Dharma Makara sebagai momentum awal dan perayaan atas dimulainya rangkaian program kerja Dharma Makara.

***Blueprint* Dharma Makara**

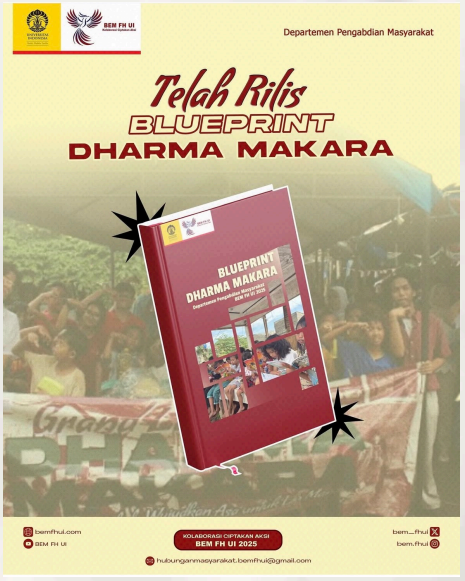

KAMPANYE HARI BESAR SOSIAL MASYARAKAT

Kampanye Hari Besar Sosial Masyarakat adalah program kerja yang dibuat untuk memperingati hari-hari yang berhubungan dengan isu sosial masyarakat. Pengmas BEM FH UI 2025 melakukan kegiatan untuk memperingati hari-hari tersebut melalui kegiatan *community service* ataupun publikasi yang berisi informasi tentang hari-hari besar tersebut.

HARI BUKU SEDUNIA (17 APRIL 2025) X HARI PENDIDIKAN NASIONAL (2 MEI 2025)



Grace Anabel
PiC Perayaan Hari Buku Sedunia x Hari Pendidikan Nasional



M. Fauzan
PiC Perayaan Hari Buku Sedunia x Hari Pendidikan Nasional

Perayaan Hari Buku Sedunia x Hari Pendidikan Nasional 2025 merupakan program kerja dari Pengmas BEM FH UI 2025 berupa kegiatan *community service* yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Buku Sedunia dan Hari Pendidikan Nasional. Melalui program kerja ini, Pengmas BEM FH UI 2025 dalam mengimplementasikan fungsi edukasi dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya pendidikan sejak usia dini. Pada tahun ini, Perayaan Hari Buku Sedunia x Hari Pendidikan Nasional 2025 dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Mei 2025 di Kampung Lio, Depok agar dapat menumbuhkan minat membaca dan membiasakan budaya membaca pada anak-anak di Kampung Lio melalui penyediaan buku bacaan yang layak dan ramah anak. Selain itu, program kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anak-anak akan pentingnya bermimpi dan upaya untuk mewujudkannya melalui pendidikan yang berkelanjutan sebagai awal dari pengembangan diri di masa depan. Kemudian, Pengmas BEM FH UI 2025 juga menyediakan sarana literasi berupa Pojok Baca yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berhasil menghimpun sebanyak 316 eksemplar buku serta donasi dana sebesar Rp1.205.000,00 yang kemudian dimanfaatkan untuk pembuatan Pojok Baca, yakni sudut baca sebagai sarana literasi masyarakat dan ruang

bagi anak-anak di Kampung Lio untuk memilih buku sesuai minat mereka.





HARI DONOR DARAH (14 JUNI 2025)



Oliver Dave
PiC Peringatan Hari Donor Darah

Hari Donor Darah Sedunia diperingati melalui publikasi di Instagram BEM FH UI. Infografis ini membahas tentang sejarah dan alasan mengapa Hari Donor Darah Sedunia menjadi penting untuk diperingati setiap tahunnya setiap 14 Juni. Tujuannya adalah sebagai sarana penyadaran tentang kebutuhan darah yang terus melambung, mendorong lebih banyak pihak yang terlibat sebagai pendonor darah, bentuk penghargaan kepada para pendonor darah, dan alat peringatan bahwa mendonor darah memiliki manfaat untuk kesehatan bagi pendonor.

Pada tahun 2024, kebutuhan darah nasional Indonesia mencapai 5,6 juta kantung per tahun, tetapi yang tersedia hanya sekitar 4 juta kantung darah. Hal tersebut bisa terjadi karena musim liburan, musim penyakit, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu, dengan adanya mitos yang beredar yang mengatakan donor darah membuat tubuh lemas sehingga mudah terserang penyakit, menyebabkan kurangnya kantung darah di Indonesia. Harapannya, infografis ini dapat menghilangkan kekeliruan dan stigma buruk dari masyarakat mengenai donor darah serta menjelaskan syarat dan tata cara donor darah serta pencantuman lokasi Palang Merah Indonesia di daerah Jabodetabek.

Infografis Hari Donor Darah



HARI KELUARGA (29 JUNI 2025)



Kelvin Oktariano
PiC Peringatan Hari Keluarga

Peringatan Hari Keluarga Nasional merupakan program kerja dari Pengmas BEM FH UI 2025 yang dilaksanakan dalam bentuk *community action* melalui publikasi infografis di media sosial. Program ini hadir sebagai respons terhadap dualitas antara peringatan Hari Keluarga Nasional yang menyimbolkan keharmonisan, dengan realitas pahit tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Infografis ini berupaya membongkar stigma bahwa KDRT bukan merupakan "aib keluarga" yang harus ditutupi, melainkan sebuah tindak pidana yang membutuhkan intervensi hukum dan sosial. Dalam tulisan tersebut, dapat dilihat data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang mencatat 19.045 kasus KDRT terjadi sepanjang tahun 2024. Publikasi ini juga secara komprehensif membahas definisi dan sanksi pidana KDRT berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, bentuk-bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran), serta mengenalkan mekanisme perlindungan korban melalui layanan SAPA 129.

Lebih lanjut, infografis ini juga mengkritisi kesenjangan antara harapan hukum dan realitas implementasi, di mana penegakan hukum sering kali tidak berpihak sepenuhnya pada korban, sebagaimana tercermin dalam analisis studi kasus yang diangkat. Harapannya, infografis ini dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai urgensi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, mendorong keberanian korban dan masyarakat untuk melapor, serta mendesak pemerintah untuk memperkuat upaya preventif seperti penyediaan konseling pranikah dan pemulihan korban yang lebih inklusif.

Infografis Hari Keluarga



HARI ANAK NASIONAL (23 JULI 2025)





Shakila Saraswati
PiC Perayaan Hari Anak Nasional

Acindhi Saskeisha
PiC Perayaan Hari Anak Nasional

Perayaan Hari Anak Nasional 2025 adalah program kerja dari Pengmas BEM FH UI 2025 berupa *community service* dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional. Perayaan Hari Anak Nasional 2025 merupakan pengimplementasian fungsi edukasi dan pengabdian masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ruang yang aman, menyenangkan, dan inspiratif bagi anak-anak. Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan rasa kepedulian IKM FH UI, Perayaan Hari Anak Nasional 2025 juga membuka kesempatan bagi IKM FH UI untuk mengikuti kegiatan ini melalui sistem *open volunteers*. Pada tahun ini, Perayaan Hari Anak Nasional 2025 mengusung tema "Merangkai Cerita Menjadi Pelita" sehingga diharapkan program ini dapat menjadi momen yang tidak hanya memberikan keceriaan, tetapi juga membangun kepercayaan diri, empati, dan semangat berkarya dalam diri setiap anak. Selain itu, program kerja ini juga mendorong keterlibatan aktif mahasiswa FH UI dalam kegiatan yang mendukung pemenuhan hak anak.

Perayaan Hari Anak Nasional 2025 dilaksanakan pada Rabu, 6 Agustus 2025 di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1. Kegiatan ini dihadiri oleh 143 (seratus empat puluh tiga) anak Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 dan 16 (enam belas) IKM FH UI sebagai *volunteers*. Perayaan Hari Anak Nasional 2025 diisi dengan pendampingan anak-anak dalam seni melukis *tote bag*, penguatan keberanian bermimpi melalui pembuatan dan presentasi mading harapan bertemakan harapan dan cita-cita, serta permainan edukatif untuk mengenalkan berbagai profesi.



HARI KUCING SEDUNIA (8 AGUSTUS 2025)



Nasywa Azighah Ramadhani
PiC Perayaan Hari Kucing

Perayaan Hari Kucing Sedunia 2025 dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dengan berkolaborasi bersama @kucingfhui melalui *open booth* di Taman SnT dengan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu bermain *games*, berdonasi, dan berkeliling untuk memberi makan kucing FH UI, baik dengan *treats* maupun *cup* yang berisi makanan kucing. Program kerja ini berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp1.700.000,00 yang kemudian diberikan sepenuhnya kepada @kucingfhui.





HARI DISABILITAS (3 DESEMBER 2025)



Kanaya Putri Maheswari
PiC Peringatan Hari Disabilitas

Program kerja ini hadir dalam rangka memperingati Hari Disabilitas 2025 pada tanggal 3 Desember 2025. Peringatan Hari Disabilitas 2025 dilakukan dengan melakukan publikasi Infografis pada Instagram BEM FH UI. Publikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap masih rendahnya akses ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2023, pekerja penyandang disabilitas hanya mencapai 0,55% dari total tenaga kerja nasional, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengatur kewajiban kuota kerja bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

Infografis ini mengangkat pesan bahwa disabilitas bukan hambatan untuk berkarya, salah satunya melalui kisah singkat Zidan,

penyandang dwarfisme berusia 20 tahun yang berhasil memperoleh pekerjaan sebagai desainer grafis di PT TransJakarta setelah mendapatkan pendampingan pada Job Fair Disabilitas 2025 di Jakarta. Kisah ini menjadi contoh dari implementasi kebijakan afirmatif yang selama ini diatur dalam undang-undang. Kemudian, infografis ini juga memberikan saran agar implementasi undang-undang penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan dapat berdampak lebih luas dan merata, yaitu dengan menjamin proses rekrutmen dan lingkungan kerja yang aksesibel, memperluas pelatihan dan layanan pendampingan karier yang inklusif, serta memperkuat pengawasan pemenuhan kuota kerja bagi penyandang disabilitas.

Infografis Hari Disabilitas



LENSA SOSIAL

Lensa Sosial adalah program kerja dalam bentuk publikasi di Instagram BEM FH UI yang mengangkat topik isu-isu sosial kemasyarakatan yang dikemas dengan bentuk menarik untuk meningkatkan kesadaran IKM FH UI, UI, dan Indonesia.

LENSA SOSIAL I



Dasha Athalia Wiratama
PiC Lensa Sosial I

Lensa Sosial I mengangkat isu pernikahan dini yang masih marak terjadi di Indonesia dengan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui infografis ini, dijelaskan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta lemahnya penegakan hukum. Lensa Sosial I bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap dampak buruk pernikahan dini, sekaligus mendorong langkah pencegahan dan solusi yang lebih aktif.

Infografis Lensa Sosial I



LENSA SOSIAL II



Abie Leonardus Panota
PiC Lensa Sosial II

Lensa Sosial II mengangkat isu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Infografis ini menyoroti kurangnya persiapan dan perencanaan dalam pelaksanaan program MBG sehingga perlu dilakukan evaluasi ulang secara menyeluruh. Lensa Sosial II bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melihat realitas di lapangan secara kritis, sekaligus mendorong perhatian publik dan pemerintah agar melakukan perbaikan agar tujuan mulia program MBG dapat tercapai secara efektif.

Infografis Lensa Sosial II



LENSA SOSIAL III



Hanna Christabel Donata
PiC Lensa Sosial III

Lensa Sosial III mengangkat isu mengenai ketimpangan kesejahteraan antara tunjangan DPR terbaru dan gaji guru honorer di Indonesia. *Reels* ini juga dibuat untuk menyoroti adanya perbedaan signifikan antara peningkatan gaji guru honorer bersertifikasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan kondisi guru honorer tanpa sertifikasi yang masih berada dalam ketidakpastian, meskipun telah mengabdi bertahun-tahun. Melalui kemasan video *reels* singkat ini, Lensa Sosial III diharapkan mampu mendorong empati dan pemahaman mengenai isu terkait kepada penontonnya.

Reels Lensa Sosial III



LET'S DONATE

Let's Donate merupakan program kerja insidental untuk mengumpulkan donasi berupa materiil yang akan diberikan kepada tujuan donasi. Pada tahun ini, telah terlaksana 7 (tujuh) kali Let's Donate dengan rincian:

1. Let's Donate untuk keluarga Almarhum Bapak Aris Djatmiko Purwo terkumpul sebesar Rp250.000,00;
2. Let's Donate untuk keluarga Almarhum Bapak Dr. Mustafa Fakhri, S.H., M.H., LL.M. terkumpul sebesar Rp250.000,00;
3. Let's Donate: Bagi-Bagi Takjil untuk masyarakat di area Jalan Raya Margonda terkumpul sebesar Rp880.000,00;
4. Let's Donate untuk keluarga Almarhumah Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki terkumpul sebesar Rp200.000,00;
5. Let's Donate untuk keluarga Almarhum Bapak Maulana terkumpul sebesar Rp2.335.018,00;
6. Let's Donate: Aliansi Donasi Erupsi Gunung Semeru BEM se-UI yang beranggotakan BEM IM FKM, BEM FIB, BEM FISIP, BEM FMIPA, BEM FK, BEM FT, BEM Fasilkom, dan BEM Vokasi terkumpul sebesar Rp2.046.000,00; dan
7. Let's Donate: Aliansi Donasi Banjir dan Longsor Sumatra BEM se-UI yang beranggotakan BEM IM FKM, BEM FIB, BEM FMIPA, BEM FK, dan BEM FT terkumpul sebesar Rp20.270.169,00.



Let's Donate:
Bagi-Bagi Takjil



Let's Donate:
Erupsi Gunung Semeru



Let's Donate:
Banjir & Longsor Sumatra

PENYERAHAN DONASI

Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UI 2025 membuka *open donation* untuk aksi yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025. Sebagian dari hasil donasi tersebut dialokasikan bagi masyarakat yang terdampak dari tragedi tersebut. Selanjutnya, Pengmas BEM FH UI 2025 melakukan penyerahan donasi secara langsung kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta serta keluarga korban yang terdampak.

Penyerahan Donasi kepada LBH Jakarta sebesar Rp27.250.000,00

Pada Kamis, 24 September 2025, BEM FH UI 2025 memberikan donasi kepada LBH Jakarta sebagai bentuk dukungan agar terus dapat memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan dan terpinggirkan.



Penyerahan Donasi kepada Keluarga Korban Aksi

Sebanyak 10 nyawa terenggut dalam tragedi Aksi 25–31 Agustus 2025. Sebagai bentuk solidaritas, BEM FH UI 2025 menyalurkan donasi kepada keluarga korban yang berhasil dijangkau, yaitu keluarga dari:

1. Alm. Affan Kurniawan;
2. Alm. Sarina Wati;
3. Alm. Rusdamdiansyah;
4. Alm. Sumari;
5. Alm. Andika Lutfi Falah; dan
6. Alm. Iko Juliant Junior.



Pengmas!!

in Numbers



Seluruh donasi yang Pengmas BEM FH UI 2025 kumpulkan telah disalurkan kepada penerima yang lebih luas, yakni masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kita semua.

- **UANG TUNAI ----- RP86.045.742,00**
- **BUKU ---------- 426 BUKU**
- **PAKAIAN ---------- 383 PAKAIAN**
- **MAKANAN KUCING------- 3 X 800 GR**

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut berdonasi!

Hari-Hari Bersama PENGMAS





















SAMPAI JUMPA DI

PERGERAKAN & PENGABDIAN

SELANJUTNYA!









PROTECT EARTH AT ALL COSTS



Your paragraph text